



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KESEHATAN**



RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2029 dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tak terduga. Oleh karena itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran aktif masyarakat.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2025-2029. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar.

Denpasar, 19 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Pembina Tk. I

NIP. 196709151998032003



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

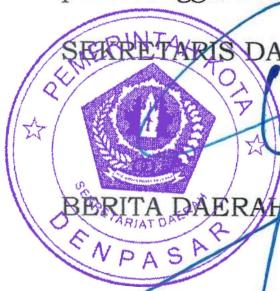
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025
WALIKOTA DENPASAR,



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	108
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	108
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	108
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	111
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	112
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra	113
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	115
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	117
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	117
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	159
BAB V PENUTUP	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Denpasar.....	18
Gambar 2.2 Struktur Organisasi RSUD Wangaya	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manuskai Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar	21
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan	23
Tabel 2.3 Distribusi Puskesmas Berdasarkan Desa yang di Wilayahahi.....	26
Tabel 2.4 Status Akreditasi Puskesmas se-Kota Denpasar Tahun 2024	28
Tabel 2.5 Kelengkapan Aspek Puskesmas Juli 2025.....	28
Tabel 2.6 Jumlah Tenaga Pada RSUD Wangaya Tahun 2024	29
Tabel 2.7 Penyebab Kematian Bayi Tahun 2024	40
Tabel 2.8 Hasil Capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024.....	81
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	82
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan (Dinas Kesehatan Kota Denpasar) Kota Denpasar Tahun 2021-2024	86
Tabel 2.11 Data Kunjungan Pasien di Instalasi Rawat Jalan	100
Tabel 2.12 Data 10 Besar Penyakit Pasien Instalasi Rawat Jalan RSUD Wangaya Tahun 2024	101
Tabel 2.13 Ruangan dan Jumlah Tempat Tidur	102
Tabel 2.14 Data Hunian Pasien di Instalasi Rawat Inap 2024.....	102
Tabel 2.15 Data Kinerja Rumah Sakit Tahun 2024	103
Tabel 2.16 Data Pelayanan Medis Rumah Sakit.....	104
Tabel 2.17 Data 10 Besar Penyakit Instalasi Rawat Inap RSUD Wangaya Kota Denpasar tahun 2024	104
Tabel 2.18 Data Pengunjung di Instalasi Gawat Darurat.....	105
Tabel 2.19 Data 10 Besar Penyakit Unit Instalasi Gawat Darurat 2024	105
Tabel 2.20 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Wangaya Kota Denpasar Tahun 2021-2024.....	106
Tabel 2.21 Isu Strategis Dinas Kesehatan	111
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan	114

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan	115
Tabel 3.3 Strategi dan arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan	116
Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan	118
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan.....	131
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	156
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD	159
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra	160
Tabel 4.7 Target Pendapatan RSUD Wangaya Tahun 2026-2030	164

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Grafik 2.2	Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan	22
Grafik 2.3	Umur Harapan Hidup di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024.....	37
Grafik 2.4	Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	38
Grafik 2.5	Prevalensi Stunting di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	38
Grafik 2.6	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024.....	39
Grafik 2.7	Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Denpasar Th 2020 s/d 2024	41
Grafik 2.8	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024.....	42
Grafik 2.9	Angka Kematian Neonatus per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024.....	43
Grafik 2.10	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Tahun 2020 s/d 2024	44
Grafik 2.11	Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	46
Grafik 2.12	Rasio Puskesmas di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024.....	46
Grafik 2.13	Rasio Puskesmas Pembantu di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	47
Grafik 2.14	Rasio RS per Satuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	47
Grafik 2.15	Rasio Dokter Umum di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	48
Grafik 2.16	Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	48
Grafik 2.17	Cakupan Komplikasi Kebidanan Ditangani di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	49
Grafik 2.18	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Mempunyai Kompetensi Kebidanan Tahun 2020 s/d 2024.....	50
Grafik 2.19	Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024 ...	51
Grafik 2.20	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2020 s/d 2024 ...	51
Grafik 2.21	Persentase Bayi Mendapatkan Imunisasi Campak di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	52

Grafik 2.22 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Denpasar	
Tahun 2020 s/d 2024	53
Grafik 2.23 Non Folio AFP Rate per 100.000 Penduduk Tahun 2020 s/d 2024	54
Grafik 2.24 Cakupan Balita Pneumonia Ditangani di Kota Denpasar Tahun 2020	
s/d 2024	54
Grafik 2.25 Cakupan Pengobatan Semua Kasus TBC Tahun 2020 s/d 2024	55
Grafik 2.26 Succes Rate TB di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	56
Grafik 2.27 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun	
2020 s/d 2024.....	57
Grafik 2.28 Incidence Rate (IR) DBD per 100.000 Penduduk Tahun 2020 s/d 2024 ...	57
Grafik 2.29 Penderita Diare yang Ditangani di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024..	58
Grafik 2.30 Angka Kejadian Malaria Tahun 2020 s/d 2024	59
Grafik 2.31 Prevalensi HIV AIDS (persen) dari Total Populasi Tahun 2020 s/d 2024 ..	59
Grafik 2.32 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d	
2024	60
Grafik 2.33 Cakupan Puskesmas Tahun 2020 s/d 2024	61
Grafik 2.34 Cakupan Puskesmas Pembantu Tahun 2020 s/d 2024	61
Grafik 2.35 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2020 s/d 2024	62
Grafik 2.36 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	63
Grafik 2.37 Penanganan Komplikasi Pada Neonatal Tahun 2020 s/d 2024.....	64
Grafik 2.38 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di Kota Denpasar Tahun	
2020 s/d 2024	47
Grafik 2.39 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Kota	
Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	66
Grafik 2.40 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan	
Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2020 s/d 2024	67
Grafik 2.41 Persentase KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	
Tahun 2020 s/d 2024.....	67
Grafik 2.42 Persentase Orang Terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan	
Kesehatan di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	68
Grafik 2.43 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2020	

s/d 2024.....	68
Grafik 2.44 Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	69
Grafik 2.45 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	70
Grafik 2.46 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024.....	71
Grafik 2.47 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	72
Grafik 2.48 Cakupan K1, K4 dan K6 Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	74
Grafik 2.49 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	75
Grafik 2.50 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2020 s/d 2024.....	76
Grafik 2.51 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024.....	77
Grafik 2.52 Persentase Kepesertaan BPJS Tahun 2020 s/d 2024.....	77
Grafik 2.53 Case Fatality Rate Penderita DBD di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	78
Grafik 2.54 Persentase Rumah Tangga yang Melaksanakan PHBS di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024.....	78
Grafik 2.55 Persentase TPM Memenuhi Syarat di Kota Denpasar Tahun 2020 s/d 2024	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan program pembangunan kesehatan daerah dalam lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Pembangunan bidang kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tantangan kesehatan ke depan semakin kompleks, termasuk peningkatan beban penyakit tidak menular dan ancaman penyakit menular. Selain itu transformasi system kesehatan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mengharuskan daerah untuk melakukan penyesuaian dan penguatan pelayanan kesehatan primer, sistem ketahanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan upaya program dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, sehingga perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat



Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup OPD. Renstra merupakan dokumen resmi yang menjadi arah bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Rumah Sakit sebagai Unit Organisasi bersifat Khusus (OBK) serta Puskesmas dan UPTD Farmasi sebagai unit pelaksana teknis (UPTD) dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan.

Pembangunan kesehatan di Kota Denpasar sinergi dengan pembangunan kesehatan nasional dan pembangunan kesehatan provinsi Bali. Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan pada astha cita point 4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Pada bidang kesehatan dengan memperkuat sistem kesehatan nasional. Pada program prioritas menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia : Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. Sedangkan pada program hasil terbaik cepat yaitu menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun rumah sakit lengkap berkualitas. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga mengacu pada program dan kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Bali, yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana yang memuat Visi Misi Gubernur, Tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dan disusun untuk mendukung Visi pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025-2029 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);
 22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);



23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan maksud:

- a. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar mensinergikan Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Daerah melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh komponen (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha dan pemangku kepentingan) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat kota Denpasar di bidang Kesehatan yang tertuang dalam visi, misi dan program pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar.

1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mensinergikan keterpaduan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional maupun daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar.
- b. Mensinergikan prioritas program dan kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun.
- c. Menjamin keselarasan sasaran dan tujuan Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang diharapkan bermanfaat dalam proses perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat Latar belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan (capaian renstra periode sebelumnya) dan kelompok sasaran layanan serta permasalahan pelayanan dan isu strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Tahun 2025-2029

Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK),

Bab V : Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Denpasar Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

A. Tugas Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

B. Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
- c. pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang kesehatan.

C. Uraian Tugas Dinas Kesehatan

1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Dinas Kesehatan berdasarkan Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan Dinas;
- c. menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan kota Denpasar di bidang kesehatan meliputi kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD Dinas;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;



- f. membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala (bulanan, triwulanan, semester) agar diperoleh kinerja yang diharapkan pada Dinas Kesehatan dan UPTD;
- g. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja; merumuskan kebijakan teknis Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan kota di bidang kesehatan;
- j. menyelenggarakan pengembangan program di bidang kesehatan, serta UPT Dinas;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kesehatan;
- l. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- m. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan;
- n. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- o. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan;
- q. memberikan pelayanan perizinan dan rekomendasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan perizinan;
- r. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
- t. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Sekretaris dan Kepala Bidang;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan



v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- c. menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyelenggarakan penyusunan produk hukum daerah terkait Sekretariat;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- j. merencanakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan mengelola perencanaan program, data dan pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas dan laporan dinas lainnya;



- l. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- m. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan;
- o. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas;
- p. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- q. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (bulanan, triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- r. memfasilitasi rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala (bulanan, triwulan, semester) agar diperoleh kinerja yang diharapkan pada Dinas Kesehatan dan UPTD;
- s. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- t. menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- v. melaksanakan pengawasan di internal dan berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) di Lingkungan Dinas;
- w. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- x. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat;
- y. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

A. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan Rencana



- operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan sub bag keuangan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - c. menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
 - d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - g. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait dengan keuangan/tarif;
 - i. menyusun rencana anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
 - k. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - n. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.



B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana operasional Dinas Kesehatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- c. menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas, UPTD Dinas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
- i. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan produk daerah terkait bagian umum dan kepegawaian;
- l. menyusun rencana anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;
- o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja



Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

c. menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;

d. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

e. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

f. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Kesehatan Masyarakat;

i. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan kegiatan Kesehatan Keluarga, Gizi, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan Asuhan Mandiri dan Taman Obat Keluarga (TOGA), kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga, kegiatan Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA), kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif dan Lansia sesuai dengan peraturan yang berlaku;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai



dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Pemerintahan; dan

- l. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- c. menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- i. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan kegiatan Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), kegiatan Imunisasi, kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kesehatan Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. melaksanakan verifikasi pemenuhan standar dan rekomendasi usaha perizinan pada usaha pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit;



- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- c. menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Pelayanan Kesehatan;
- i. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer,



- kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang standardisasi, transformasi pelayanan kesehatan primer pada klinik, puskesmas, dan standardisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan rekomendasi/ perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, pelayanan penunjang/laboratorium transformasi pelayanan kesehatan rujukan, termasuk, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - k. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan P3K untuk kegiatan nasional dan daerah;
 - l. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terkait Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - m.mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan; dan
 - o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
 - c. menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
 - d. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dilingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - e. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan



Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

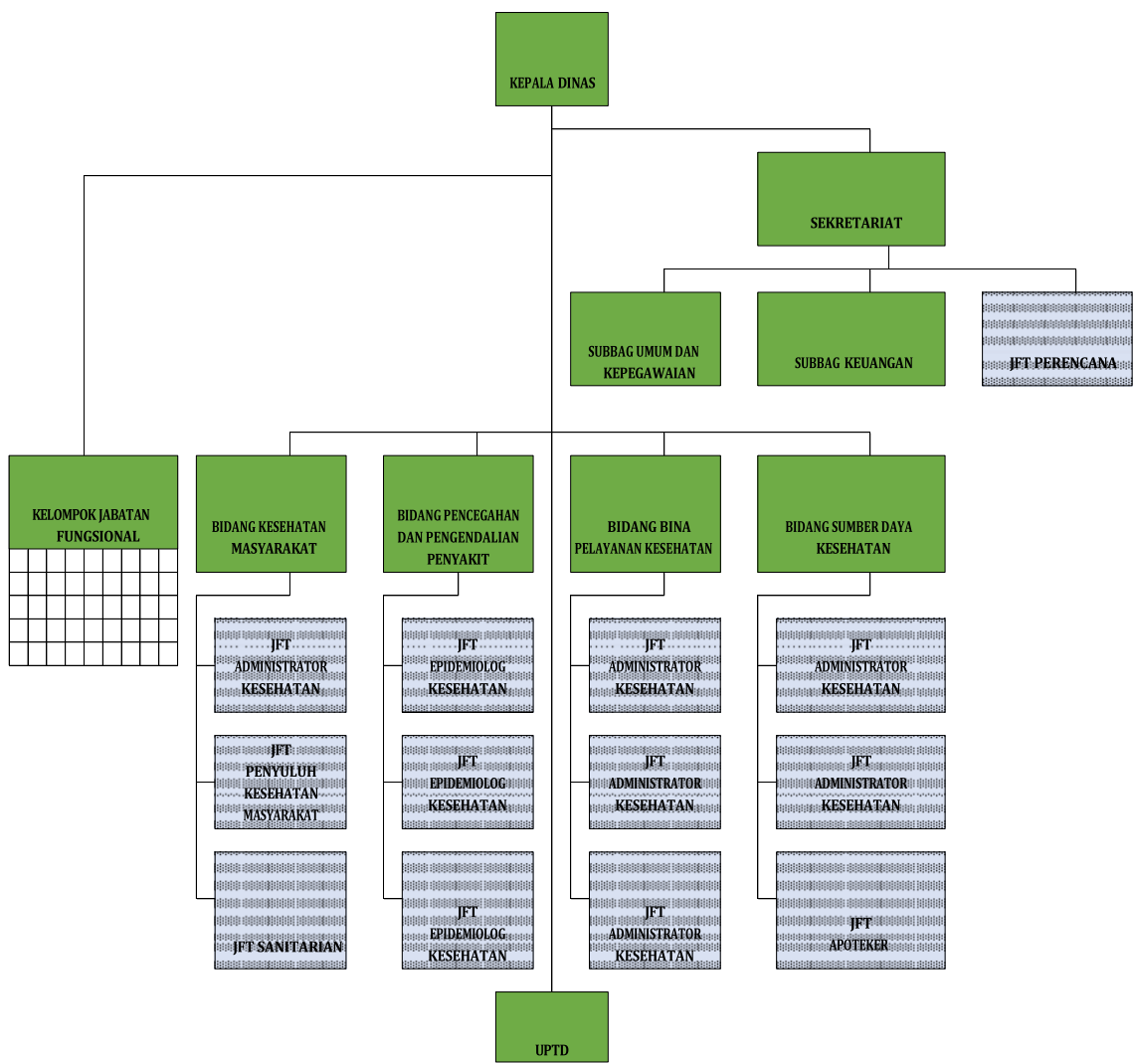
- f. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- i. melaksanakan verifikasi pemenuhan standar dan rekomendasi usaha perizinan pada praktik nakes mandiri;
- j. melaksanakan verifikasi pemenuhan standar dan rekomendasi usaha perijinan sarana kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta registrasi sumber daya manusia kesehatan sesuai kewenangan dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia Kesehatan;
- m. melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan;
- n. memfasilitasi kegiatan kaji banding, praktik lapangan dan magang di bidang Kesehatan;
- o. merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi penyediaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana puskesmas;
- p. mengelola data dan informasi sumber daya manusia Kesehatan;
- q. melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTD;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- s. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan



- t. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
SESUAI DENGAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 45 TAHUN 2023**



TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR

A. Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya

Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pelayanan Kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.



B. Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya

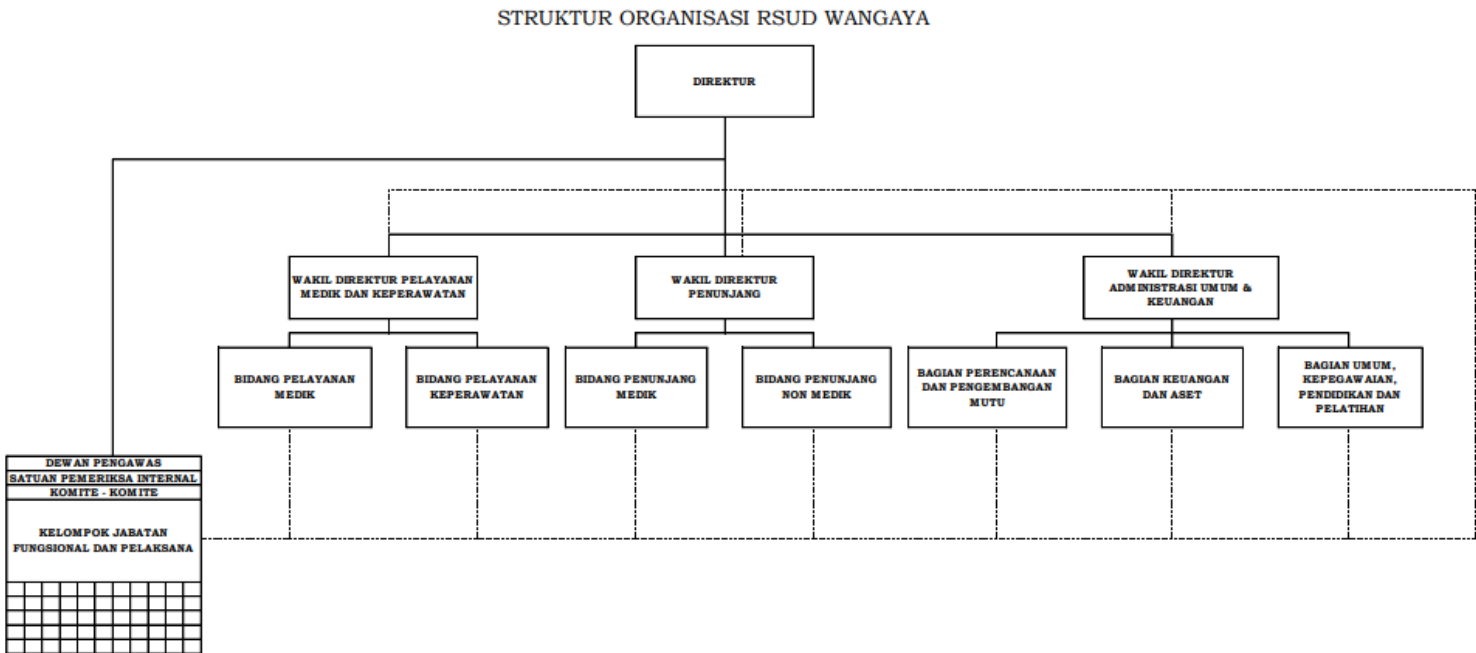
Dalam menyelenggarakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medik;
- d. penyelenggaraan pelayanan medik dan non medik;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran;
- i. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- j. penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



C. Struktur Organisasi RSUD Wangaya

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumber Daya Dinas Kesehatan

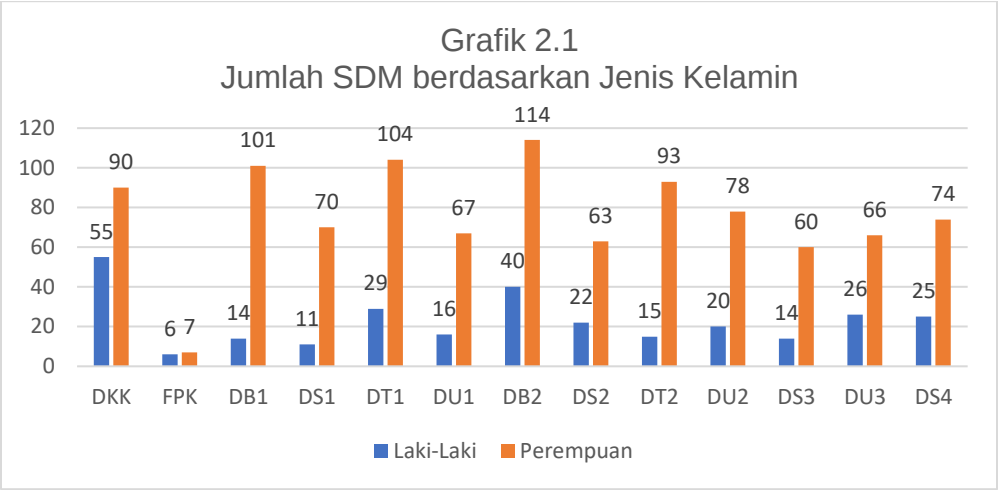
1. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Denpasar, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Sampai Juni 2025, Dinas Kesehatan Kota Denpasar didukung oleh 412 PNS, 740 PPPK dan 125 tenaga non ASN. Jumlah SDM Dinas Kesehatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

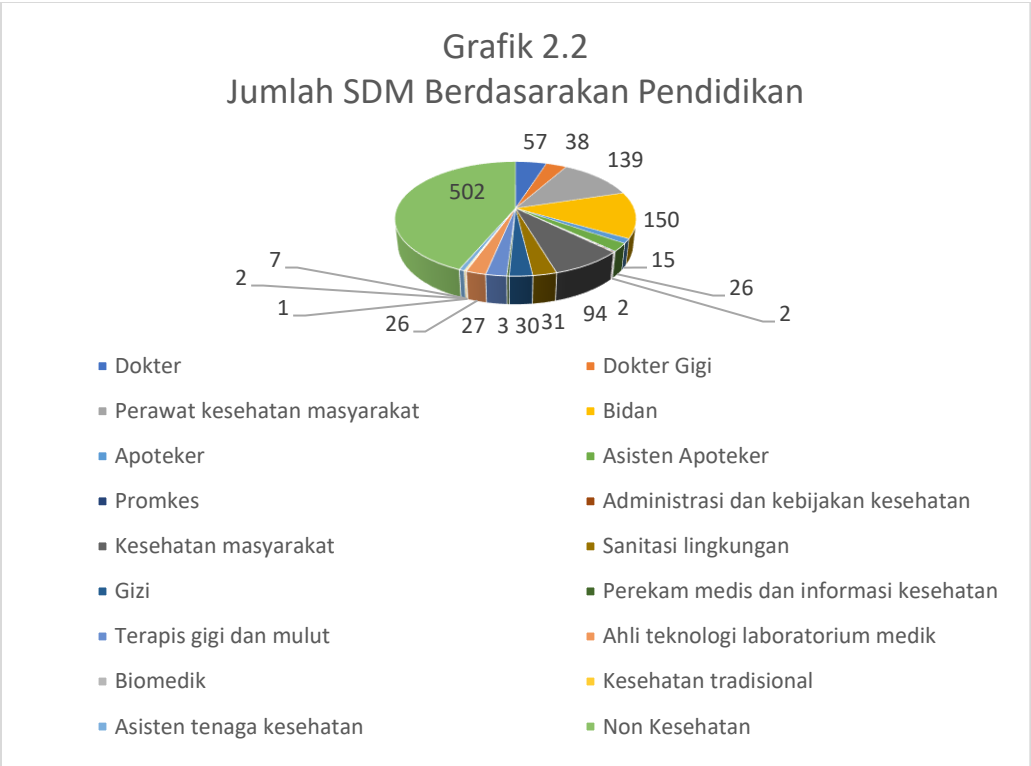
Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Denpasar

No	Unit Kerja	Jumlah Sesuai Jenis Kelamin											
		PNS			PPPK			NON ASN			Total		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	19	46	65	21	40	61	15	4	19	55	90	145
2	UPTD Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	2	4	6	0	3	3	4	0	4	6	7	13
3	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	5	25	30	5	73	78	4	3	7	14	101	115
4	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	3	21	24	4	47	51	4	2	6	11	70	81
5	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	5	36	41	17	61	78	7	7	14	29	104	133
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	2	25	27	9	40	49	5	2	7	16	67	83
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	5	36	41	23	70	93	12	8	20	40	114	154
8	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	5	24	29	13	38	51	4	1	5	22	63	85
9	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	3	33	36	9	58	67	3	2	5	15	93	108
10	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	6	25	31	8	49	57	6	4	10	20	78	98
11	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	3	24	27	7	34	41	4	2	6	14	60	74
12	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	4	17	21	18	45	63	4	4	8	26	66	92
13	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	4	30	34	13	35	48	8	9	17	25	74	99
	TOTAL	66	346	412	147	593	740	80	48	128	293	987	1280





Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dikes Kota Denpasar



Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dikes Kota Denpasar

2. Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan

Untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel di dibawah ini :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	680 m2	680 m2	-	-	-
2	alat penarik lainnya (dst)	1	1	-	-	-
3	Unit Pengolahan Air Kotor	4	4	-	-	-
4	alat pengolahan air kotor lainnya (dst)	1	1	-	-	-
5	Station Wagon	17	16	-	1	-
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	4	-	-	-
7	Pick Up	3	3	-	-	-
8	Sepeda Motor	36	32	1	3	-
9	Mobil Ambulance	3	1	-	2	-
10	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	1	-	-	-
11	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	4	4	-	-	-
12	Rak-Rak Penyimpan	11	10	-	1	-
13	Lemari Penyimpan	14	13	-	1	-
14	Mesin Penghitung Uang	2	2	-	-	-
15	Lemari Kayu	14	5	-	9	-
16	Rak Besi	9	8	-	1	-
17	Rak Kayu	30	20	4	6	-
18	Filing Cabinet Besi	29	16	13	-	-
19	Brandkas	2	-	1	1	-
20	CCTV - Camera Control Television System	16	16	-	-	-
21	Papan Visual/Papan Nama	94	93	-	1	-
22	White Board	6	6	-	-	-
23	Papan Pengumuman	28	28	-	-	-
24	Mesin Fogging	2	2	-	-	-
25	Alat Kantor Lainnya	4	4	-	-	-
26	Meja Kerja Kayu	4	3	1	-	-
27	Kursi Besi/Metal	85	85	-	-	-
28	Meja Rapat	14	14	-	-	-
29	Tempat Tidur Kayu	3	3	-	-	-
30	Meja Resepsionis	1	1	-	-	-
31	Meja 1/2 Biro	28	23	2	3	-
32	Kursi Rapat	155	155	-	-	-
33	Kursi Tamu	43	21	-	22	-
34	Kursi Putar	22	13	-	9	-
35	Sofa	5	5	-	-	-
36	Alat Pembersih lainnya	34	34	-	-	-
37	Lemari Es	2	2	-	-	-
38	A.C. Split	37	36	-	1	-



NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG
39	Kipas Angin	13	11	-	2	-
40	Cold Storage (Alat Pendingin)	10	10	-	-	-
41	Alat Pendingin lainnya	1	1	-	-	-
42	Rice Cooker (Alat Dapur)	3	3	-	-	-
43	Televisi	19	17	-	2	-
44	Sound System	1	1	-	-	-
45	Wireless	3	2	-	1	-
46	Microphone	2	2	-	-	-
47	Tangga Aluminium	1	1	-	-	-
48	Handy Cam	3	3	-	-	-
49	Gordyin/Kray	1	1	-	-	-
50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	125	48	-	77	-
51	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	1	-	-	-
52	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	19	19	-	-	-
53	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	1	-	-	-
54	Uninterruptible Power Supply (UPS)	43	43	-	-	-
55	peralatan studio audio lainnya (dst)	21	21	-	-	-
56	Video Equalizer Amplifier	1	1	-	-	-
57	Camera Film	3	3	-	-	-
58	Lensa Kamera	3	3	-	-	-
59	Layar Film/Projector	5	2	-	3	-
60	Camera Digital	2	2	-	-	-
61	Alat Studio Lainnya	1	1	-	-	-
62	Telephone (PABX)	3	1	-	2	-
63	Telephone Mobile	7	7	-	-	-
64	Facsimile	3	2	1	-	-
65	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	13	13	-	-	-
66	Alat Kedokteran umum lainnya	124	124	-	-	-
67	Contra Angel	1	1	-	-	-
68	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	10	10	-	-	-
69	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	43	43	-	-	-
70	alat kesehatan rehabilitasi medis lainnya (dst)	27	27	-	-	-
71	Alat Kedokteran lainnya	2	2	-	-	-
72	Tabung Gas Ho	1	1	-	-	-
73	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	11	11	-	-	-
74	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1	1	-	-	-
75	alat laboratorium lingkungan perairan	1	1	-	-	-
76	alat laboratorium biologi lainnya (dst)	1	1	-	-	-
77	Temperature Indicator	2	2	-	-	-
78	alat peraga praktek sekolah bidang studi :	2	2	-	-	-



NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG
79	alat kesehatan kerja lainnya (dst)	3	3	-	-	-
80	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	1	-	-	-
81	Komputer Jaringan lainnya	1	1	-	-	-
82	P.C Unit	102	86	-	16	-
83	Lap Top	61	46	-	15	-
84	Note Book	47	37	1	9	-
85	Hard Disk	5	5	-	-	-
86	peralatan mainframe lainnya (dst)	21	21	-	-	-
87	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	8	-	-	-
88	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1	-	-	-
89	Peralatan Personal Komputer lainnya	18	18	-	-	-
90	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	-	-
91	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	3	3	-	-	-
92	Instalasi Air Kotor Lain-lain	2	2	-	-	-
93	Buku Umum Lain-lain	17	17	-	-	-
94	Buku Ilmu Sosial (Hukum)	1	1	-	-	-
95	Aset Renovasi	6	6	-	-	-
TOTAL		1600	1388	24	188	

• **Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)**

Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya. Pelayanan Kesehatan primer merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk wilayah kerja puskesmas yang sehat dengan masyarakat yang :

- a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
- b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
- c. Hidup dalam lingkungan sehat, dan



- d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pada tahun 2024, Puskesmas di Kota Denpasar sebanyak 11 unit. Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1544/HK/2023, berdasarkan kemampuan pelayanan kesehatan, seluruh puskesmas di Kota Denpasar dikategorikan menjadi puskesmas non rawat inap. Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), dan pelayanan gawat darurat. Puskesmas dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling.

Tabel 2.3
Distribusi Puskesmas Berdasarkan Desa yang Diwilayahi

No.	Kecamatan	PUSKESMAS	Desa/ Kelurahan
1.	Denpasar Utara	Puskesmas I Denpasar Utara	1. Desa Dangin Puri Kaja 2. Desa Dangin Puri Kangin 3. Kel. Tonja 4. Desa dangin Puri Kauh
		Puskesmas II Denpasar Utara	1. Desa Pemecutan Kaja 2. Kel Ubung 3. Desa. Ubung Kaja
		Puskesmas III Denpasar Utara	1. Desa Dauh Puri Kaja 2. Kel Peguyangan 3. Desa Peguyangan Kaja 4. Desa Peguyangan Kangin
2.	Denpasar Timur	Puskesmas I Denpasar Timur	1. Kel. Dangin Puri 2. Ds. Dangin Puri Kelod 3. Kel. Sumerta 4. Desa Sumerta kelod 5. Desa Sumerta Kauh 6. Desa Sumerta Kaja
		Puskesmas II Denpasar Timur	1. Kel. Penatih 2. Desa Kesiman Kertalangu 3. Desa penatih Dangin Puri 4. Desa Kesiman Petilan 5. Kel Kesiman
3.	Denpasar Selatan	Puskesmas I Denpasar Selatan	1. Kel Seseetan 2. Desa Sidakarya 3. Kel Panjer
		Puskesmas II Denpasar Selatan	1. Kel Sanur 2. Kel Renon 3. Desa Sanur Kauh 4. Desa Sanur Kaja
		Puskesmas III Dnpasar Selatan	5. Desa Pemogan 6. Kel. Serangan
		Puskesmas IV Denpasar Selatan	• Kelurahan Pedungan
			1. Desa Padang sambian kelod 2. Desa Dauh Puri Kauh



4.	Denpasar Barat	Puskesmas Denpasar Barat I	3. Desa Dauh Puri Kangin 4. Desa Dauh Puri Kelod 1. Desa Dauh Puri 2. Desa Pemecutan Kelod
		Puskesmas II Denpasar Barat	1. Desa Padang sambian kaja 2. Desa Tegal Kertha 3. Desa Tegal Harum 4. Kel Padang sambian 5. Kel Pemecutan

Sumber: Sub Bag Perencanaan Data dan Pelaporan Dikes Kota Denpasar

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan Sehat.

Selain melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

Jumlah puskesmas tidak mengindikasikan secara langsung seberapa baik keberadaan puskesmas mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan primer di masyarakat. Indikator yang mampu menggambarkan secara kasar tercukupinya kebutuhan pelayanan kesehatan primer oleh puskesmas adalah rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk.

Akreditasi Puskesmas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, disebutkan bahwa Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi wajib terakreditasi. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditas yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh lembaga eksternal/independen terhadap hasil penilaian kesesuaian proses dengan standar yang berlaku (digunakan).

Untuk Puskesmas dan klinik pratama wajib dilakukan setiap tiga tahun sekali. Sedangkan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi wajib dilaksanakan 5 tahun sekali. Sampai dengan tahun 2024 seluruh puskesmas yang ada di Kota Denpasar telah terakreditasi. Untuk status akreditasi, semua puskesmas di Kota Denpasar telah paripurna.



Tabel 2.4

Status Akreditasi Puskesmas se-Kota Denpasar Tahun 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI
1	PUSKESMAS I DENPASAR UTARA	PARIPURNA
2	PUSKESMAS II DENPASAR UTARA	PARIPURNA
3	PUSKESMAS III DENPASAR UTARA	PARIPURNA
4	PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR	PARIPURNA
5	PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR	PARIPURNA
6	PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
7	PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
8	PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
9	PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
10	PUSKESMAS I DENPASAR BARAT	PARIPURNA
11	PUSKESMAS II DENPASAR BARAT	PARIPURNA

Sarana dan Prasarana di Puskesmas

Sarana dan prasarana puskesmas merupakan fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sarana meliputi bangunan, ruangan dan fasilitas fisik lainnya, sedangkan prasarana adalah peralatan medis dan non medis serta perlengkapan lain yang digunakan dalam pelayanan. Sarana prasarana tercatat di ASPAK (aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan). Berikut ini tabel kelengkapan ASPAK di Puskesmas.

Tabel 2.5

Kelengkapan Aspak Puskesmas Juli 2025

No.	Puskesmas				Lokasi	Kelengkapan			Kumulasi (50S+10P+40A)	
						Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan		
	Bali									
1	51710200004	III DENPASAR SELATAN	-	Kemkes	Kota Denpasar	64.29	40.74	75.67	66.49	
2	51710200002	I DENPASAR SELATAN	-	Kemkes	Kota Denpasar	61.9	42.59	70.56	63.44	
3	51710200005	I DENPASAR TIMUR	Ranap	Kemkes	Kota Denpasar	83.72	46.3	70.36	74.63	
4	51710200011	III DENPASAR UTARA	-	Kemkes	Kota Denpasar	80.95	44.44	67.96	72.1	
5	51710200009	I DENPASAR UTARA	-	Kemkes	Kota Denpasar	76.19	43.4	65.05	68.45	
6	51710200008	I DENPASAR BARAT	-	Kemkes	Kota Denpasar	71.43	46.15	62.32	65.26	
7	51710200001	IV DENPASAR SELATAN	Ranap	Kemkes	Kota Denpasar	83.72	47.27	57.37	69.54	
8	51710200010	II DENPASAR UTARA	-	Kemkes	Kota Denpasar	66.67	38.89	51.82	57.95	
9	51710200007	II DENPASAR BARAT	-	Kemkes	Kota Denpasar	90.48	53.49	42.03	67.4	
10	51710200006	II DENPASAR TIMUR	-	Kemkes	Kota Denpasar	69.05	48.15	35.44	53.51	
11	51710200003	II DENPASAR SELATAN	-	Kemkes	Kota Denpasar	90.48	43.48	21.17	58.05	



B. SUMBER DAYA RSUD Wangaya

Data Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Wangaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Jumlah Tenaga pada RSUD Wangaya
Tahun 2024

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEADAAN				KEKURANGAN	
		PPPK		PNS		PEGAWAI NON PNS	
		L	P	L	P	L	P
1	TENAGA MEDIS						
11	Dokter Umum	5	11	5	2	2	4
12	Dokter PPDS *)	0	0	0	0	0	0
13	Dokter Spes Bedah	1	0	4	1	0	0
14	Dokter Spes Penyakit Dalam	0	1	2	1	1	0
15	Dokter Spes Kes. Anak	1	1	3	0	0	2
16	Dokter Spes Obgin	0	0	6	1	0	0
17	Dokter Spes Radiologi	0	0	2	1	0	0
18	Dokter Spes Onkologi Radiasi	0	0	0	0	0	0
19	Dokter Spes Kedokteran Nuklir	0	0	0	0	0	0
110	Dokter Spes Anesthesi	1	0	2	1	0	0
111	Dokter Spes Patologi Klinik	0	1	0	0	0	0
112	Dokter Spes Jiwa	1	0	0	1	0	0
113	Dokter Spes Mata	0	0	0	1	0	1
114	Dokter Spes THT	0	2	1	0	1	1
115	Dokter Spes Kulit & Kelamin / Sp. DV	0	0	1	1	0	1
116	Dokter Spes Kardiologi / Jantung & PB	1	0	0	1	1	0
117	Dokter Spes Paru	0	1	1	0	0	1
118	Dokter Spes Saraf	0	1	1	1	1	0
119	Dokter Spes Bedah Saraf	0	0	0	0	0	0
120	Dokter Spes Orthopedi	2	0	1	0	1	0
121	Dokter Spes Urologi	0	0	2	0	0	1
122	Dokter Spes Patologi Anatomi	0	0	1	0	0	1
123	Dokter Spes Patologi Forensik	0	0	0	0	0	0
124	Dokter Spes Rehabilitasi Medik	1	0	0	0	0	0
125	Dokter Spes Bedah Plastik	0	0	0	0	1	0
126	Dokter Spes Ked. Olah Raga	0	0	0	0	0	0



127	Dokter Spes Mikrobiologi Klinik	1	0	0	0	1	0
128	Dokter Spes Parasitologi Klinik	0	0	0	0	0	0
129	Dokter Spes Gizi Medik	0	0	0	0	0	0
130	Dokter Spes Farma Klinik	0	0	0	0	0	0
131	Dokter Spes Lainnya	0	0	0	0	0	0
132	Dokter Sub Spesialis Lainnya	0	0	0	0	0	0
133	Dokter Gigi	0	0	0	2	0	0
134	Dokter Gigi Spesialis	0	0	1	1	0	0
166	Dokter/Dokter Gigi MHA/MARS/MKES/MPH (**)	0	0	1	1	0	0
177	Dokter/Dokter Gigi S2/S3 Kes Masy (**)	0	0	0	0	0	0
188	S3 (Dokter Konsultan) (***) Sp.Anak,Sp.Kesehatan Jiwa,Sp.Penyakit dalam	0	0	3	0	0	0
199	Total (1.00-1.88)	14	18	37	16	9	12
2	TENAGA KEPERAWATAN						
21	S3 Keperawatan	0	0	0	0	0	0
22	S2 Keperawatan	0	0	0	1	0	0
23	S1 Keperawatan	22	55	7	72	11	24
24	D4 / D3 Keperawatan	26	62	15	44	15	16
25	Perawat Vokasional	0	0	0	0	0	0
26	Perawat Spesialis	0	0	0	0	0	0
27	Pembantu Keperawatan	0	0	0	0	0	0
28	S3 Kebidanan	0	0	0	0	0	0
29	S2 Kebidanan	0	0	0	0	0	0
210	S1 Kebidanan / D4 Kebidanan	0	1	0	24	0	1
211	D3 Kebidanan	0	39	0	24	0	9
288	Tenaga Keperawatan Lainnya	0	0	0	2	0	0
299	Total (2.00-2.88)	48	157	22	167	26	50
3	KEFARMASIAN						
31	S3 Farmasi / Apoteker	0	0	0	0	0	0
32	S2 Farmasi / Apoteker	0	0	0	0	0	0
33	Apoteker	2	3	2	4	0	2
34	S1 Farmasi / Farmakologi Kimia	3	4	0	0	0	0
35	D3 Farmasi	0	0	0	0	0	2
36	AKFAR (**)	0	0	7	10	0	0
37	Analisis Farmasi	0	0	0	0	0	0
38	Asisten Apoteker / SMF	0	0	0	0	0	0
39	ST Lab Kimia Farmasi	0	0	0	0	0	0



388	Tenaga Kefarmasian Lainnya	0	0	0	0	0	0
399	Total (3.00-3.88)	5	7	9	14	0	4
4	KESEHATAN MASYARAKAT						
41	S3 - Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0	0
42	S3 - Epidemiologi	0	0	0	0	0	0
43	S3 - Psikologi	0	0	0	0	0	0
44	S2 - Kesehatan Masyarakat	0	0	1	2	0	0
45	S2 - Epidemiologi	0	0	0	0	0	0
46	S2 - Biomedik	0	0	0	0	0	0
47	S2 - Psikologi	0	0	0	0	0	0
48	S1 - Kesehatan Masyarakat	0	0	2	1	2	6
49	S1 - Psikologi	0	0	0	1	0	3
410	D3 - Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0	0
411	D3 - Sanitarian	0	1	0	1	0	0
412	D4 - Sanitarian	0	0	0	0	1	0
488	Tenaga Kesehatan Masy. Lainnya	0	0	0	0	0	4
499	Total (4.00-4.88)	0	1	3	5	3	13
5	GIZI						
51	S3 - Gizi / Dietisien	0	0	0	0	0	0
52	S2 - Gizi / Dietisien	0	0	0	0	0	0
53	S1 - Gizi / Dietisien	0	0	0	1	1	0
54	D4 - Gizi / Dietisien	0	0	1	9	0	3
55	D3 - Gizi	1	2	1	5	0	2
56	D1 - Gizi / Dietisien	0	0	0	0	0	0
588	Tenaga Gizi Lainnya	0	0	0	1	0	0
599	Total (5.00-5.88)	1	2	2	16	1	5
6	KETERAPIAN FISIK						
61	S1 Fisio Terapis	1	2	0	0	4	3
62	D3 Fisio Terapis	0	0	1	0	0	0
63	D3 Okupasi Terapis	0	0	0	0	0	0
64	D3 Terapi wicara	1	0	0	0	0	0
65	D3 Orthopedi	0	0	0	0	0	0
66	D3 Akupuntur	0	0	0	0	0	0
688	Tenaga Keterampilan Fisik Lainnya	0	0	0	0	0	0
699	Total (6.00-6.88)	2	2	1	0	4	3
7	KETEKNISIAN MEDIS						
71	S3 Opto Elektronika & Apl Laser	0	0	0	0	0	0



72	S2 Opto Elektronika & Apl Laser	0	0	0	0	0	0
73	D3 Radiografer	2	0	1	0	3	0
74	Radioterapis (Non Dokter)	0	0	0	0	0	0
75	D4 Fisika Medik	0	0	0	0	0	0
76	D3 Teknik Gigi	0	0	1	0	1	2
77	D3 / D4 Teknik Radiologi & Radioterapi	0	0	4	4	0	0
78	D3 Refraksionis Optisien	0	0	0	0	0	0
79	S 1 Perekam Medis	1	1	3	1	0	0
710	D3 Teknik Elektromedik	0	0	1	0	0	0
711	D3 Analisis Kesehatan/ Teknologi Lab Medis	2	5	2	11	0	2
712	D3 Informasi Kesehatan	0	0	0	0	0	0
713	D3 Kardiovaskular	0	0	0	0	0	0
714	D3 Orthotik Prostetik	0	0	0	0	0	0
715	D1 Teknik Tranfusi	0	0	0	0	0	0
716	Teknisi Gigi	0	0	0	0	0	0
717	Tenaga IT dengan Teknologi Nano	0	0	0	0	0	0
718	Teknisi Patologi Anatomi	0	0	0	0	0	0
719	Teknisi Kardiovaskuler	0	0	0	0	0	0
720	Teknisi Elektromedis	0	0	0	0	0	0
721	D3 Rekam Medis dan Informasi	0	0	0	0	0	1
722	D3 Analisis Kesehatan	0	0	0	0	2	1
788	Tenaga Keterampilan fisik Lainnya	0	0	0	0	0	0
799	Total (7.00-7.88)	5	6	12	16	6	6
II	TENAGA NON KESEHATAN						
8	DOKTORAL						
81	S3 Biologi	0	0	0	0	0	0
82	S3 Kimia	0	0	0	0	0	0
83	S3 Ekonomi / Akuntansi	0	0	0	0	0	0
84	S3 Administrasi	0	0	0	0	0	0
85	S3 Hukum	0	0	0	0	0	0
86	S3 Teknik	0	0	0	0	0	0
87	S3 Kes. Sosial	0	0	0	0	0	0
88	S3 Fisika	0	0	0	0	0	0
89	S3 Komputer	0	0	0	0	0	0
810	S3 Statistik	0	0	0	0	0	0
888	Doktoral Lainnya (S3)	0	0	0	0	0	0
899	Total (8.00 - 8.88)	0	0	0	0	0	0



9	PASCA SARJANA					0	0
91	S2 Biologi	0	0	0	0	0	0
92	S2 Kimia	0	0	0	0	0	0
93	S2 Ekonomi / Akuntansi	0	0	0	0	0	0
94	S2 Administrasi	0	0	2	1	0	0
95	S2 Hukum	0	0	0	0	0	0
96	S2 Teknik	0	0	2	0	0	0
97	S2 Kesejahteraan Sosial	0	0	0	0	0	0
98	S2 Fisika	0	0	0	0	0	0
99	S2 Komputer	0	0	0	0	0	0
910	S2 Statistik	0	0	0	0	0	0
911	S2 Administrasi Kes. Masy	0	0	0	0	0	0
988	Pasca Sarjana Lainnya (S2)	0	0	2	6	0	0
999	Total (9.00 - 9.99)	0	0	6	7	0	0
10	SARJANA						
101	Sarjana Biologi	0	0	0	1	0	0
102	Sarjana Kimia	0	0	0	0	0	0
103	Sarjana Ekonomi / Akuntansi/ Manajemen	1	1	3	14	34	47
104	Sarjana Administrasi	0	0	0	0	0	0
105	Sarjana Hukum	0	0	3	1	5	6
106	Sarjana Teknik	0	0	1	1	2	2
107	Sarjana Sosial	0	0	0	0	4	3
108	Sarjana Fisika	0	0	0	0	0	0
109	Sarjana Komputer / Ilmu Komunikasi	0	0	0	0	8	2
1010	Sarjana Statistik	0	0	0	0	0	0
1088	Sarjana Lainnya (S1)	0	0	7	23	2	9
1099	Total (10.00-10.88)	1	1	14	40	55	69
11	SARJANA MUDA						
111	Sarjana Muda Biologi	0	0	0	0	0	0
112	Sarjana Muda Kimia	0	0	0	0	0	0
113	Sarjana Muda Ekonomi / Akuntansi	0	0	1	1	0	0
114	Sarjana Muda Administrasi	0	0	0	1	0	0
115	Sarjana Muda Hukum	0	0	0	0	0	0
116	Sarjana Muda Teknik	0	0	0	0	1	0
117	Sarjana Muda Kes. Sosial	0	0	0	0	0	0
118	Sarjana Muda Statistik	0	0	0	0	0	0
119	Sarjana Muda Komputer	0	0	0	0	0	0



1110	Sarjana Muda Sekretaris	0	0	0	1	0	0
1188	Sarjana Muda / D3 Lainnya / D I / D II Lainnya	0	0	0	2	5	8
1199	Total (11.00-11.88)	0	0	1	5	6	8
12	SMU SEDERAJAT DAN DIBAWAHNYA						
121	SMA / SMU / SMK	0	0	10	13	53	30
122	SMEA	0	0	4	10	0	1
123	STM	0	0	2	0	1	0
124	SMKK	0	0	0	1	0	1
125	SPSA	0	0	0	0	0	0
126	SMP	0	0	0	1	34	21
127	SD dibawah	0	0	1	0	0	3
1288	SMTA Lainnya	0	0	1	5	0	0
1299	Total (12.00-12.88)	0	0	18	30	88	56
	Grand Total (1.99-12.99)	76	194	125	316	198	226
	Jml Keseluruhan	270		441		424	

Sarana dan Prasarana RSUD Wangaya

Sarana dan Prasarana

1. Luas Tanah

: 23.271,00 m²
2. Luas bangunan

: 21.564,06 m²
3. Listrik

: PLN dan Genset
4. Air

: PDAM dan Sumur Dalam
5. Komunikasi/Telpon

: (0361) 222141, 222142, 222487, 235637, 235919, 234532, 235911, 235775, 235818.
6. Faximile

: (0361) 224114
7. Web site

: <http://rsudwangaya.denasarkota.go.id>
8. E – mail

: rsudwangaya.dpskota@gmail.com
9. Limbah

: Untuk pengolahan limbah, RS memiliki IPAL dan Incenerator
- 10.Kendaraan :

Ambulance 	=	4 unit	Tahun Kendaraan	2012	- 1 unit
				2015	- 1 unit
				2016	- 1 unit
				2019	- 1 unit
					-
Roda 4 	=	8 unit	Tahun Kendaraan	1993	- 1 unit
				2009	- 1 unit
				2010	- 1 unit
				2011	- 4 unit
				2022	- 1 unit



Roda 2		=	9 unit	Tahun perolehan	2000	-	1 unit
					2002	-	1 unit
					2003	-	2 unit
					2007	-	2 unit
					2014	-	1 unit
					2018	-	1 unit (KTM Moci)
					2019	-	1 unit

Jenis Pelayanan di RSUD Wangaya Kota Denpasar terdiri dari pelayanan dan sub pelayanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Bedah
 - a. Bedah Umum
 - b. Orthopedi
 - c. Urologi
 - d. Bedah Digestive
- b. Pelayanan Kesehatan Anak
 - a. Pediatri Gawat Darurat
 - b. Endokrin Anak dan Remaja
- c. Pelayanan Penyakit Dalam (Interna)
 - 2.2 Hemodialisis
 - 2.3 Endoscopy
 - 2.4 VCT
 - 2.5 Endokrinologi Metabolik dan Diabetes
- d. Pelayanan Gigi
 - 2.5.1.2.1 Bedah Mulut
 - 2.5.1.2.2 Ortodonti
 - 2.5.1.2.3 Gigi
- e. Pelayanan Laboratorium
 - 2.5.1.2.3.1.1.1 Patologi Klinik
 - 2.5.1.2.3.1.1.2 Patologi Anatomi
 - 2.5.1.2.3.1.1.3 Mikrobiologi Klinik
- f. Pelayanan Jantung
- g. Pelayanan Kesehatan Jiwa (Psikiatri)
- h. Pelayanan Kulit dan Kelamin
- i. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan
 - 1. Subspesialis Fertilitas dan Endokrinologi
 - 2. Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial
- j. Pelayanan Telinga, Hidung dan Tenggorokan
- k. Pelayanan Mata
- l. Pelayanan Saraf (Neurologi)
- m. Pelayanan Anestesi
 - Konsultan Manajemen Nyeri
- n. Pelayanan Radiologi
- o. Pelayanan Penyakit Paru
 - TB-DOTS
 - Bronchoscopy



- p. Pelayanan Rehabilitasi Medik
- q. Pelayanan Gawat Darurat
- r. Pelayanan Fisioterapi
- s. Pelayanan Gizi
- t. Pelayanan Farmasi

Kegiatan pelayanan dan sub. pelayanan di RSUD Wangaya Kota Denpasar dilaksanakan di Instalasi :

- a. Instalasi Rawat Jalan
- b. Instalasi Rawat Inap
- c. Instalasi Rawat Intensif Terpadu (terdiri dari : NICU, PICU, ICU, ICCU, HCU)
- d. Instalasi Gawat Darurat
- e. Instalasi Bedah Sentral
- f. Instalasi Rehabilitasi Medik
- g. Instalasi Pemulasaraan Jenasah
- h. Instalasi Rekam Medis
- i. Instalasi Radiologi
- j. Instalasi Laboratorium Klinik
- k. Instalasi Farmasi
- l. Instalasi Gizi
- m. Instalasi *Central Sterile Supply Department (CSSD)*
- n. Instalasi Binatu/Laundry
- o. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)
- p. Instalasi Elektro Data Prossessing/SIMRS
- q. Instalasi Anastesiologi
- r. Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
- s. Instalasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- t. Ruangan
 - 1. Ruang Angsa
 - 2. Ruang Belibis
 - 3. Ruang Cenderawasih
 - 4. Ruang Dara
 - 5. Ruang Elang / Perina
 - 6. Ruang Merak
 - 7. Ruang Kaswari
 - 8. Ruang ICU,PICU,NICU,ICCU,HCU
 - 9. Ruang Paviliun Praja Amertha

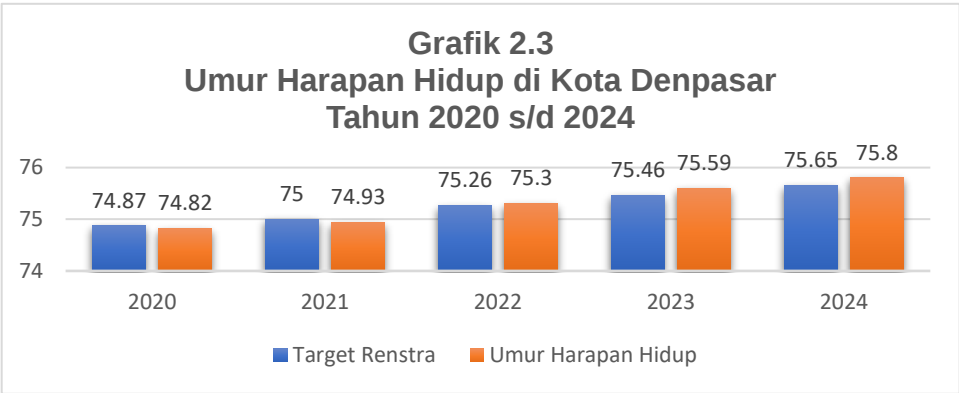


2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020-2024

Dinas Kesehatan Kota Denpasar merupakan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mempunyai fungsi untuk merumuskan kebijakan kesehatan, meyelenggarakan pelayanan kesehatan, melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kesehatan, promosi kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan. Berikut ini adalah capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 :

1 Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. UHH juga bisa diartikan sebagai rata-rata kesempatan hidup yang tersisa. UHH merupakan salah satu indikator kesehatan masyarakat. Besar kecilnya UHH suatu generasi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mampu melewati umur tertentu. Cara menghitung UHH secara ideal adalah dengan menggunakan Angka Kematian Menurut Umur (ASDR). Namun, di Indonesia, UHH dihitung dengan cara tidak langsung. Berikut ini capaian Umur Harapan Hidup di Kota Denpasar tahun 2020 sampai dengan 2024 sesuai tabel dibawah ini :



Sumber : BPS Kota Denpasar

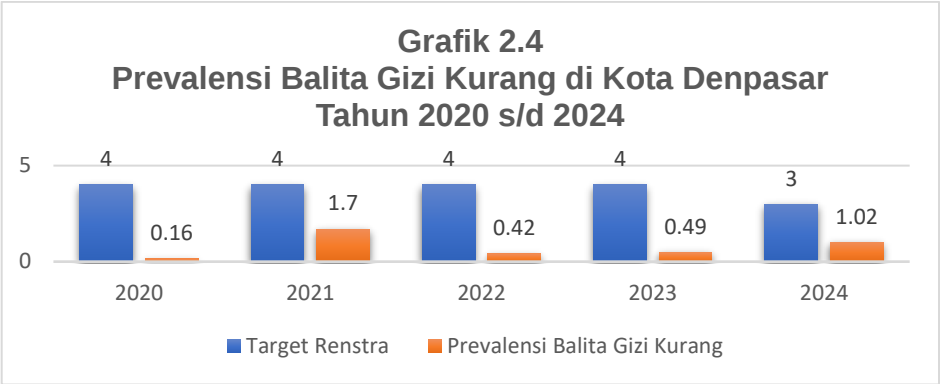
Pada grafik diatas terlihat dalam lima tahun terakhir umur harapan hidup dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan secara signifikan hal ini dimungkinkan karena meningkatnya status kesehatan masyarakat secara umum, tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan akses yang cukup merata di wilayah Kota Denpasar.

2 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang pada balita mengacu pada kondisi berat badan yang kurang dibandingkan dengan standar usia dan tinggi badan, yang menunjukkan adanya kekurangan gizi kronis. Beberapa factor yang dapat menyebabkan gizi kurang pada balita antara lain adalah kurangnya asupan makanan bergizi, infeksi berulang serta faktor social ekonomi keluarga. Prevalensi balita gizi kurang di Kota Denpasar



selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Pada grafik diatas prevalensi balita gizi kurang di Kota Denpasar dari tahun 2020-2024 menunjukan capain sudah baik karena dibawah target renstra. Walaupun hasil setiap tahunnya masih fluktuatif. Ini disebabkan sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah gizi kurang pada balita termasuk pemberian makanan tambahan, penyuluhan gizi serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan.

3. Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek) anak 0-5 tahun

Prevalensi stunting merupakan persentase balita umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Prevalensi stunting di Kota Denpasar selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar

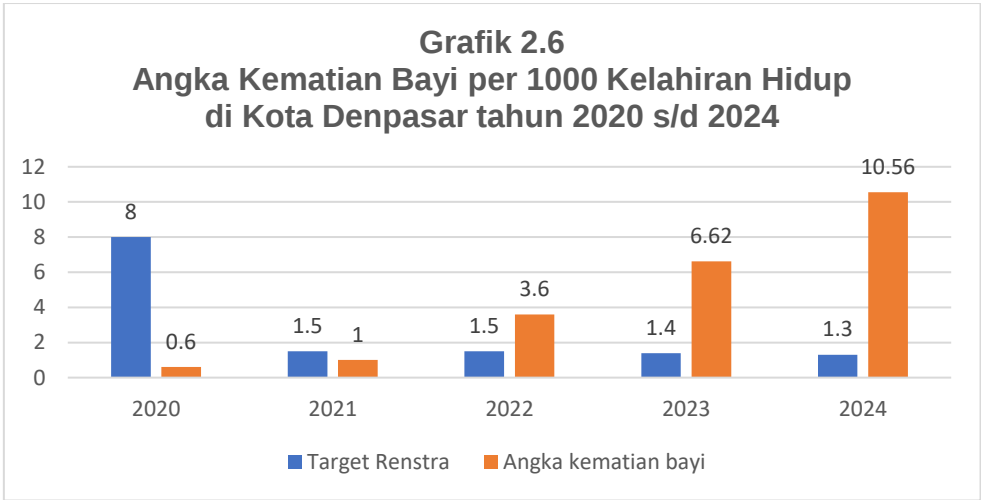
4. Angka Kematian Bayi

Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu daerah disebut Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.



Beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di bawah ini.



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2024 sebesar 10,56 per 1.000 KH, meningkat dari tahun 2023 sebesar 6,62 per 1.000 Kelahiran Hidup. Peningkatan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar disebabkan karena kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil (kondisi perinatal).

Kendala yang terjadi adalah kurangnya data kesehatan ibu bayi yang diperoleh saat Audit Kematian Bayi yang menjadi pencetus kematian bayi sehingga menjadi kendala dalam pengkajian kasus.

Untuk mencapai target Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim AMPSR Kota Denpasar
- b. Orientasi AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon
- c. Orientasi E-Kohort
- d. Orientasi MPDN (Maternal Perinatal Death Notification)
- e. Pertemuan AMP (Audit Maternal Perinatal)
- f. Melakukan skrining layak hamil pada pasangan pra konsepsi
- g. Melakukan Pendampingan oleh Dokter Spesialis Kandungan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil kepada dokter puskesmas untuk penggunaan USG terbatas



- h. Melakukan penyegaran kompetensi dokter layanan primer dalam pemberian pemeriksaan ANC
- i. Dinas Kesehatan Kota Denpasar Bekerja sama dengan Dinas Kominfo dalam membentuk dan mengembangkan Sistem Informasi Ramah Ibu dan Anak (SIRIA) dalam upaya pemenuhan layanan SPM dan mengefektifkan sistem pencatatan dan pelaporan secara cepat dan efisien dan mudah di akses oleh pemberi layanan baik fasilitas kesehatan maupun kader kesehatan di masyarakat.

Kematian bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencantumkan target kematian bayi tahun 2024 sebesar 1,3 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar (10,56/1000 Kelahiran Hidup) capaian ini berada diatas target yang ditetapkan. Terjadinya peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar terjadi karena mobilisasi penduduk sangat tinggi dan pelaporan kematian bayi melalui aplikasi *Maternal Perinatal Death Notificatin (MPDN)* berdasarkan lama tinggal dan memperoleh pelayanan kesehatan minimal enam bulan. Adapun penyebab kematian bayi di Kota Denpasar tahun 2024 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2024

No	Penyebab Kematian	Jumlah
1	Berat badan lahir rendah (BBLR)	12 orang
2	Asfiksia	4 orang
3	Infeksi	20 orang
4	Kelainan kongenital	8 orang
5	Kelainan cardiovascular dan respiratori	34 orang
6	Lain-Lain	21 orang
7	Kondisi Perinatal	5 orang
8	Pneumonia	13 orang
9	Kelainan Kongenital Jantung	1 orang

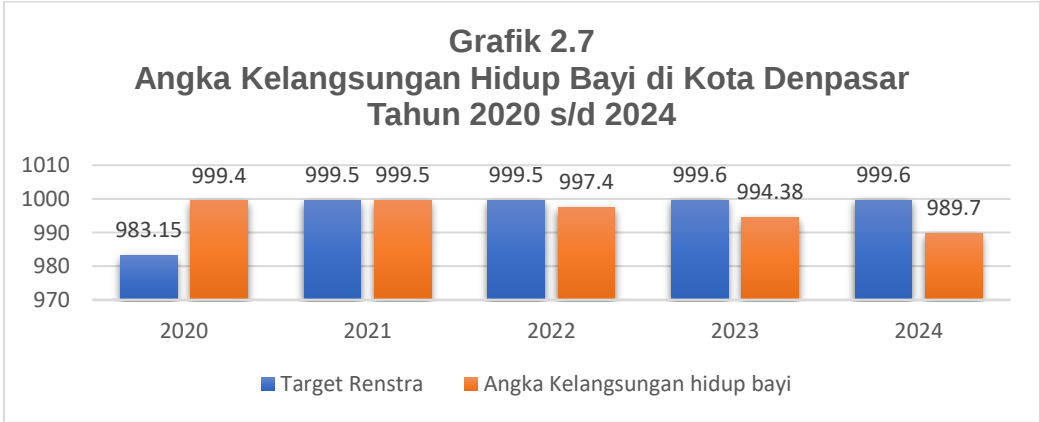
10	Kelainan Kongenital Lainnya	1 orang
11	Penyakit Saraf	1 orang
	TOTAL	120 orang

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi terbagi dalam beberapa upaya antara lain ntuk mencegah kematian bayi akibat infeksi maka upaya yang dilakukan adalah imunisasi TT pada ibu hamil, persalinan yang bersih, perawatan mata, ASI dini dan eksklusif serta pemberian antibiotika, untuk penyebab kematian karena asfiksia dan trauma kelahiran dilakukan upaya berupa resusitasi dan penghangatan dan untuk mencegah kematian bayi karena kelainan kongenital dilakukan upaya yang meliputi terapi spilis bagi WUS penderita spilis dan suplementasi folat pada ibu hamil serta peningkatan KIE pada ibu hamil.

5. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi merupakan probabilitas bahwa bayi yang lahir hidup akan bertahan hidup hingga usia satu tahun, dinyatakan dalam angka per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan indikator penting kesehatan ibu dan anak. Secara sistematis angka kelangsungan hidup bayi dihitung dengan 1 dikurangi angka kematian bayi. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi dibawah usia satu tahun dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi di Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Pada grafik diatas menunjukana AKHB di tahun 2020 dan 2021 sudah sangat tinggi tapi dari tahun 2022 hingga 2024 AKHB mengalami penurunan. Ini mengindikasikan adanya masalah dalam pelayanan kesehatan, sanitasi, gizi dan faktor-faktor sosial ekonomi.



6. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan kejadian kematian pada fase antara kelahiran sampai sebelum umur 5 tahun. Angka kematian balita di Kota Denpasar tahun 2024 sebesar 11,97 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini berada diatas target renstra Dinas Kesehatan tahun 2024 (1,3 per 1000 kelahiran hidup). Tren angka kematian balita dari tahun 2020-2024 di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan. Tren angka kematian balita dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Upaya –upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian balita di Kota Denpasar meliputi audit kematian maternal dan perinatal, serta pembinaan/ bimtek PWS KIA, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita di tiap puskesmas, serta melaksanakan promosi kesehatan di masyarakat.

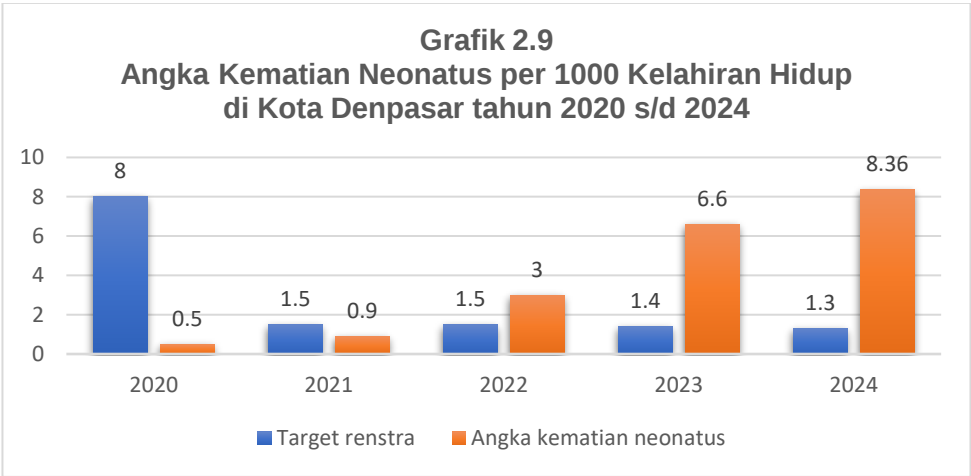
7. Angka Kematian Neonatal

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal.

Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8- 28 hari.

Angka kematian neonatal di Kota Denpasar tahun 2024 adalah sebesar 8,36 per 1000 Kelahiran Hidup, terdapat 95 kematian neonatal yang terdiri dari 52 laki – laki dan 43 perempuan. Penyebab kematian neonatal adalah 12 orang

karena BBLR dan prematuritas, asfiksia 4 orang, infeksi 20 orang, kelainan kongenital 8 orang, kelainan cardiovascular dan respiratori 34 orang, dan penyebab lain-lain 17 orang. Hal ini mengindikasikan kesehatan ibu pada saat hamil sangat berperan dalam perkembangan kesehatan janin. Untuk tahun-tahun selanjutnya perlu ditingkatkan cakupan penemuan dan penanganan ibu hamil dengan komplikasi sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Angka kematian neonatus per 1000 kelahiran hidup di Kota Denpasar dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

8. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan yang mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan pengertian dari semua pihak mengenai pentingnya dan peran berbagai aspek dalam penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya harus merupakan integrasi menyeluruh bagi semua pihak. Angka kematian ibu maternal berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu maternal di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Pada grafik diatas terlihat bahwa angka kematian ibu tahun 2024 meningkat dari tahun 2023. Angka kematian ibu tahun 2024 sebesar 123,23 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 (56 per 100.000 KH). Peningkatan angka kematian ibu di kota Denpasar ditunjang dengan adanya sistem pencatatan dan pelaporan kasus kematian ibu dengan aplikasi MPDN, yang memungkinkan semua fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan kasus kematian baik yang ber-KTP Denpasar yang mendapat pelayanan kesehatan di dalam dan di luar kota Denpasar maupun yang tidak ber-KTP Denpasar yang berdomisili di Kota Denpasar dan mendapat pelayanan kesehatan. Permasalahan yang terjadi adalah kurang optimalnya skrining penyakit penyerta pada ibu hamil. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Denpasar meliputi antara lain pemantapan pelaksanaan P4K untuk bidan puskesmas dan bidan pustu, pelacakan kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan KB, meningkatkan cakupan dan kualitas ANC, meningkatkan sarana dan sumberdaya manusia yang memadai di fasilitas kesehatan. Mengoptimalkan PWS KIA, kelas ibu hamil, peningkatan KIE dan deteksi resiko tinggi penyakit pada WUS untuk mencegah kasus komplikasi pada ibu hamil.

Selama tahun 2024 di Kota Denpasar terjadi 14 kematian ibu dari 11.361 kelahiran hidup yang terdiri dari 8 orang kematian ibu hamil dan 6 orang kematian ibu nifas. Kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh karena pendarahan 2 orang, hipertensi 3 orang, 4 orang kelainan jantung dan pembuluh darah, 3 orang gangguan autoimun dan 2 orang penyebab lain-lain yaitu karena Ca mammae dan DBD.

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah

selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama-sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dapat ditekan.

Deteksi dini faktor risiko kepada calon ibu sangat penting dilakukan sehingga kehamilan dapat direncanakan pada kondisi kesehatan ibu yang cukup baik. Demikian pula saat kehamilan hendaknya melakukan pemeriksaan sedini mungkin (kontak ke tenaga kesehatan pada usia kehamilan < 12 minggu) maka deteksi dini masalah/penyakit yang diderita ibu dapat dilakukan melalui antenatal terpadu bekerjasama dengan lintas program dan pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter umum serta pemeriksaan penunjang laboratorium sesuai dengan standar. Skrining kehamilan dengan USG dasar terbatas dilakukan oleh dokter umum di fasilitas kesehatan dasar merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi secara dini masalah sehingga penanganan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat.

Kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan deteksi secara dini adanya faktor risiko baik melalui pemeriksaan fisik maupun penunjang seperti laboratorium sesuai standar harus dipenuhi sehingga setiap ibu hamil akan mendapatkan pelayanan sesuai standar yang merupakan haknya, termasuk juga kemampuan penanganan kegawatdaruratan obstetri baik pada penanganan awal maupun lanjutan.

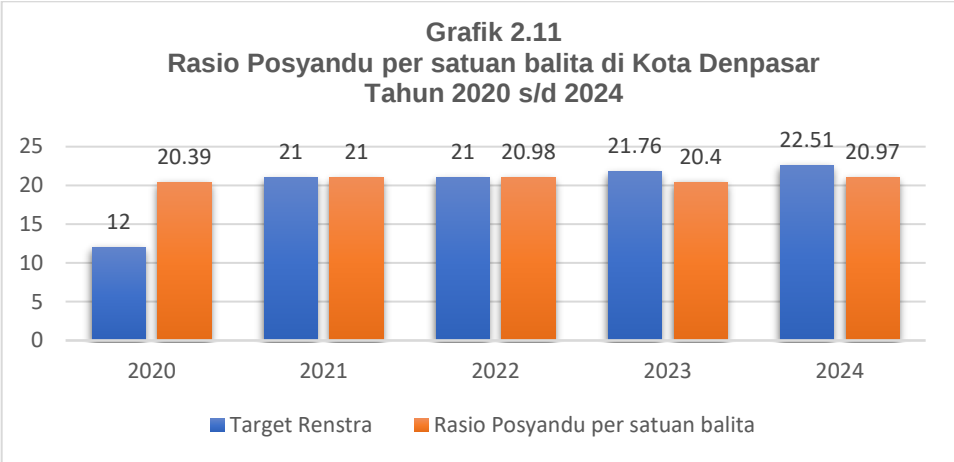
Peran dokter umum di dalam pelayanan kesehatan ibu juga sangat penting untuk melakukan deteksi dan intervensi terhadap masalah-masalah terkait kesehatan pada ibu hamil.

Kedepannya perlu terus digalakkan upaya-upaya untuk menekan kematian ibu di Kota Denpasar dengan meningkatkan PWS ibu, meningkatkan surveilans terhadap ibu hamil dan peningkatan cakupan penanganan ibu dengan komplikasi.

9. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita di suatu wilayah. Biasanya dinyatakan dalam rasio per 1000 balita. Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan dan pemerataan layanan kesehatan di posyandu, khususnya untuk balita. Rasio posyandu per satuan balita di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :





Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

10. Rasio Puskesmas

Rasio puskesmas adalah perbandingan antara jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam satuan per 1000 penduduk atau per kecamatan



Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Kota Denpasar

11. Rasio Puskesmas Pembantu

Rasio puskesmas pembantu merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah puskesmas pembantu (Pustu) dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan pemerataan

Rasio puskesmas pembantu di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

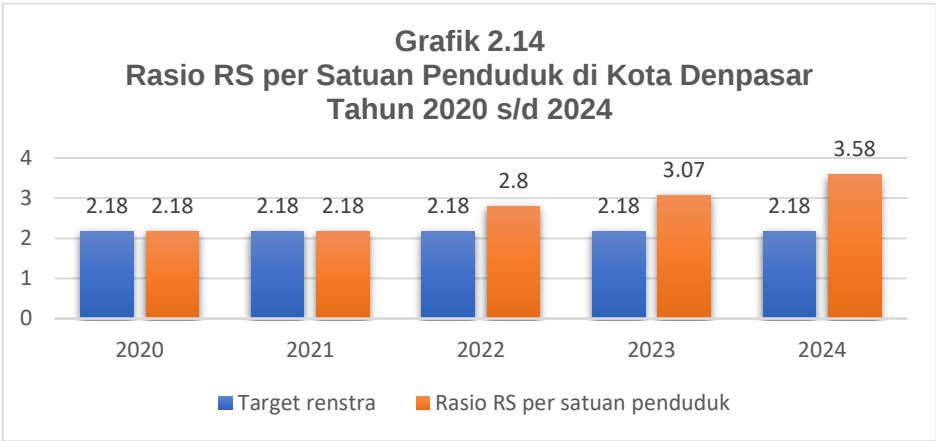




Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Kota Denpasar

12. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah rumah sakit yang tersedia dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Rasio rumah sakit di Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

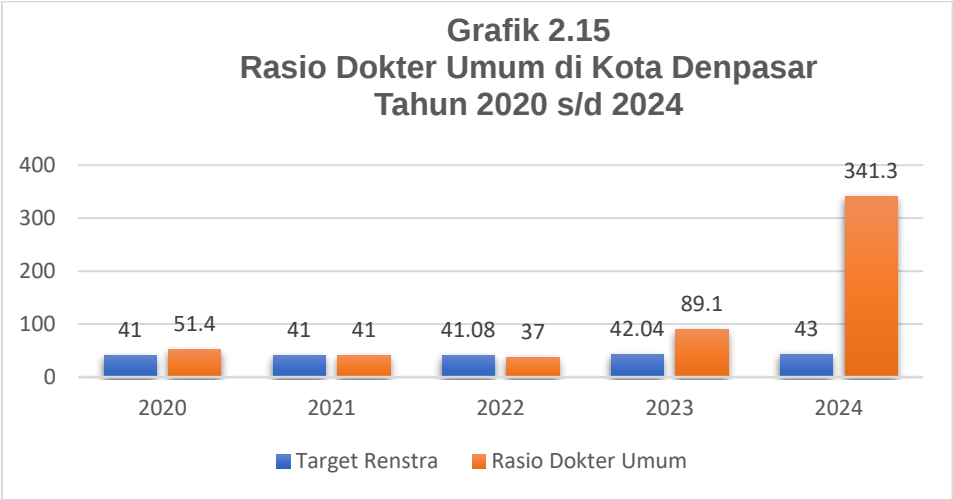


Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Kota Denpasar

13. Rasio Dokter Umum

Rasio dokter umum merupakan perbandingan antara jumlah dokter umum yang tersedia dengan jumlah penduduk biasanya dinyatakan per 100.000 penduduk. Rasio ini penting untuk mengukur ketersediaan layanan primer dan kesejahteraan masyarakat. Rasio dokter umum di Kota Denpasar selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

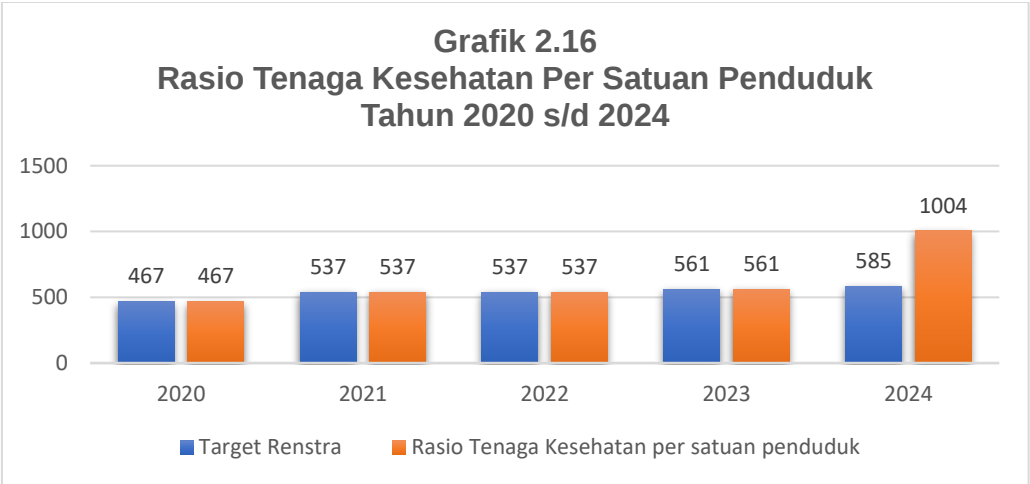




Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan Dikes Kota Denpasar

14. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga kesehatan di Kota Denpasar dihitung berdasarkan jumlah tenaga yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dibagi dengan estimasi jumlah penduduk. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk berfungsi untuk mengetahui ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Denpasar. Rasio tenaga kesehatan selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan Dikes Kota Denpasar

15. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan

Komplikasi kebidanan adalah keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Komplikasi kebidanan antara lain ketuban pecah dini, perdarahan per vagina, hipertensi dalam kehamilan (sistole > 140 mm Hg, diastole > 90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan premature, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju), dan infeksi masa nifas (Depkes, 2010).

Jumlah ibu hamil dengan komplikasi diprediksi sebesar 20% dari seluruh sasaran ibu hamil. Jumlah seluruh ibu hamil di Kota Denpasar tahun 2024 sebesar 10.991 orang, sehingga jumlah bumil risti/komplikasinya diprediksi sebesar 2.198



orang. Selama periode tahun 2024 ditemukan ibu hamil dengan komplikasi sebesar 2.484 orang dan seluruhnya sudah ditangani. Hasil penanganan ibu hamil dengan komplikasi ini dibandingkan dengan target maka pencapaian Kota di Denpasar sebesar 113%. Renstra Dikes Kota Denpasar menetapkan 90% ibu hamil dengan resti/komplikasi di tahun 2024 harus tertangani, dan target ini sudah tercapai. Cakupan komplikasi kebidanan ditangani di Kota Denpasar tahun 2020 sd 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Komplikasi kebidanan di Kota Denpasar paling besar disebabkan karena anemia sebanyak 882 kasus diikuti oleh Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 688 kasus. Penyebab komplikasi kebidanan terendah disebabkan karena jantung (6 kasus).

Komplikasi dapat dicegah dan ditangani bila :

1. Ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan
2. Tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan persalinan, dan pelaksanaan manajemen aktif kala III (MAK III) untuk mencegah perdarahan pasca salin
3. Tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini komplikasi
4. Apabila komplikasi terjadi tenaga kesehatan dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan
5. Proses rujukan efektif
6. Pelayanan di RS yang cepat dan tepat guna. (Kemenkes RI, 2015)

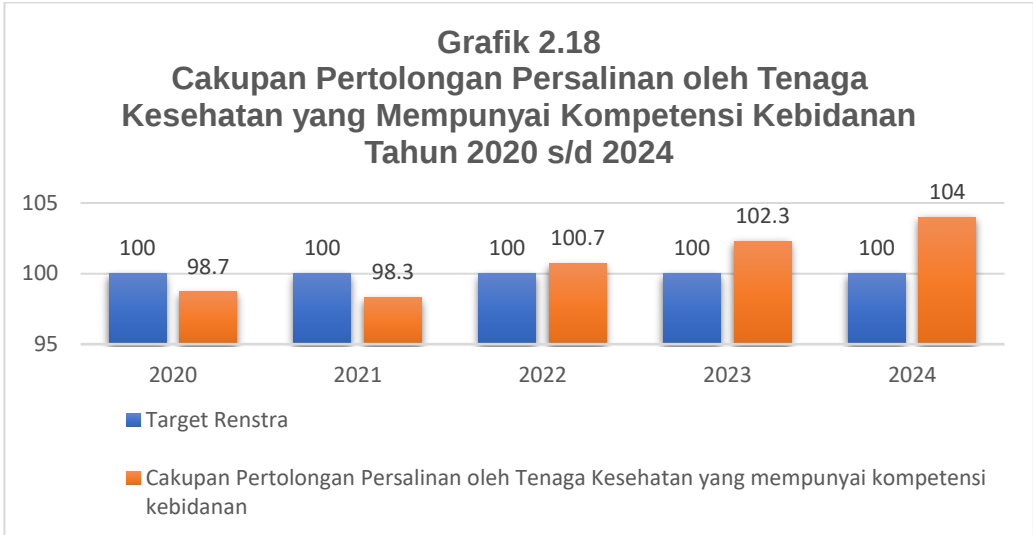
Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) merupakan salah satu terobosan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Program ini menitikberatkan pada kepedulian dan peran keluarga dan masyarakat dalam melakukan upaya deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil serta menyediakan akses dan pelayanan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal dasar di tingkat puskesmas (PONED). Dalam



implementasinya P4K merupakan salah satu unsur dari desa siaga. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar menargetkan pada tahun 2024 seluruh puskesmas melaksanakan program P4K dan target ini sudah terpenuhi.

16. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Mempunyai Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah proporsi ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh bidan atau dokter spesialis kandungan. Tenaga kesehatan ini memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk menangani persalinan normal maupun komplikasi ringan serta melakukan rujukan jika diperlukan. Cakupan ini penting karena untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan di Kota Denpasar selama lima tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

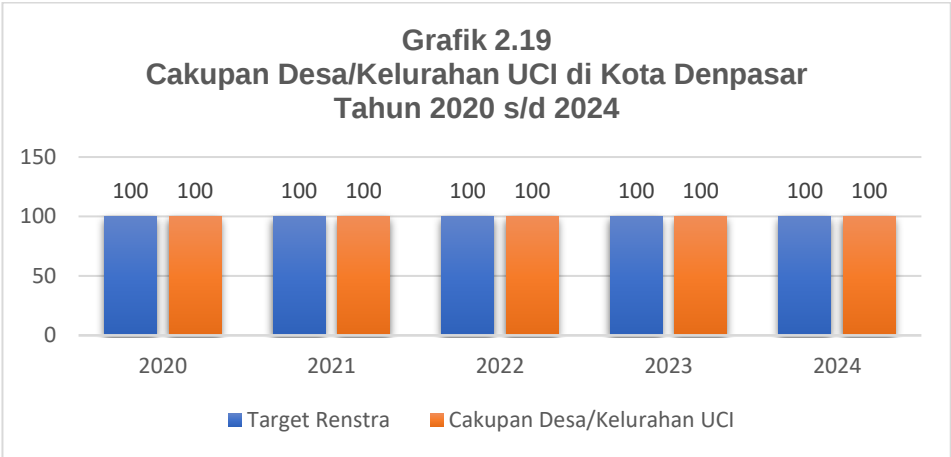
Dari grafik diatas cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan di Kota Denpasar tahun 2020-2021 masih dibawah target renstra sedangkan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 sudah melebihi target renstra yang ditetapkan. Upaya peningkatan cakupan persalinan yang dilakukan melalui pelaksanaan program unggulan kesehatan ibu, diantaranya revitalisasi bidan koordinator melalui pelaksanaan supervisi fasilitatif untuk peningkatan mutu dan kualitas tenaga penolong persalinan serta peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu melalui pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA).

17. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Tujuan program imunisasi adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keberhasilan program imunisasi dapat



dilihat dari cakupan desa/kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) yaitu 100% sasaran mendapatkan imunisasi lengkap. Target keberhasilan program imunisasi adalah minimal 100% desa mencapai UCI. Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Denpasar pada dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah mencapai 100%. Berikut ini tren cakupan desa/kelurahan di Kota Denpasar yang mencapai UCI tahun 2020 sampai dengan 2024 :



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Denpasar

18. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan program intervensi gizi dan ketersediaan layanan kesehatan bagi anak-anak yang mengalami gizi buruk. Indikator ini mengukur proporsi balita dengan gizi buruk yang menerima perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan, sesuai dengan standar penatalaksanaan gizi buruk. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Denpasar selama tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



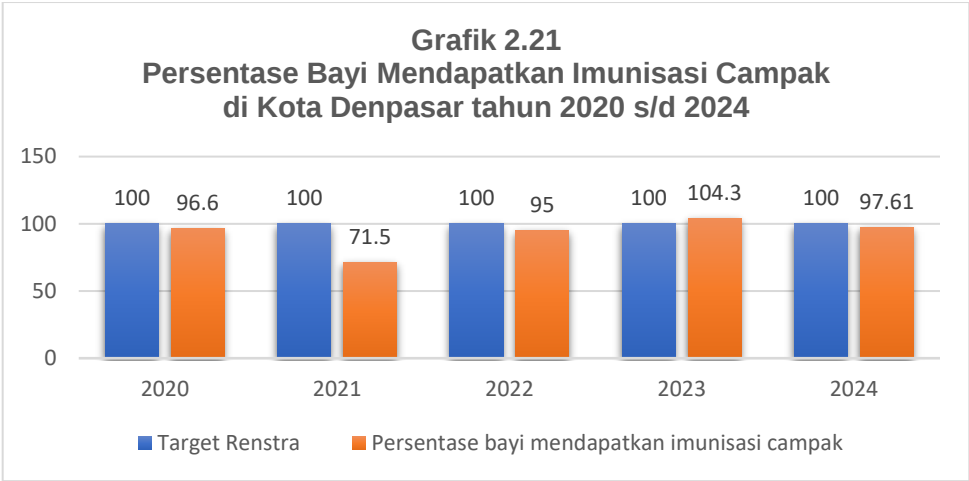
Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Dari grafik diatas diketahui bahwa semua balita gizi buruk di Kota Denpasar sudah mendapatkan perawatan sesuai tatalaksana.

19. Persentase Bayi Yang Mendapat Imunisasi Campak

Imunisasi campak-rubela (MR) menjadi bagian dari imunisasi dasar yang dapat diberikan kepada bayi usia 9 bulan. Campak rubela/MR menjadi salah satu jenis imunisasi yang memperoleh perhatian lebih, hal tersebut terkait dengan komitmen Indonesia pada global untuk turut serta dalam eliminasi campak dan pengendalian rubella. Campak menjadi salah satu penyebab kematian pada balita dan infeksi rubella menyebabkan cacat bawaan pada bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi rubella, sehingga pencegahannya memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kecacatan dan kematian bayi dan balita.

Campak merupakan salah satu jenis imunisasi yang perlu mendapat perhatian lebih karena sesuai dengan komitmen Indonesia untuk ikut dalam eliminasi campak dan rubella pada tahun 2020, dengan capaian cakupan campak minimal 95% di semua wilayah secara merata. Capaian persentase pemberian imunisasi campak rubella pada bayi tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif, di tahun 2020 sampai 2022 tidak mencapai target karena adanya covid jadi tidak semua mau diimunisasi, di tahun 2024 tidak tercapai karena mobilisasi tinggi, bisa kembali ke daerah asalny lagi sehingga tidak tercatat di Denpasar. Persentase bayi mendapatkan imunisasi campak tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Denpasar

20. Persentase Anak Usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap

Imunisasi Dasar Lengkap adalah status imunisasi terhadap bayi yang mendapatkan semua antigen vaksin pada usia < 1 tahun. Pencapaian cakupan *Universal Child Immunisation (UCI)* sebesar 100% seluruh desa. Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila > 80% bayi di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi lengkap. Setiap bayi diharapkan agar mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap diukur dengan imunisasi dasar lengkap.



Tahun 2024 sebanyak 96,68 % bayi (*surviving infant*) sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Cakupan ini sudah sesuai target renstra Dinas Kesehatan yaitu sebesar 96%. Berikut ini persentase cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Denpasar dari tahun 2020 sampai dengan 2024.



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Denpasar

21. Non Folio AFP Rate per 100.000 Penduduk

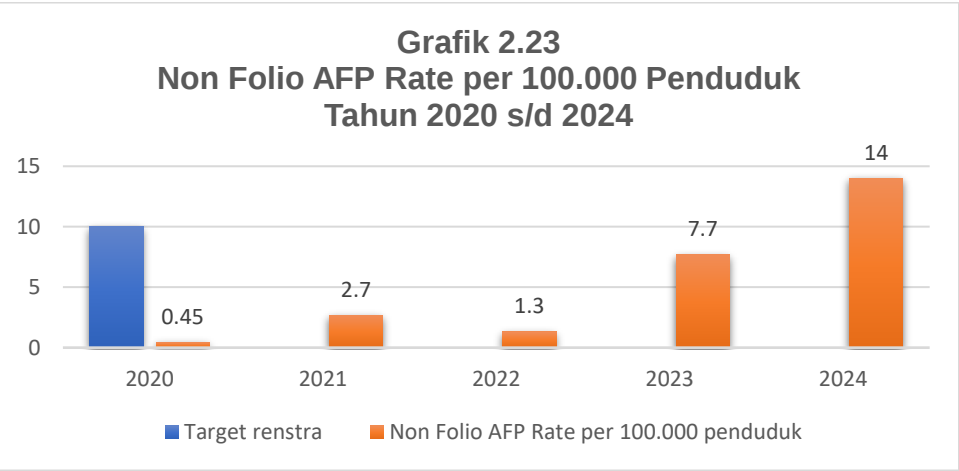
Penyakit poliomyelitis merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyebab penyakit tersebut adalah virus polio yang menyerang sistem saraf hingga penderita mengalami kelumpuhan. Kelompok umur 0-3 tahun merupakan kelompok umur yang paling sering diserang penyakit ini, dengan gejala demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher dan sakit di tungkai dan lengan.

Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio bersama negara-negara *South East Asia Region (SEARO)* pada tanggal 27 Maret 2014. Saat ini tinggal 2 negara, yaitu Afghanistan dan Pakistan yang masih endemik polio. Setelah Indonesia dinyatakan bebas polio, bukan berarti Indonesia menurunkan upaya imunisasi dan surveilans AFP, upaya pencegahan harus terus ditingkatkan hingga seluruh dunia benar-benar terbebas dari polio.

Surveilans AFP adalah pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada anak usia < 15 tahun, yang merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit polio, dalam upaya untuk menemukan adanya transmisi virus polio liar. Non polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Setiap kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan intensifikasi surveilans, akan dilakukan pemeriksaan spesimen tinja untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar. Untuk itu diperlukan spesimen adekuat yang sesuai dengan persyaratan yaitu diambil ≤14 hari setelah kelumpuhan dan suhu spesimen 0°C - 8°C sampai di laboratorium



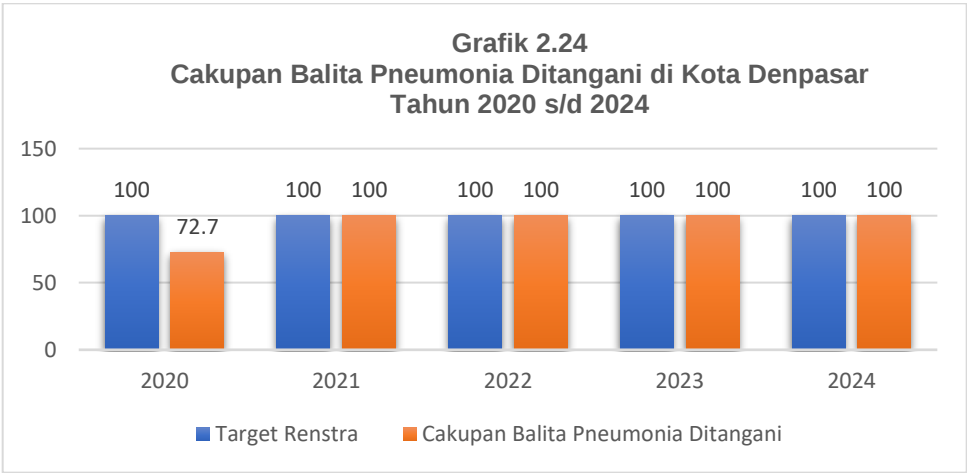
Acute Flaccid Paralysis (AFP) merupakan kondisi abnormal ketika seseorang mengalami penurunan kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas dan kemudian berakhir dengan kelumpuhan. Ditjen PP&PL Kementerian Kesehatan RI menetapkan indikator surveilans AFP yaitu ditemukannya Non Polio AFP Rate minimal sebesar 2/100.000 anak usia < 15 tahun. Hasil surveilans aktif pada tahun 2020 s/d 2024 di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini :



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

22. Cakupan Balita Pneumonia ditangani

Cakupan balita pneumonia mengacu pada seberapa banyak balita yang terjangkit pneumonia yang berhasil ditemukan dan ditangani oleh layanan kesehatan. Cakupan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk akses ke layanan kesehatan, kesadaran masyarakat tentang gejala pneumonia, kualitas pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan seperti imunisasi. Cakupan balita pneumonia ditangani di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



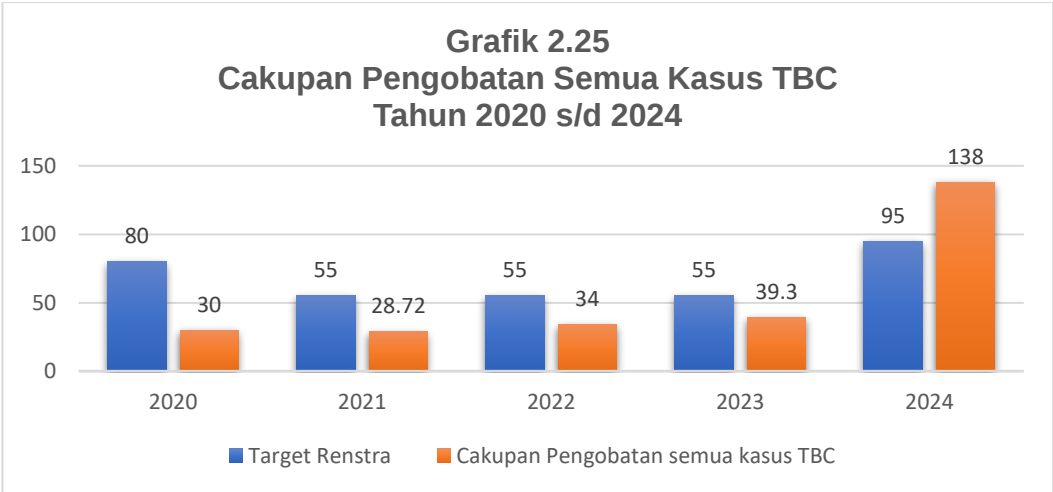
Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa cakupan balita pneumonia ditangani di Kota Denpasar sudah mencapai 100% dan sudah sesuai target renstra. Hanya di tahun 2020 capaian masih dibawah target karena ada covid-19.

23. Cakupan Pengobatan Semua Kasus TBC

Cakupan pengobatan semua kasus TB mengacu pada seberapa banyak pasien TB yang terdiagnosis dan mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan standar. Cakupan pengobatan TB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aksesibilitas layanan kesehatan, kualitas diagnosis, ketersediaan obat, kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan dan upaya penemuan kasus secara aktif.

Cakupan pengobatan TB pada tahun 2020 s/d 2023 masih dibawah target yang ditetapkan, ini disebabkan antara lain karena jumlah estimasi kasus Tuberkulosis di Kota Denpasar yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus yang ditemukan setiap tahunnya, pelaksanaan skrining TBC yang belum maksimal di masyarakat, serta kurangnya keterlibatan faskes swasta dalam penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis. Pada Tahun 2024, estimasi kasus Tuberkulosis di Kota Denpasar mengalami penurunan yang signifikan, serta adanya peningkatan peran swasta dalam upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis, sehingga cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis di Kota Denpasar tercapai diatas target yang ditentukan. Berikut ini grafik cakupan pengobatan semua kasus TBC di Kota Denpasar dari tahun 2020 sampai dengan 2024.



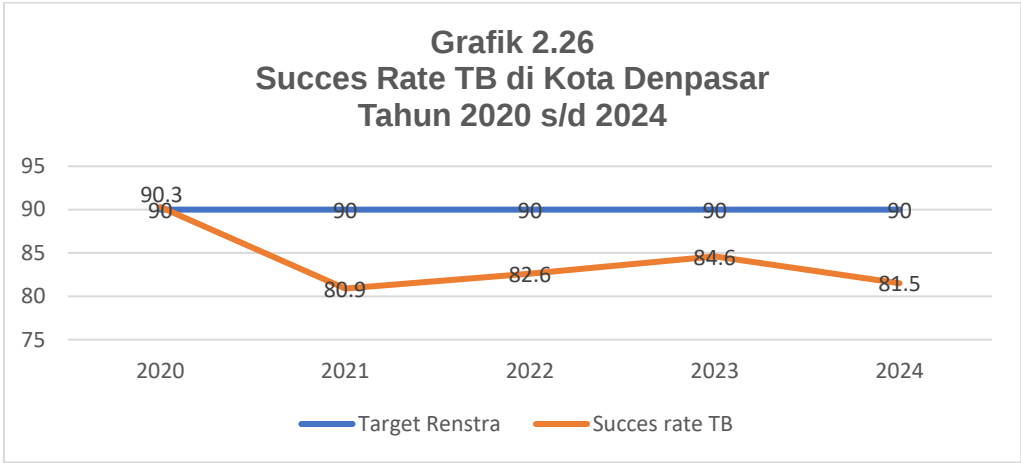
Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

24. Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus

Pengobatan merupakan upaya untuk mengendalikan tuberkulosis. Indikator yang dipakai sebagai evaluasi hasil pengobatan penderita TB Paru adalah *succses rate*, dimana indikator ini dapat dievaluasi setahun kemudian setelah penderita ditemukan dan diobati. Sukses rate akan meningkat bila pasien TB Paru dapat menyelesaikan pengobatan dengan baik tanpa atau dengan pemeriksaan dahak.



Pada tahun 2024 angka *success rate* pengobatan penderita TB di Kota Denpasar sebesar 81,47% (1.297 kasus) mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan tahun 2023 (84,6%). Hal ini dikarenakan pasien yang putus berobat (*loss to follow up*) dan pasien meninggal cukup tinggi. Gambaran *success rate* pengobatan penyakit TB Paru di Kota Denpasar seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir *succes rate* kasus TB Paru di Kota Denpasar terlihat mengalami fluktuasi. Tahun 2024 *succes rate* (81,5%) mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya (84,6%). Capaian ini juga masih lebih rendah dari target renstra sebesar 90%.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan *Case Rate* dan meningkatkan *Success Rate* adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi penanggulangan TB Paru dengan manajemen DOTS (*Directly Observed Treatment Shourtcourse Chemotherapy*) melalui jejaring internal maupun eksternal rumah sakit serta sektor terkait lainnya melalui pengawasan menelan obat. Disamping meningkatkan jangkauan pelayanan, upaya yang tidak kalah penting dan perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan penyakit TB Paru adalah meningkatkan kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Kasus TB Paru sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan kemiskinan, karena penularan TB Paru adalah melalui kontak langsung langsung dengan penderita. Status gizi juga mempengaruhi kasus TB Paru terutama angka kesembuhannya, dengan status gizi yang baik penderita TB Paru akan lebih cepat pulih.

25. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan DBD mencakup upaya identifikasi dini kasus DBD dan tindakan medis yang tepat untuk mencegah komplikasi dan kematian. Ini melibatkan deteksi kasus di masyarakat, pemeriksaan laboratorium, serta perawatan medis yang sesuai, termasuk pemberian cairan dan obat-obatan. Selain itu pencegahan melalui pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi masyarakat

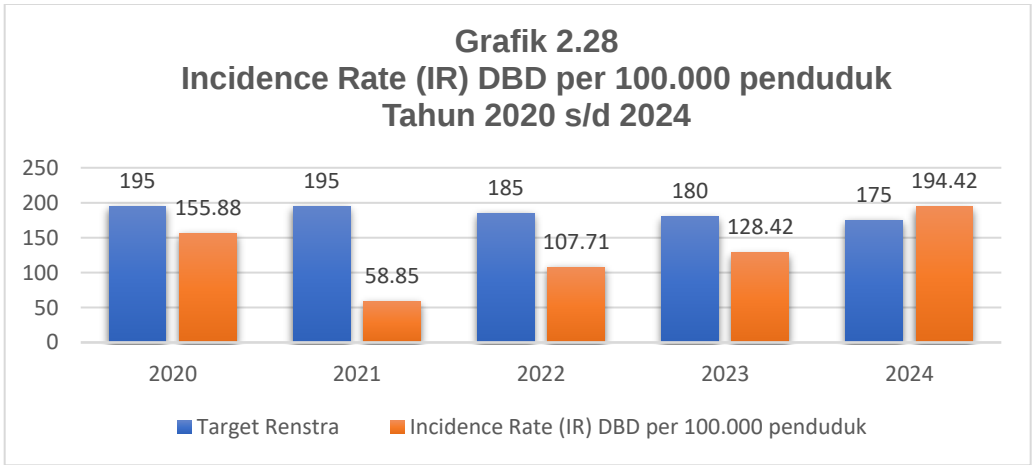
juga merupakan bagian dari cakupan ini. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD selama lima tahun terakhir sudah mencapai target yang ditetapkan di renstra dan capaiannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

26. Incidence Rate (IR) DBD per 100.000 Penduduk

Incidence rate DBD merupakan ukuran menunjukkan jumlah kasus baru DBD dalam suatu populasi tertentu selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan per 100.000 penduduk. Dengan kata lain, ini adalah angka kesakitan DBD pada suatu wilayah. Insiden rate DBD memberikan gambaran tentang risiko terjadinya DBD di suatu wilayah. Semakin tinggi angkanya semakin tinggi risiko penularan DBD. Incidence rate DBD di Kota Denpasar pada tahun 2020-2023 sudah dibawah target renstra tapi di tahun 2024 IR DBD adalah sebesar 194,42 per 100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan IR DBD tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan IR DBD di Kota Denpasar. IR DBD tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

Tingginya kasus DBD umumnya disebabkan oleh lingkungan dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai, tingkat kepadatan penduduk serta tingkat kepadatan populasi nyamuk aedes aegypty yang tinggi, serta masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Berbagai upaya



yang telah dilakukan sudah dapat menurunkan kasus DBD sampai dibawah target renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 yaitu lebih kecil dari 175/100.000 penduduk diantaranya adalah melalui Fogging massal maupun fokus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui program 3 M plus (Menguras, menutup dan mendaur ulang/menyingkirkan) plus menabur larvasida, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta peningkatan sanitasi lingkungan. Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, diagnosis dini dan pengobatan dini, serta peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD.

27. Penderita Diare yang ditangani

Penanggulangan diare dititikberatkan pada penanganan penderita untuk mencegah kematian dan promosi kesehatan tentang hiegyne sanitasi dan makanan untuk mencegah penyebarluasan kasus (KLB). Upaya yang dilakukan oleh jajaran kesehatan baik oleh puskesmas maupun dinas kesehatan adalah meningkatkan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, kaporitisasi air minum dan peningkatan sanitasi lingkungan. Tabel berikut ini menunjukan penderita diare yang ditangani di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir dimana tahun 2020 tidak mencapai target karena adanya covid-19, sedangkan tahun 2021 s/d 2024 sudah sesuai target di tetapkan.



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

28. Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria atau Annual Parasite Incidence (API) merupakan jumlah kasus malaria baru per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk mengukur tingkat endemisitas malaria di suatu wilayah. Semakin tinggi API semakin tinggi tingkat endemisitasnya.

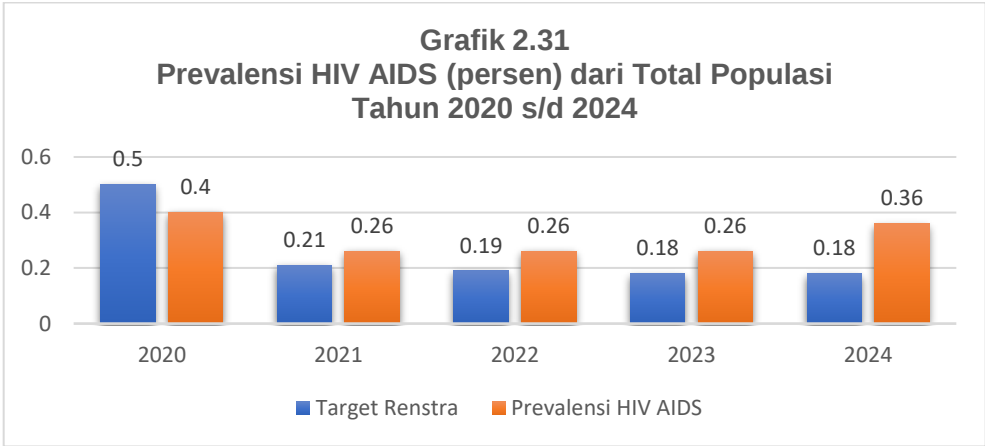


Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

Dari grafik diatas angka kejadian malaria sudah sesuai target renstra < 1. Kasus yang ada di Kota Denpasar kebanyakan kasus import malaria, tidak ada kasus meninggal akibat malaria (CFR=0%). Penyakit malaria bukan merupakan penyakit endemis tetapi merupakan kasus-kasus import dari penduduk yang berasal dari daerah endemis malaria atau orang Bali khususnya yang berasal dari Kota Denpasar yang pernah tinggal di daerah endemis malaria seperti NTT, Maluku dan Papua.

29. Prevalensi HIV AIDS (persen) dari total populasi

Prevalensi HIV merupakan angka yang menunjukkan jumlah kasus HIV yang ada dalam suatu populasi pada waktu tertentu. Di Indonesia prevalensi HIV masih menjadi perhatian terutama pada kelompok usia produktif dan populasi kunci. Prevalensi HIH AIDS masih mengacu pada hasil nasional. Berikut ini grafik prevalensi HIV AIDS dari tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

30. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

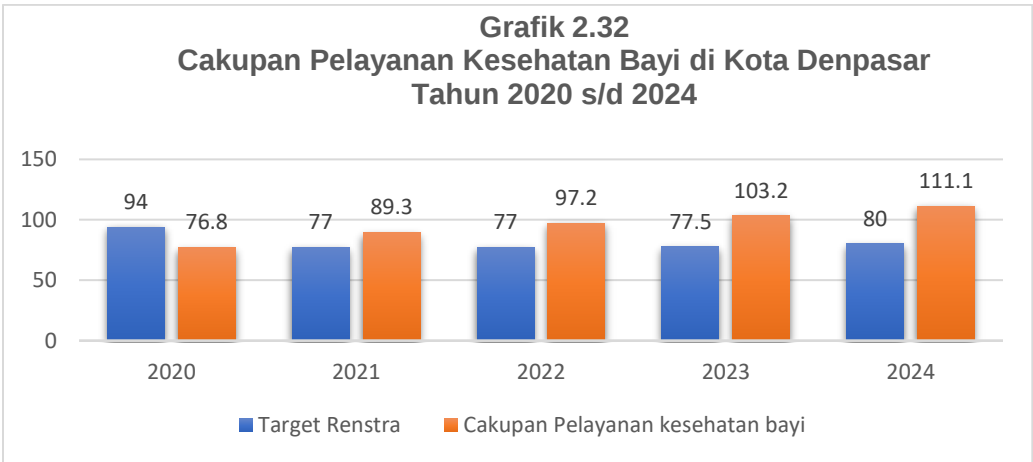
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menargetkan 100% bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada pelayanan neonatal esensial sesuai yang tercantum dalam peraturan Menteri kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang upaya

kesehatan anak, dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter dan atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, dan Perawat) minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio1-4, dan campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang penilaian terhadap upaya peningkatan akses bayi memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi.

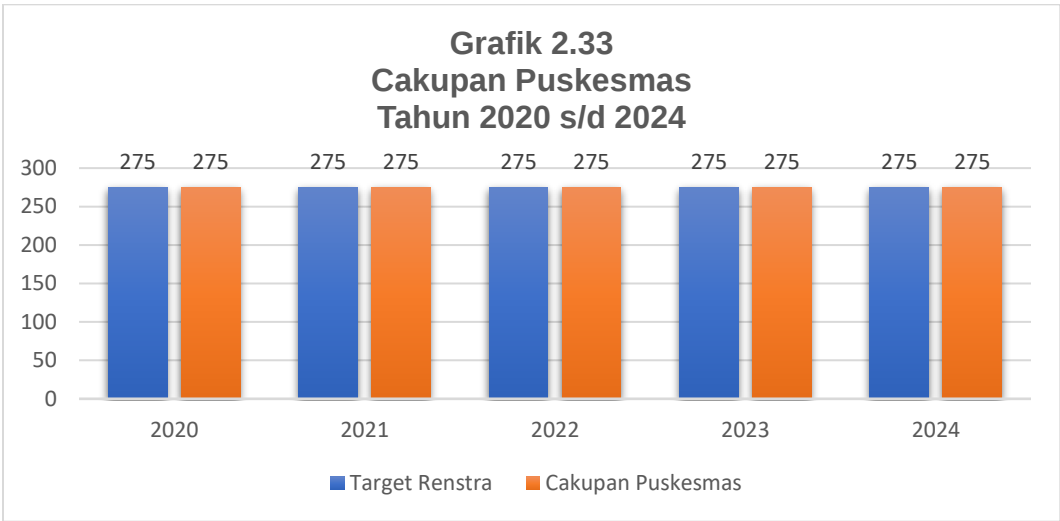
Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar pada tahun 2024 sebesar 111,1% sudah lebih tinggi dari capaian tahun 2023 (103,2%). Target pelayanan kesehatan bayi pada renstra Kota Denpasar adalah 80%, dengan capaian pelayanan bayi sebesar 111,1% di tahun 2024 maka target cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar sudah lebih tinggi dari target. Berikut cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar dari tahun 2020 sampai dengan 2024



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

31. Cakupan Puskesmas

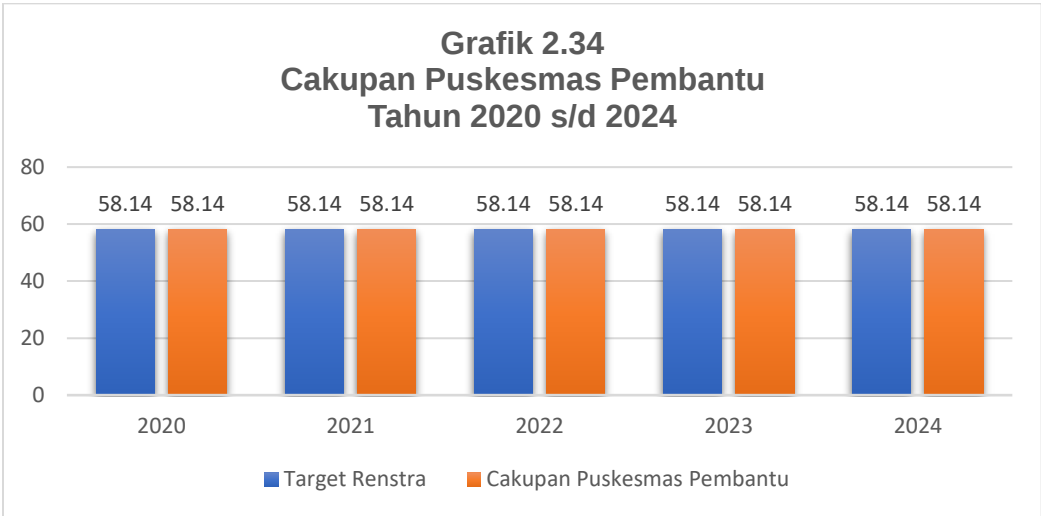
Ruang lingkup puskesmas mencakup upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif. Cakupan puskesmas di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Kota Denpasar

32. Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas pembantu (Pustu) meliputi pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa atau kelurahan, termasuk pelayanan pengobatan umum, perawatan luka, imunisasi serta dukungan untuk program kesehatan masyarakat seperti posyandu dan penyuluhan kesehatan. Pustu juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan Puskesmas induk, membantu memperluas jangkauan pelayanan dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan. Cakupan puskesmas pembantu di Kota Denpasar tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

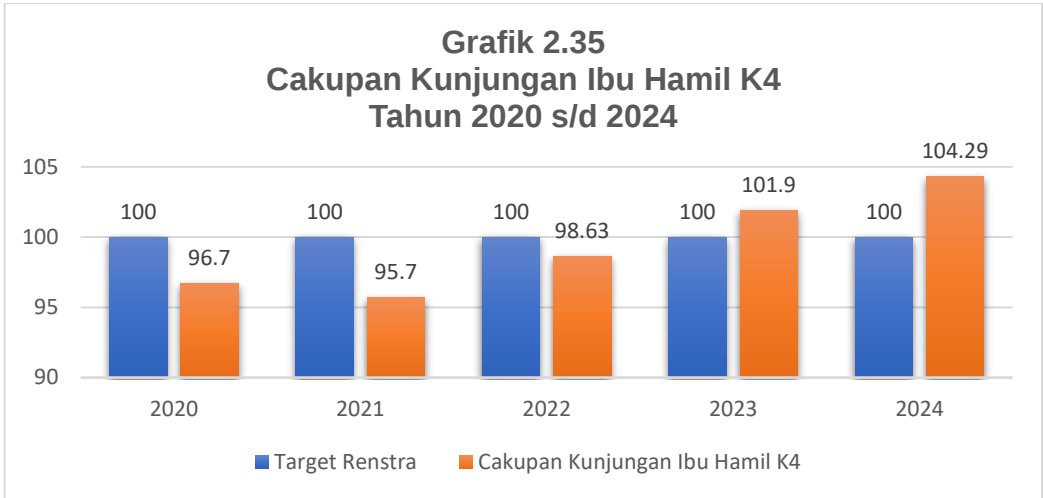


Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Kota Denpasar

33. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan K4 pada ibu hamil merujuk pada persentase ibu hamil yang telah melakukan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali sesuai standar yang ditetapkan. Pemeriksaan K4 bertujuan untuk memantau kesehatan ibu dan janin secara berkala, mendeteksi dini adanya masalah atau komplikasi kehamilan, serta memberikan edukasi tentang perawatan kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi. Mencapai cakupan K4 yang optimal adalah langkah penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesehatan ibu dan

anak. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kota Denpasar tahun 2020-2022 masih dibawah target renstra ini disebabkan karena dampak covid-19 sehingga ada pembatasan kontak, sedangkan tahun 2023 dan 2024 cakupan sudah melebihi target renstra. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 selama lima tahun terakhir dapat di lihat pada grafik di bawah ini :



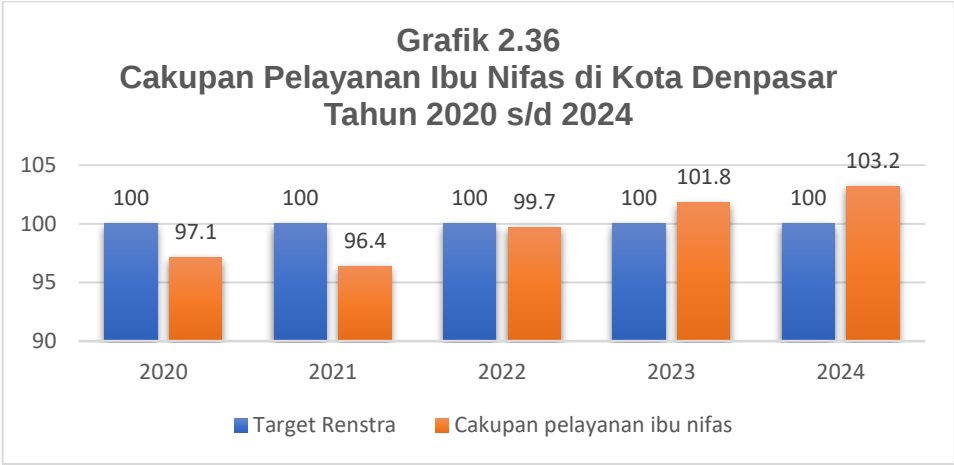
Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

34. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan, yang dilakukan sekurang – kurangnya tiga kali yaitu pada 6 jam sampai tiga hari setelah melahirkan, pada hari ke empat sampai 28 pasca persalinan dan pada hari 29 sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kunjungan nifas didefinisikan sebagai kontak ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas kesehatan dan kunjungan rumah. Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :

- 1. pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
- 2. pemeriksaan tinggi fundus uteri;
- 3. pemeriksaan lochia dan pengeluaran pervagina lainnya;
- 4. pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Eksklusif 6 bulan;
- 5. pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali;
- 6. pelayanan KB pasca persalinan

Cakupan pelayanan ibu nifas di Kota Denpasar dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

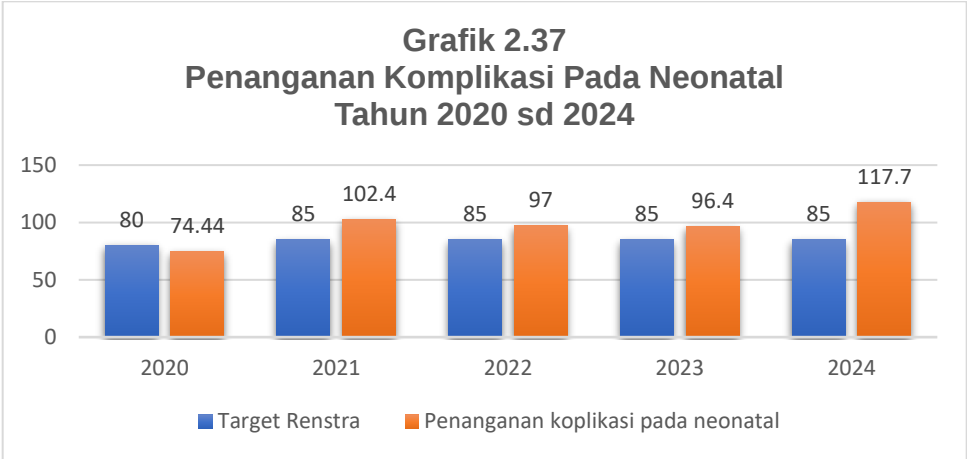
Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (cakupan Kf lengkap). Indikator ini menilai kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2024 sebesar 103,2%, sudah meningkat dari tahun 2023 yaitu 101,8%. Sementara target cakupan kunjungan ibu nifas tahun 2024 adalah 100%. Jadi capaian pelayanan ibu nifas Kota Denpasar sudah mencapai target yang ditetapkan.

35. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Ditangani

Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan manajemen terpadu balita muda (MTBM).

Untuk perkiraan neonatal komplikasi diperkirakan sebesar 15% dari jumlah neonatal. Dari 11.361 sasaran bayi lahir hidup sebanyak 1.704 diperkirakan menderita komplikasi. Selama tahun 2024 ditemukan dan ditangani sebanyak 2.005 neonatal komplikasi atau sebesar 117,7%. Capaian tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan renstra Dinas Kesehatan Dikes Kota Denpasar sebesar 85%. Penanganan komplikasi pada neonatal selama 5 tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

36. Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan kesehatan pada anak umur 0-59 bulan sesuai standar meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun dan pemberian vitamin A sebanyak 2 kali setahun (Februari dan Agustus). Pada tahun 2024, sasaran balita umur 0-59 bulan sebesar 52.262 orang, sedangkan untuk sasaran anak balita usia 12-59 bulan sebesar 41.122 orang.

Pelayanan kesehatan pada balita dapat meliputi pemanfaatan serta pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pelayanan stimulasi, deteksi, intervensi tumbuh kembang (SIDTK), serta Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

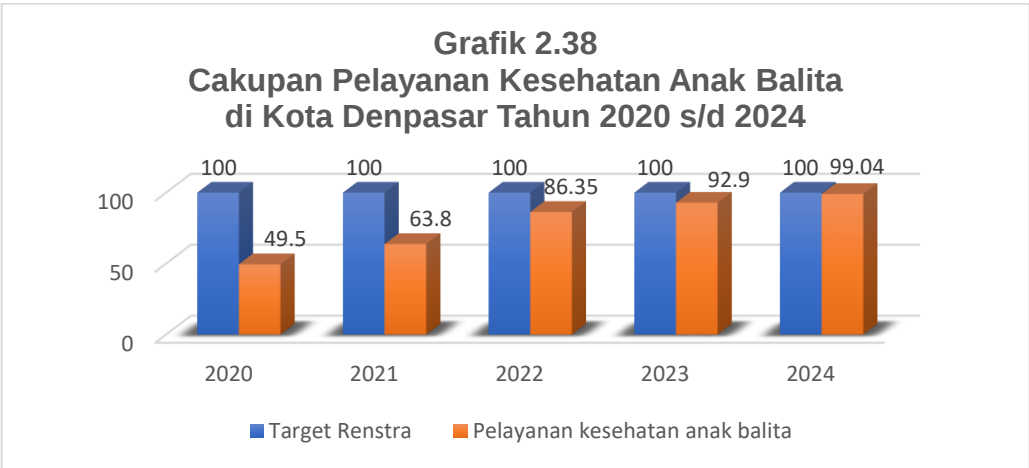
Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh ibu yang memiliki balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat penting untuk dioptimalkan. Buku KIA merupakan *home-base record* untuk memastikan *continuum of care* (COC) ibu dan anak serta panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan melalui kegiatan monitoring kesehatan. Cakupan balita yang memiliki buku KIA sebesar 53.096 orang (101,60%) dari total 41.122 sasaran balita (usia 12-59 bulan).

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita meliputi penimbangan sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, pengukuran panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan pemantauan perkembangan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan menggunakan ceklist Buku KIA atau KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) atau instrument baku lainnya. Cakupan balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan sebesar 40.726 orang (99,04%) dari total 41.122 sasaran balita (usia 12-59 bulan).

Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan berjenjang mulai dari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan checklist perkembangan Buku KIA. Hasil pemeriksaan perkembangan melalui Buku KIA dengan interpretasi tidak lengkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di Puskesmas. Kegiatan SDIDTK dilakukan sesuai usia balita (usia 0-24 bulan: 3 bulan sekali; usia 24-72 bulan: 6 bulan sekali) menggunakan instrument dalam SDIDTK oleh tenaga kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun.

Cakupan balita yang dilayani SDIDTK sebanyak 40.726 balita (77,93%) dari 52.262 sasaran anak balita (usia 0-59 bulan). Target nasional cakupan balita yang dilayani SDIDTK tahun 2024 adalah 85%. Cakupan tahun ini masih dibawah target yang ditetapkan sehinga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan balita dengan meningkatkan partisipasi balita berkunjung ke posyandu dan untuk puskesmas dengan capaian yang rendah perlu diberikan perhatian lebih.

Sebagai tindak lanjut dari upaya deteksi faktor risiko dan penyakit, maka dilakukan penanganan bayi dan balita sakit dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya. Untuk cakupan balita dilayani MTBS sebanyak 18.083 balita (97,77%) dari jumlah balita sakit yang datang berobat ke puskesmas (18.496 balita).



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

37. Palayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan pada anak sekolah diberikan melalui program UKS, dan UKGS dalam bentuk kegiatan pemeriksaan kesehatan/skrining yang dilaksanakan di sekolah atau rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan

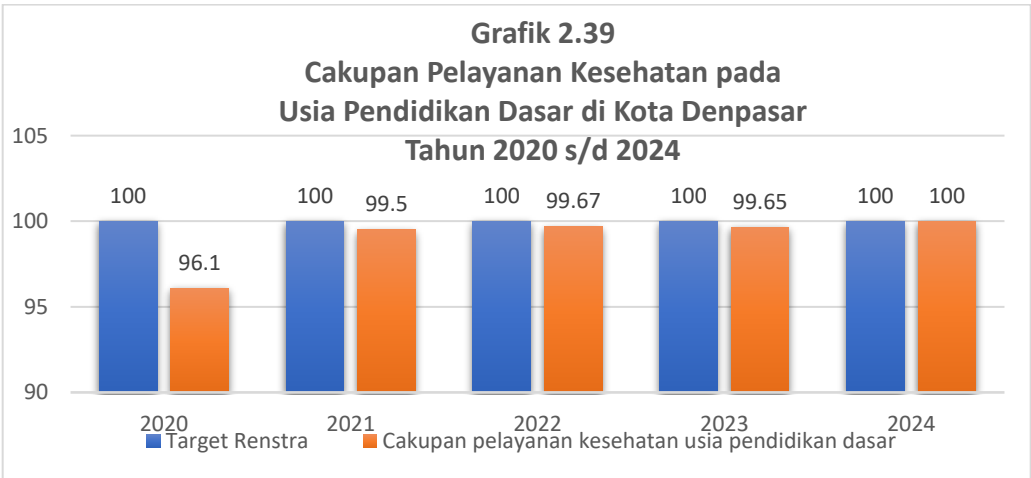


dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi :

- Penilaian status gizi
- Penilaian tanda vital
- Penilaian kesehatan gigi dan mulut
- Penilaian ketajaman indera

Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan kepada sekolah/madrasah, melakukan rujukan jika diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat dan Laporan ke Dinas Kesehatan.

Untuk tahun 2024 persentase siswa pendidikan dasar yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 100%. SPM menargetkan anak pada usia pendidikan dasar 100% harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pada tahun 2024 target ini sudah tercapai. Berikut ini cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kota Denpasar dari tahun 2020 sampai dengan 2024.



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

38. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)

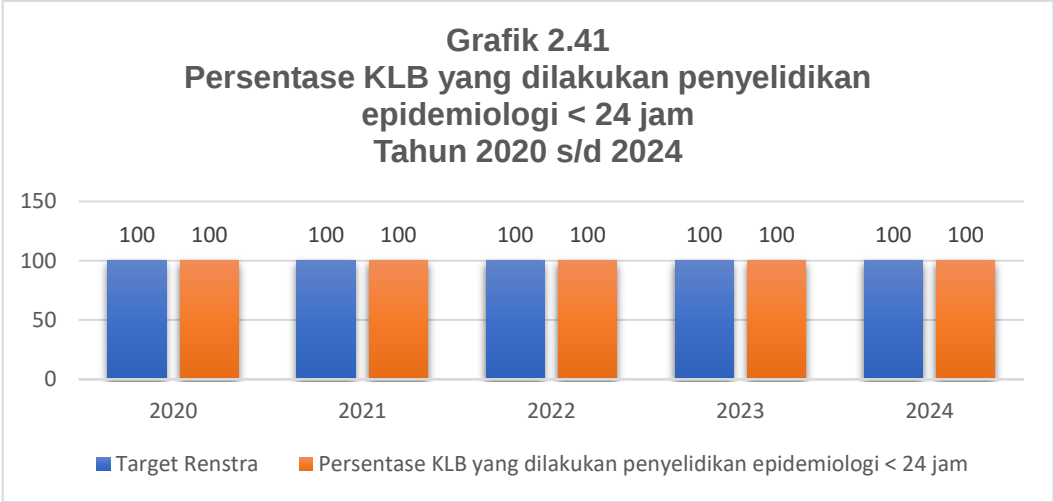
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 di fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit, mencakup pelayanan gawat darurat yang diberikan 24 jam sehari oleh dokter umum. Pelayanan gawat darurat level 1 merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien gawat darurat. Pelayanan yang cepat dan tepat pada fase awal ini sangat krusial dalam menyelamatkan nyawa dan mencegah cacatan. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sudah sesuai dengan target renstra yang ditetapkan yaitu 100%. Cakupan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Kota Denpasar

39. Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Persentase KLB (Kejadian Luar Biasa) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi merupakan indikator penting dalam upaya penanggulangan penyakit dan pencegahan penyebaran wabah. Penyelidikan epidemiologi bertujuan untuk mengetahui penyebab, cara penularan, dan faktor risiko suatu KLB, sehingga tindakan pencegahan dan penanggulangan yang tepat dapat dilakukan. Di Kota Denpasar setiap terjadi KLB sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, dan sudah sesuai dengan target renstra yang ditetapkan 100%. Berikut ini grafik persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dari tahun 2020 s/d 2024.

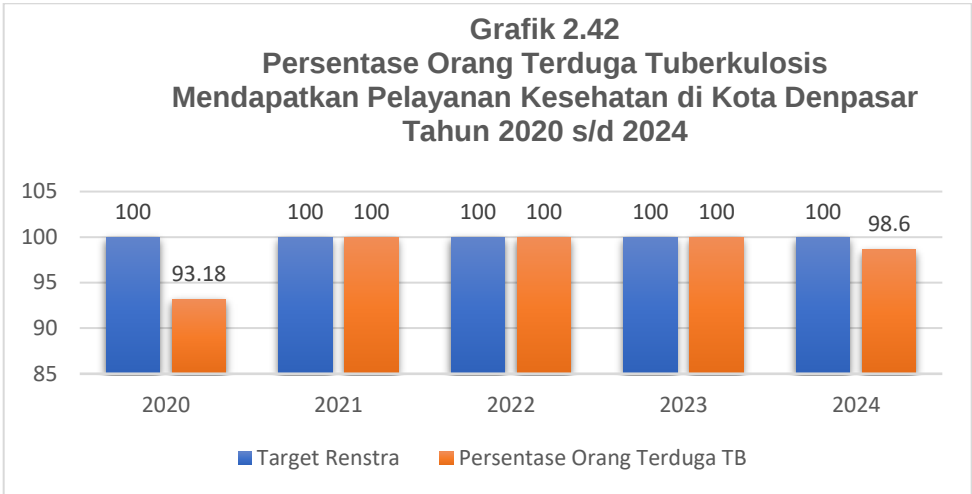


Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

40. Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan edukasi. Pemeriksaan klinis terduga TBC yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda, Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis dan edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.

Jumlah semua kasus Tuberkulosis tahun 2024 di Kota Denpasar sebesar 2.002 orang terdiri dari 1.218 laki-laki dan 784 perempuan. Tahun 2024 orang terduga TBC yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan RS Kota Denpasar adalah 9.992 orang (98,6%). Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis tahun 2024 sebesar 138,1%.



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

41. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV meliputi pencegahan, deteksi dini, pengobatan dan perawatan. Ini mencakup konseling, tes HIV, terapi antiretroviral (ART) serta dukungan psikologis dan sosial.



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

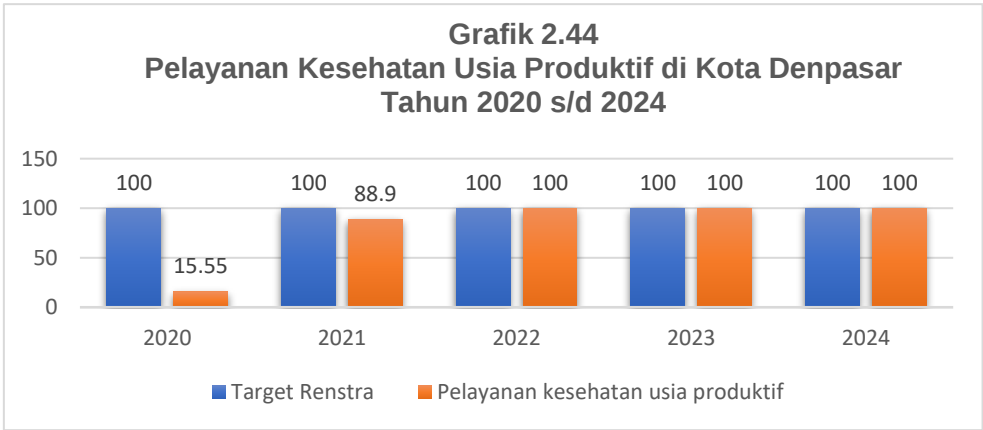
42. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pelayanan kesehatan usia produktif merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi setiap warga negara berusia 15-59 tahun yang meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana serta skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan skrining dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan anamnesa perilaku berisiko. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk



keluarga berencana, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan. Pelayanan edukasi pada usia produktif dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM.

Tahun 2024 dari 220.777 penduduk usia produktif yang ada di Kota Denpasar, sebanyak 220.777 orang (100%) sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Penduduk usia produktif yang beresiko sebanyak 49.566 orang (22,45%). Pada kelompok risiko ini menunjukkan gambaran masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memeriksakan lebih dini kondisi kesehatan, sehingga dimungkinkan adanya penderita PTM yang belum mendapat layanan kesehatan.



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

43. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

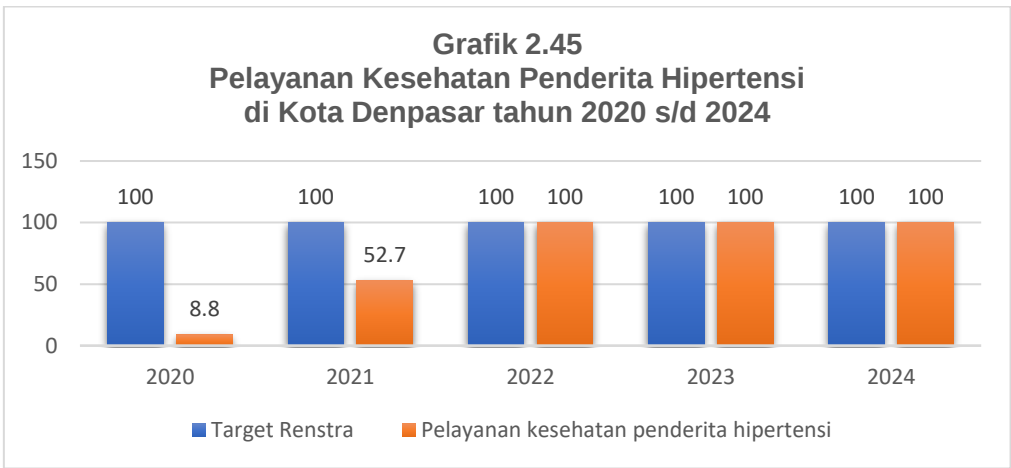
Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang. Hipertensi yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke), oleh karena itu tekanan darah harus dikendalikan. Hipertensi bersifat *silent killer* dimana gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejala-gejalanya itu adalah sakit kepala/rasa berat di tengkuk, mumet (vertigo), jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging (tinnitus), dan mimisan.

Faktor resiko Hipertensi adalah umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik (faktor resiko yang tidak dapat diubah/dikontrol), kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, penggunaan jelantah, kebiasaan konsumsi minum-minuman beralkohol, obesitas, kurang aktifitas fisik, stres, penggunaan estrogen. Penatalaksanaannya dapat dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ataupun dengan cara modifikasi gaya hidup (membatasi

asupan garam tidak lebih dari 6 gram/hari, menurunkan berat badan, menghindari minuman berkafein, rokok, dan minuman beralkohol, Olah raga, cukup istirahat (6-8 jam) dan mengendalikan stress (Pusdatin, 2014).

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan.

Pada tahun 2024 dari 30.694 perkiraan penderita hipertensi di Kota Denpasar sebanyak 30.694 penderita (100%) sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar. Capaian Dinas Kesehatan Kota Denpasar sudah mencapai target (100%).



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

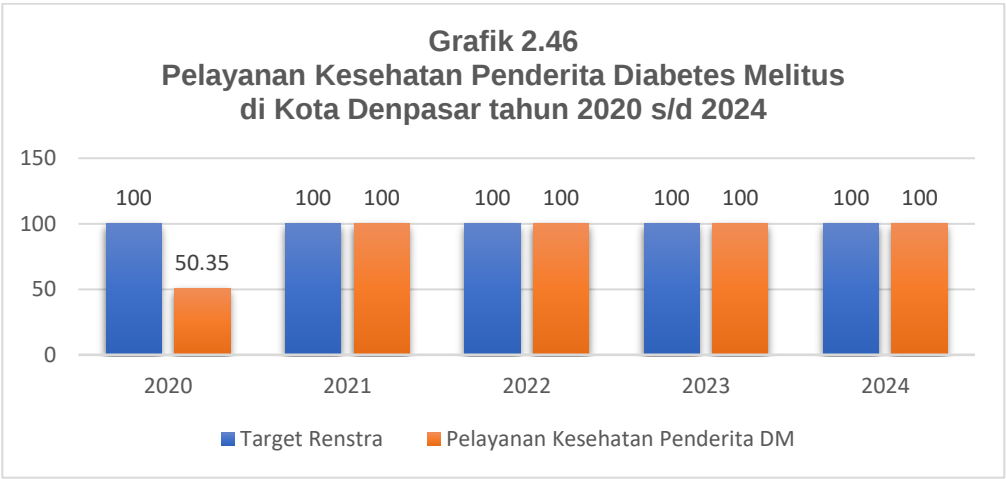
44. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Menurut WHO, Diabetes Melitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Diabetes Melitus yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi sistem kardiovaskuler, saraf, mata, dan ginjal serta berisiko pada terjadinya komplikasi. Komplikasi tersebut termasuk serangan jantung, stroke, dan infeksi kaki berat (gangren yang dapat berakhir pada amputasi), gagal ginjal, dan disfungsi seksual. Oleh karena itu selain upaya pencegahan, diperlukan upaya pengendalian DM melalui deteksi dini dan penanganan yang tepat.

Diabetes militus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun karena pankreas tidak memproduksi insulin (hormon yang mengatur keseimbangan gula darah) atau tubuh tidak mampu menggunakan insulin yang diproduksi, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah (hiperglikemia). Pelayanan kesehatan standar DM meliputi pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau

nutrisi, serta terapi farmakologi bila diperlukan (gula darah sewaktu lebih dari 200mg/dl).

Tahun 2024 dari 10.883 penderita DM yang ditargetkan sebanyak 10.883 (100%) sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar menargetkan 100% penderita DM mendapat pelayanan kesehatan, sehingga capaian Dinas Kesehatan Kota Denpasar sudah sesuai target yang ditetapkan.



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

45. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

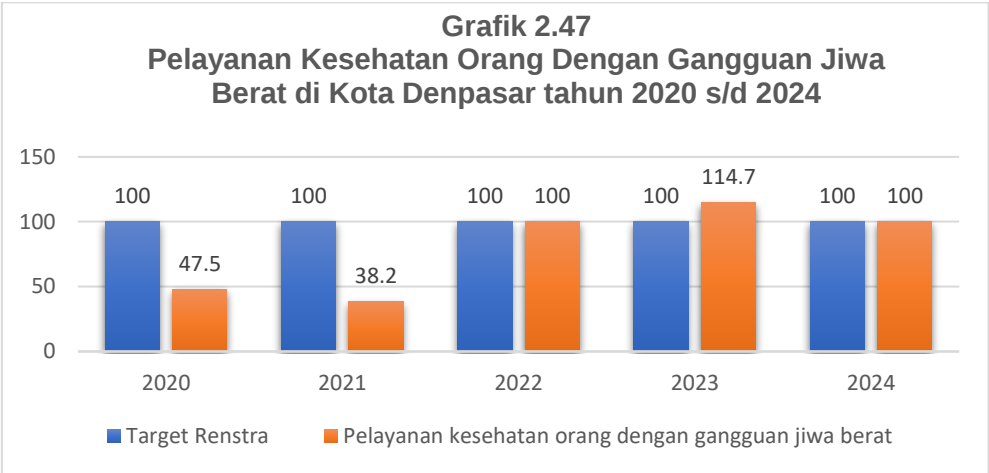
Orang-orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan istilah resmi bagi penyandang gangguan jiwa berdasarkan undang-undang kesehatan jiwa nomor 18 tahun 2014. ODGJ berat merupakan orang yang didiagnosis oleh psikiater, dokter, psikolog klinis sebagai penderita Skizofrenia atau Psikosis Akut dan harus mendapat layanan dan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, RSU dengan Layanan Keswa, RSJ).

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa kompleks dengan persentasi klinis, perjalanan penyakit, dan respon terapi yang beragam. Gejala Skizofrenia dapat berupa gejala positif, gejala negatif, gejala afektif, dan gejala kognitif. Gejala positif yaitu yang berlebihan dibandingkan fungsi normal, seperti waham, halusinasi, perilaku yang tidak terorganisasi. Gejala negatif merupakan gejala dimana fungsi mental dan ekspresi emosi menjadi berkurang, misalnya ditandai dengan anhedonia, interaksi sosial yang terganggu, dan afek tumpul. Gejala afektif meliputi cemas dan mood yang depresif. Gejala kognitif meliputi gangguan memori kerja dan episodik, gangguan atensi, gangguan fungsi eksekutif dan sebagainya. Seseorang disebut mengalami Skizofrenia apabila gejala tersebut sudah beralngsung lebih 30 hari. Psikotik akut memiliki gejala yang sama dengan skizofrenia hanya belum sampai 30 hari.

ODGJ berat perlu mendapat pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik

dan pemeriksaan status mental), pemberian informasi dan edukasi, tatalaksana awal, pemberian pengobatan dasar dan atau rujukan bila diperlukan. Pelayanan kesehatan terhadap ODGJ berat dilakukan oleh minimal 1 orang Dokter Umum/Spesialis Kedokteran Jiwa dan 1 orang Perawat/ Perawat Spesialis Keperawatan Jiwa.

Sesuai dengan SPM bidang kesehatan, maka seluruh penderita gangguan jiwa berat harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Tahun 2024 ditargetkan 1.260 penderita ODGJ berat di Kota Denpasar. Sebanyak 1.260 penderita yang ditemukan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (100%). Dari 1.260 penderita yang dilayani, sebanyak 1.179 menderita skizofrenia dan 81 orang psikotik akut. Penderita paling banyak ditemukan pada usia 15-59 tahun sebanyak 1.106 penderita.



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

46. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil oleh petugas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi :

- a. timbang berat badan dan pengukuran tinggi badan,
- b. pengukuran tekanan darah,
- c. pengukuran lingkar lengan atas,
- d. pengukuran tinggi puncak rahim (tinggi fundus uteri),
- e. penentuan status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) sesuai status imunisasi,
- f. pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan,
- g. penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ),
- h. pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling) termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), serta KB Pasca persalinan
- i. pelayanan test laboratorium sederhana, minimal test hemoglobin darah (Hb),

pemeriksaan protein urine dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya)

j. tatalaksana kasus

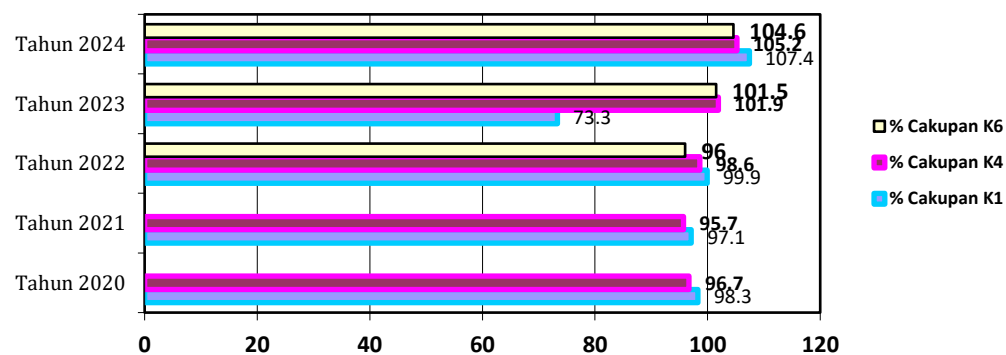
Pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar yang ditetapkan. Ditetapkan pula bahwa distribusi frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 6 kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang dianjurkan yaitu minimal 1 kali pada triwulan pertama, 2 kali pada triwulan kedua dan 3 kali pada triwulan ketiga. Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan komplikasi.

Penilaian terhadap pelaksanaan kesehatan ibu hamil dapat dilihat dari cakupan K1, K4 dan K6. Cakupan K1 menggambarkan jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal pertama dibagi seluruh sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dengan kurun waktu dalam 1 tahun yang sama. Cakupan K4 menggambarkan jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai dengan standar dengan ketentuan minimal 1 kali pada trimester 1, minimal 1 kali pada trimester 2 dan minimal 2 kali pada trimester 3 dibagi seluruh sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dengan kurun waktu dalam 1 tahun yang sama. Cakupan K6 jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal minimal 6 kali sesuai dengan standar dengan ketentuan minimal 1 kali pada trimester 1 dengan dokter, minimal 2 kali pada trimester 2 dan minimal 3 kali pada trimester 3 dengan minimal 1 kali pemeriksaan dengan dokter dibagi seluruh sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dengan kurun waktu dalam 1 tahun yang sama. Indikator K1, K4 dan K6 dapat memperlihatkan gambaran akses terhadap pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Grafik dibawah ini memperlihatkan cakupan kunjungan K1, K4 dan K6 pada ibu hamil selama lima tahun terakhir :



Grafik 2.48
Cakupan K1, K4 dan K6 Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka drop out K1-K4, dengan kata lain jika kesenjangan K1 dan K4 kecil maka hampir semua ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal meneruskan hingga kunjungan keempat pada triwulan 3, sehingga kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan. Pada tahun 2024 K1 sebesar 107,4% sedangkan K4 sebesar 105,2%. Kesenjangan ini disebabkan kemungkinan karena adanya mobilisasi penduduk yang terjadi di Kota Denpasar. Disamping itu kemungkinan ada beberapa ibu hamil sudah mendapat pelayanan K1 di wilayah lain di luar Kota Denpasar. Karena banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kota Denpasar kemungkinan mendekati kehamilan triwulan III banyak yang mengakses pelayanan K4 dan K6 di Kota Denpasar sehingga pencatatanya menjadi tinggi. Pada tahun 2024, indikator K6 Kota Denpasar sebesar 104,6%. Angka ini sudah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 101,5%. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pemeriksaan kehamilan adalah tingkat pendidikan, jenis pekerjaan ibu, dan tingkat sosial ekonomi.

47. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Kematian saat bersalin dalam 1 minggu pertama diperkirakan 60% dari seluruh kematian ibu. Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan risiko kematian ibu saat persalinan karena ditempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Untuk menurunkan kejadian kematian ibu dan kematian bayi salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kandungan (SpOG), dokter umum dan bidan serta diupayakan dilakukan di fasilitas kesehatan. Keberhasilan upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) dan cakupan persalinan di fasyankes (Pf). Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kota Denpasar tahun 2020 sd 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun 2024 (104%) mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2023 (102,3%). Bila dibandingkan dengan target renstra persalinan oleh nakes tahun 2024 sebesar 100% maka pencapaian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah mencapai target yang ditetapkan.

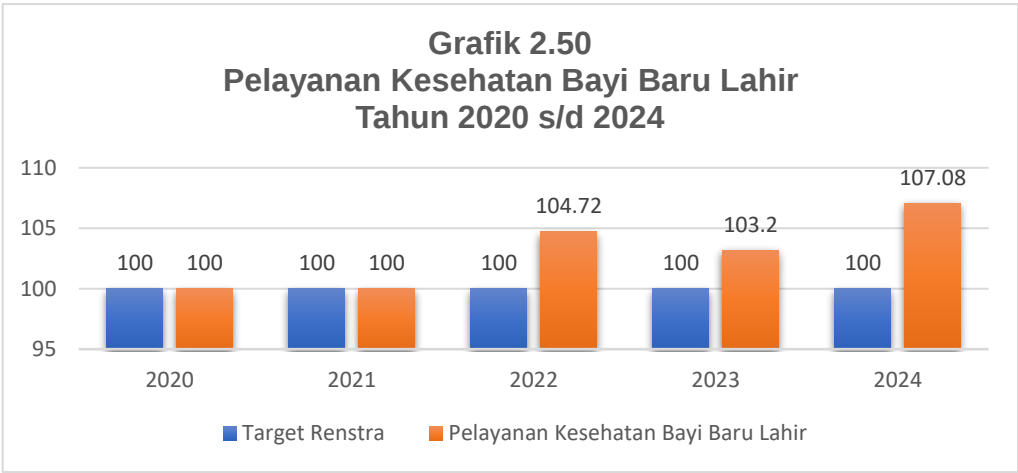
Pusdatin Kemkes menetapkan sasaran ibu bersalin di Kota Denpasar tahun 2024 sebanyak 10.950 orang, sebanyak 11.385 (104,3%) orang melaksanakan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan cakupan persalinan yang dilakukan melalui pelaksanaan program unggulan kesehatan ibu, diantaranya revitalisasi bidan koordinator melalui pelaksanaan supervisi fasilitatif untuk peningkatan mutu dan kualitas tenaga penolong persalinan serta peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu melalui pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA).

48. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir merupakan serangkain tindakan dan perawatan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari untuk memastikan kesehatan dan perkembangannya. Pelayanan ini bertujuan untuk mencegah penyakit, mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, dan memberikan dukungan bagi orang tua dalam merawat bayi. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kota Denpasar

tahun 2020 s/d 2024 sudah sesuai dengan target renstra dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

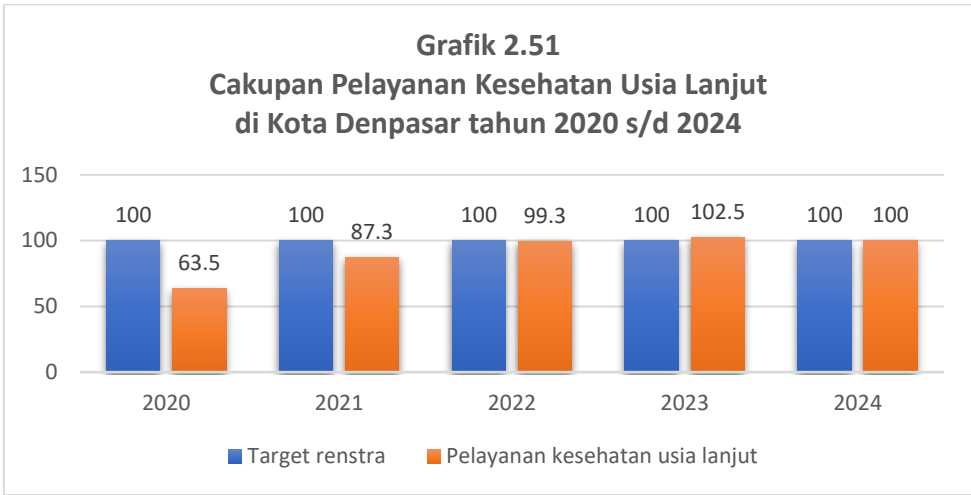
49. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Masyarakat yang tergolong pra usia lanjut adalah mereka yang telah menjalani lebih dari setengah dari masa hidupnya dan berumur antara 45 – 59 tahun. Sedangkan mereka yang tergolong usia lanjut adalah mereka yang telah mencapai umur di atas 60 tahun.

Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk menjaga agar kondisi para pra usia lanjut dan usia lanjut tetap sehat dan produktif di masyarakat dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Upaya tersebut telah terintegrasi melalui program posyandu usia lanjut.

Jumlah masyarakat usia lanjut di Kota Denpasar pada tahun 2024 sebanyak 68.481 Jiwa. Pelayanan kesehatan pada kelompok pra usila dan usila di Kota Denpasar terintegrasi dalam posyandu usia lanjut yang aktif berjumlah 453 buah. Pelayanan yang diberikan posyandu lansia meliputi senam lansia, pemberian paket obat, PMT dan pemeriksaan kesehatan.

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan tidak menular meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan gula darah, pemeriksaan gula darah, gangguan mental, gangguan kognitif, tingkat kemandirian usia lanjut, serta anamnesa perilaku berisiko. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan. Cakupan pelayanan kesehatan pada kelompok usia lanjut 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

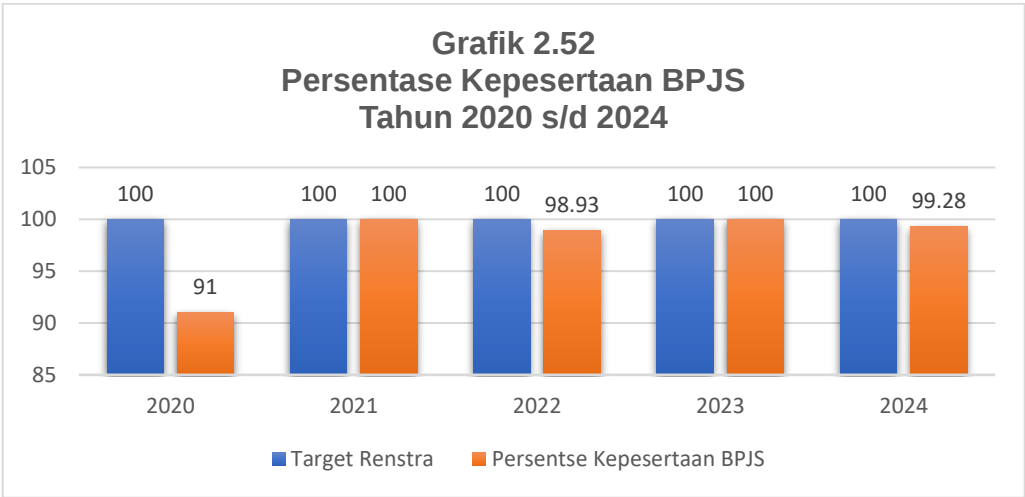


Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Cakupan pelayanan kesehatan pada kelompok usila di Kota Denpasar sebagaimana tergambar pada grafik 2.38 di atas sudah mencapai 100% di tahun 2024. Jika mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar, maka cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk usia lanjut sebesar 100% sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024.

50. Persentase Kepesertaan BPJS

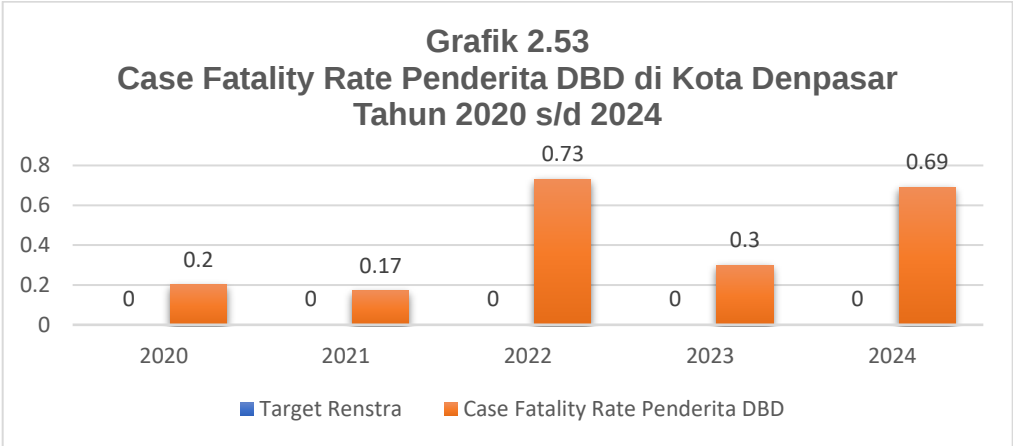
Tahun 2024 ditargetkan 100% penduduk Kota Denpasar sudah terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional. Data peserta JKN tahun 2024 sebanyak 668.439 orang (99,28% dari seluruh penduduk Disdukcapil Kota Denpasar sebesar 673.270 orang) yang terdiri dari Penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebanyak 78.203 orang, PBI APBD sebanyak 96.109 orang. Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 290.641 orang, Pekerja bukan penerima upah sebanyak 180.987 orang dan bukan pekerja (BP) sebanyak 22.499 orang. Perlu meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya JKN sehingga masyarakat yang termasuk golongan mampu akan ikut JKN secara mandiri agar capaian kepesertaan JKN menjadi 100%.



Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Kota Denpasar

51. Case Fatality Rate penderita DBD

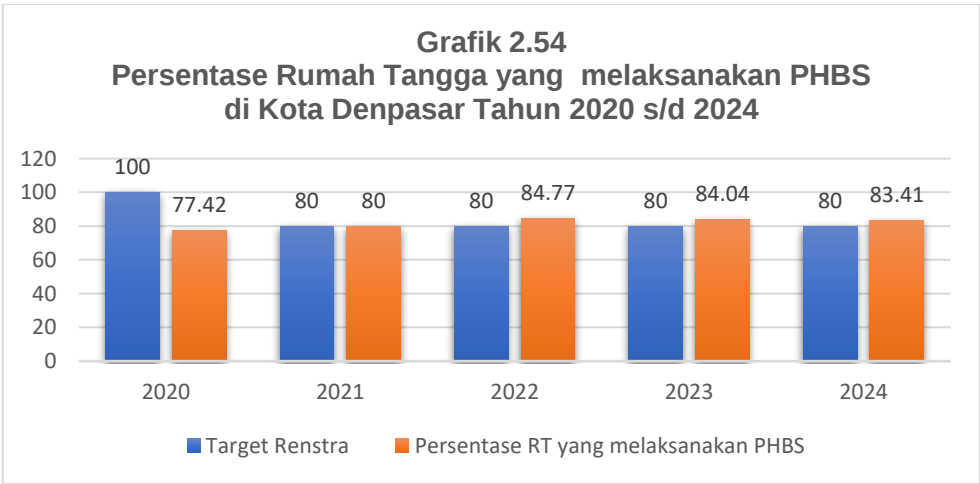
Case fatality rate (CFR) atau angka kematian kasus demam berdarah dengue (DBD) merupakan persentase jumlah kematian akibat DBD dari total kasus DBD yang dilaporkan. CFR DBD digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat keparahan dan keganasan penyakit DBD di suatu daerah. Pada tahun 2024 terjadi 1 kasus kematian pada laki-laki dan 8 kasus kematian pada perempuan akibat DBD (CFR=0,69%). Capaian ini sudah dibawah target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 yaitu < 1, Capaian CFR DBD di Kota Denpasar selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini .



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

52. Persentase Rumah Tangga yang Melaksanakan PHBS

PHBS merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Tujuan PHBS untuk memberdayakan masyarakat agar sadar, mau, dan mampu mempraktekkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini, dimana capaian tahun 2021-2024 sudah diatas target renstra yang ditetapkan.



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

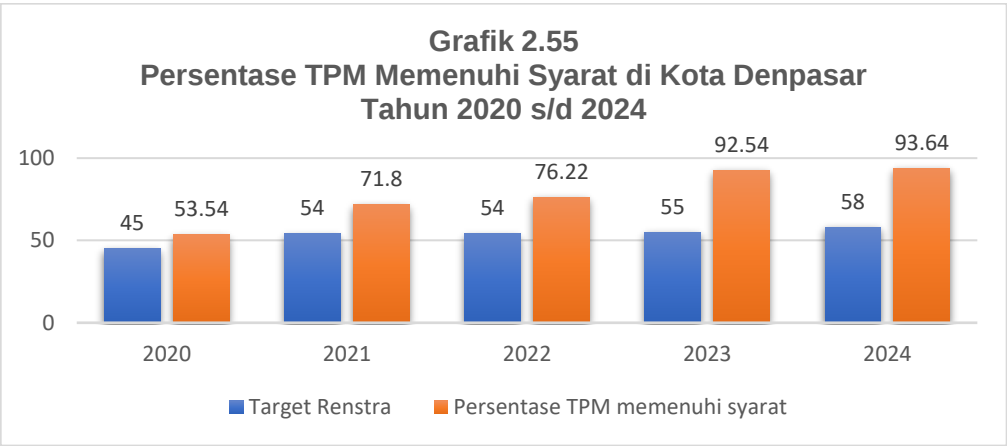


53. Persentase TPM Memenuhi Syarat

Tempat pengelolaan makanan (TPM) yang sekarang diganti menjadi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun non komersial. Setiap produsen/penyedia/penyelenggara pangan olahan siap saji wajib memastikan pangan olahan siap saji yang diproduksi memenuhi SBMKL dan Persyaratan Kesehatan (nilai hasil IKL ≥ 80).

Setiap jasa boga, restoran, TPP tertentu, dan Depot Air Minum (DAM) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Setiap rumah makan, kelompok gerai pangan jajanan, dan sentra pangan jajanan/kantin wajib memiliki label pengawasan/pembinaan.

Tahun 2024 di Kota Denpasar terdapat TPP yang terdaftar antar lain 60 jasa boga, 334 restoran, 26 TPP tertentu, 319 Depot air minum, 680 rumah makan, 113 kelompok gerai pangan jajanan, dan 464 sentra pangan jajanan (kantin). Hasil pemeriksaan di tahun 2024 menunjukkan sebanyak 60 jasa boga (100%), 334 restoran (100%), 26 TPP tertentu (100%), 304 depot air minum (95,30%), 597 rumah makan (87,79%), 101 kelompok gerai pangan jajanan (89,38%), 447 sentra pangan jajanan/kantin (96,34%) sudah memenuhi laik HSP. Secara keseluruhan TPP yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 1869 dari 1996 TPP yang ada di Kota Denpasar atau sebesar 93,64%. Berikut capaian presentase TPM memenuhi syarat di Kota Denpasar tahun 2020 sampai dengan 2024.



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes Kota Dps

Dari grafik diatas TPM yang memenuhi syarat sudah melebihi dari target yang ditetapkan di renstra. Untuk meningkatkan persentase laik HSP atau TPP yang memenuhi syarat kesehatan beberapa hal yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan badan penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan diakui oleh Kemenkes dalam pelatihan penjamah makanan serta melakukan pembinaan teknis dalam pengawasan TPP.

54. Capaian SPM

SPM Kesehatan (Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) adalah ketentuan teknis mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang wajib diterima setiap warga negara secara minimal. SPM Kesehatan mengatur pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan wajib diwujudkan. SPM Kesehatan mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita dan berbagai kelompok usia lainnya serta pelayanan untuk penderita penyakit tertentu.

SPM merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM bidang kesehatan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang meliputi :

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 4) Pelayanan kesehatan balita
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan usia produktif
- 7) Pelayanan kesehatan usia lanjut
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Dalam 5 tahun capaian SPM terus mengalami peningkatan bahkan dari tahun 2022-2024 sudah tercapai 100%, hanya di tahun 2020 dan 2021 capaian SPM masih ada dibawah 100% itu disebabkan karena adanya Covid-19. Berikut capaian SPM tahun 2020 sampai dengan 2024 seperti tabel dibawah ini :



Tabel 2.8

Hasil capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Denpasar

tahun 2020 s/d 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatab Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	96,7	95,65	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	98,7	98,25	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	96	63,78	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	49,48	96,15	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	15,5	88,86	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	63,50	87,26	100	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	8,8	52,75	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	50,35	100	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	45,1	38,16	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	93,18	100	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100 8	86,99	100	100	100

Rekapan pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Denpasar bisa dilihat dari target Renstra Perangkat Daerah, Realisasi capaian dan rasio capaian selama Tahun 2020 s/d 2024 akan disajikan pada tabel 2.9 dibawah ini :



Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Tahun 2020 s/d 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio CapaianTahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	ASPEK KESEJAHTERAAN																
1	Umur Harapan Hidup	tahun	74.87	75	75.26	75.46	75.65	74.82	74.93	75.30	75.59	75.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	4	4	4	4	3	0.16	1.7	0.42	0.49	1.02	0.04	0.43	0.11	0.12	0.34
3	Prevalensi stunting (pendek/sangat pendek) anak 0-5 tahun	%	24.1	10	10	10	10	1.5	9	5.5	10.8	10.4	0.06	0.90	0.55	1.08	1.04
	KESEHATAN																
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	8	1.5	1.5	1.4	1.3	0.6	1	3.6	6.62	10.56	0.08	0.67	2.40	4.73	8.12
5	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	983.15	999.5	999.5	999.6	999.6	999.4	999.5	997.4	994.38	989.7	1.02	1.00	1.00	0.99	0.99
6	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	8	1.5	1.5	1.4	1.3	0.6	1	3.6	6.95	11.97	0.08	0.67	2.40	4.96	9.21
7	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	8	1.5	1.5	1.4	1.3	0.5	0.9	3	6.6	8.36	0.06	0.60	2.00	4.71	6.43
8	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100,000 kelahiran hidup	56	56	56	56	56	49	120	103.19	49.64	123.23	0.88	2.14	1.84	0.89	2.20
9	Rasio Posyandu per satuan Balita	Rasio per 100.000 Penduduk	12	21	21	21.76	22.51	20.39	21	20.98	20.4	20.97	1.70	1.00	1.00	0.94	0.93
10	Rasio Puskesmas	per 100,000 penduduk	1	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.46	1.64	1.14	1.00	1.00	1.28	1.44
11	Rasio Puskesmas Pembantu	per 100,000 penduduk	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	3.34	3.73	1.00	1.00	1.00	1.28	1.43
12	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 100,000 penduduk	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.8	3.07	3.58	1.00	1.00	1.28	1.41	1.64
13	Rasio dokter umum	per 100,000 penduduk	41	41	41.08	42.04	43	51.4	41	41.8	42.04	68.82	1.25	1.00	1.02	1.00	1.60



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio CapaianTahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
14	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	per 100,000 penduduk	467	537	537	561	585	467	537	537	561	1004	1.00	1.00	1.00	1.00	1.72
15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	80	89	89	90	90	88.5	85.9	93.15	97.85	113	1.11	0.97	1.05	1.09	1.26
16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	98.7	98.3	100.7	102.3	104	0.99	0.98	1.01	1.02	1.04
17	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
18	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19	Persentase bayi yang mendapat imunisasi campak	%	100	100	100	100	100	96.6	71.5	95	104.3	97.61	0.97	0.72	0.95	1.04	0.98
20	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	%	100	96	96	96	96	95.4	100.4	94.97	101	96.68	0.95	1.05	0.99	1.05	1.01
21	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk < 15 tahun	10	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	0.45	2.7	1.3	7.7	14	0.05	1.35	0.65	3.85	7.00
22	Cakupan balita pneumonia ditangani	%	100	100	100	100	100	72.7	100	100	100	100	0.73	1.00	1.00	1.00	1.00
23	Cakupan pengobatan semua kasus TBC (Case Detection Rate/CDR)	%	80	55	55	55	95	30	28.72	34	39.3	138	0.38	0.52	0.62	0.71	1.45
24	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (Suscess rate)	%	90	90	90	90	90	90.3	80.9	82.6	84.6	81.5	1.00	0.90	0.92	0.94	0.91
25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
26	Incidence rate (IR) DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	195	195	185	180	175	155.88	58.85	107.71	128.42	194.42	0.80	0.30	0.58	0.71	1.11
27	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100	33	100	100	100	100	0.33	1.00	1.00	1.00	1.00
28	Angka kejadian Malaria	per 1.000 penduduk	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	0.007	0.01	0.01	0.02	0.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio CapaianTahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
29	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	< 0.5	0.21	0.19	0.18	0.18	0.4	0.26	0.26	0.26	0.36	0.80	1.24	1.37	1.44	2.00
30	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi	%	94	77	77	77.5	80	76.8	89.3	97.2	103.2	111.1	0.82	1.16	1.26	1.33	1.39
31	Cakupan puskesmas	%	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
32	Cakupan puskesmas pembantu	%	58.14	58.14	58.14	58.14	58.14	58.14	58.14	58.14	58.14	58.14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
33	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	%	100	100	100	100	100	96.7	95.7	98.63	101.9	104.29	0.97	0.96	0.99	1.02	1.04
34	Cakupan pelayanan ibu nifas	%	100	100	100	100	100	97.1	96.4	99.7	101.8	103.2	0.97	0.96	1.00	1.02	1.03
35	Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani	%	80	85	85	85	85	74.4	102.4	97	96.4	117.7	0.93	1.20	1.14	1.13	1.38
36	Pelayanan kesehatan anak balita	%	100	100	100	100	100	49.5	63.8	86.35	92.9	99.04	0.50	0.64	0.86	0.93	0.99
37	Pelayanan Kesehatan Usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	96.1	99.5	99.67	99.65	100	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00
38	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
39	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
40	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	93.18	100	100	100	98.6	0.93	1.00	1.00	1.00	0.99
41	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	100	100	100	100	100	100	86.99	100	100	100	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00
42	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100	100	100	100	100	15.55	88.9	100	100	100	0.16	0.89	1.00	1.00	1.00
43	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	100	8.8	52.7	100	100	100	0.09	0.53	1.00	1.00	1.00
44	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100	100	100	100	100	50.35	100	100	100	100	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00
45	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100	100	100	100	100	47.5	38.2	100	114.7	100	0.48	0.38	1.00	1.15	1.00



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio CapaianTahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
46	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	%	100	100	100	100	100	96.7	95.7	100.7	101.5	104.95	0.97	0.96	1.01	1.02	1.05
47	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100	100	100	100	98.7	98.3	100.7	102.3	104	0.99	0.98	1.01	1.02	1.04
48	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	104.72	103.2	107.08	1.00	1.00	1.05	1.03	1.07
49	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	100	100	100	100	100	63.5	87.3	99.3	102.5	100	0.64	0.87	0.99	1.03	1.00
50	Persentase Kebersertaan BPJS	%	100	100	100	100	100	91	100	98.93	100	99.28	0.91	1.00	0.99	1.00	0.99
51	Persentase balita stunting	%	24.1	10	10	10	10	1.5	9	5.5	10.8	10.4	0.06	0.90	0.55	1.08	1.04
52	Case Fatality Rate penderita DBD	%	< 1	<1	<1	<1	<1	0.2	0.17	0,73	0,3	0,69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
53	Persentase Rumah tangga yang melaksanakan PHBS	%	100	80	80	80	80	77.42	80	84.77	84.04	83.41	0.77	1.00	1.06	1.05	1.04
54	Persentase TPM memenuhi syarat	%	45	54	54	55	58	53.54	71.8	76.22	92.54	93.64	1.19	1.33	1.41	1.68	1.61



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan (Dinas Kesehatan Kota Denpasar) Kota Denpasar Tahun 2021-2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.485.773.921,00	164.919.355.134,00	299.929.122.759,00	341.750.888.717,00	88.952.571.450,00	153.085.686.197,00	265.993.329.504,53	310.455.387.771,39	0,91	0,93	0,89	0,91	51,91%	51,69%
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>72.977.987.905</i>	<i>141.464.654.585</i>	<i>149.358.042.813</i>	<i>185.043.674.937</i>	<i>68.092.615.931</i>	<i>131.754.980.832</i>	<i>121.115.170.097</i>	<i>160.057.979.513</i>	0,93	0,93	0,81	0,86	36,36%	32,96%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.977.987.905	141.464.654.585	133.425.431.707	185.043.674.937	68.092.615.931	131.754.980.832	105.336.686.030,80	160.057.979.513	0,93	0,93	0,79	0,86	36,36%	32,96%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD WANGAYA	0	0	15.932.611.106	0	0	0	15.778.484.066	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>3.082.324.430</i>	<i>2.957.610.550</i>	<i>2.444.384.088</i>	<i>2.726.214.500</i>	<i>2.099.563.500</i>	<i>2.608.270.068</i>	<i>2.103.804.850</i>	<i>2.383.462.665</i>	0,68	0,88	0,86	0,87	-4,01%	4,32%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.663.404.080	1.525.979.424,00	1.230.805.163,00	1.535.874.000	989.133.000	1.340.194.200	1.041.137.500	1.372.722.065	0,59	0,88	0,85	0,89	-2,62%	11,54%
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	420.722.000,00	453.438.076,00	230.243.318,00	296.523.000	275.412.250	392.022.947	202.991.100	211.868.500	0,65	0,86	0,88	0,71	-11,01%	-8,37%
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	921.920.000,00	907.240.000,00	914.740.000,00	819.200.000	764.266.000	810.461.500	797.657.600	730.300.500	0,83	0,89	0,87	0,89	-3,86%	-1,50%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.858.350,00	64.473.050,00	63.195.607,00	69.517.500	64.332.250	60.191.421	56.618.650	63.471.600	0,92	0,93	0,90	0,91	-0,16%	-0,45%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.420.000,00	6.480.000,00	5.400.000,00	5.100.000	6.420.000	5.400.000	5.400.000	5.100.000	1,00	0,83	1,00	1,00	-7,39%	-7,39%
3	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106.500.000</i>	-	-	-	<i>96.184.260</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,90	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	106.500.000	0	0	0	96.184.260	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,90	#DIV/0!	#DIV/0!
4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>17.746.109.328,00</i>	<i>17.758.764.999,00</i>	<i>19.216.113.857,00</i>	<i>17.925.749.657,00</i>	<i>15.320.819.890,00</i>	<i>16.218.560.518,00</i>	<i>16.587.671.964,00</i>	<i>13.549.494.056,00</i>	0,86	0,91	0,86	0,76	0,34%	-4,01%
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	2.668.900.000	2.571.790.000	0	0	1.140.108.231	1.340.970.730	#DIV/0!	#DIV/0!	0,43	0,52	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.746.109.328,00	17.758.764.999,00	16.547.213.857	15.353.959.657	15.320.819.890	16.218.560.518	15.447.563.733	12.208.523.326	0,86	0,91	0,93	0,80	-4,71%	-7,29%
5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>3.679.352.258,00</i>	<i>2.738.325.000,00</i>	<i>3.239.411.000,00</i>	<i>1.596.377.000,00</i>	<i>3.439.572.129,00</i>	<i>2.503.874.779,00</i>	<i>2.961.072.409,00</i>	<i>1.344.919.410,00</i>	0,93	0,91	0,91	0,84	-24,30%	-26,88%
11	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1.230.275.000	1.703.325.000	1.277.715.000	1.426.377.000	1.014.975.200	1.501.836.206	1.051.916.100	1.181.642.600	0,82	0,88	0,82	0,83	5,05%	5,20%
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.449.077.258	1.035.000.000	1.961.696.000	170.000.000	2.424.596.929	1.002.038.573	1.909.156.309	163.276.810	0,99	0,97	0,97	0,96	-58,90%	-59,32%
6	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.671.171.001,00</i>	<i>134.352.372.623,00</i>	-	-	<i>123.225.610.184,73</i>	<i>133.023.347.867,39</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,98	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	0	125.671.171.001	134.352.372.623	0	0	123.225.610.185	133.023.347.867	#DIV/0!	#DIV/0!	0,98	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	112.642.864.735,00	250.053.057.904,00	112.277.787.638,00	135.519.585.155,00	79.713.511.081,00	222.933.274.059,28	94.232.101.910,10	119.299.326.837,62	0,71	0,89	0,84	0,88	6,36%	14,38%
7	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>11.963.052.652,00</i>	<i>8.997.677.598,00</i>	<i>19.467.481.169,00</i>	<i>32.321.829.617,00</i>	<i>7.498.482.765,00</i>	<i>4.810.395.006,00</i>	<i>15.951.176.852,00</i>	<i>26.538.396.483,00</i>	0,63	0,53	0,82	0,82	39,28%	52,39%
14	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.800.000.000,00	1.093.420.011,00	765.000.000,00	0	956.855.999,00	860.954.118,00	704.960.000,00	0	0,53	0,79	0,92	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
15	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	0	0	1.729.924.000	0	0	0	1.604.891.038	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,93	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
16	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.016.500.000,00	908.679.874,00	5.348.794.376,00	4.281.160.000	1.444.440.000	788.199.380	4.700.612.208	3.839.790.667	0,72	0,87	0,88	0,90	28,53%	38,53%
17	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan WANGAYA	0	0	7.000.000.000,00	13.831.888.481	0	0	6.495.136.833	12.932.357.562	#DIV/0!	#DIV/0!	0,93	0,93	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0	447.021.000	0	0	0	267.456.457	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,60	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Pengadaan Obat, Vaksin	4.046.801.047	4.216.611.287	2.585.980.177	0	1.916.948.523	1.710.409.241	1.710.793.683	0	0,47	0,41	0,66	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
20	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.867.292.019	2.337.750.426	3.436.955.616	0	3.049.140.392	1.176.326.114	2.123.317.296	0	0,79	0,50	0,62	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
21	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	221.407.586	347.550.000	330.751.000	0	120.278.011	193.220.553	216.356.832	0	0,54	0,56	0,65	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
22	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0	0	0	11.997.304.936	0	0	0	7.859.369.559	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,66	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	11.052.000,00	93.666.000,00	0	34.531.200	10.819.840	81.285.600	0	34.531.200	0,98	0,87	#DIV/0!	1,00	46,19%	47,23%
8	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.150.502.083,00	241.055.380.306,00	92.597.481.686,00	102.883.449.088,00	71.967.806.816,00	216.270.286.932,28	78.084.760.090,10	92.461.484.579,62	0,72	0,90	0,84	0,90	0,90%	8,71%
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.990.046,00	282.066.566,00	33.150.884,00	46.949.000	68.955.500	258.551.500	32.725.000	46.949.000	0,70	0,92	0,99	1,00	-21,75%	-12,03%
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil I Denpasar Timur	0	0	56.460.000,00	10.560.000	0	0	56.300.000	8.360.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,79	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil II Denpasar Timur	0	0	55.480.000,00	13.600.000	0	0	48.680.000	13.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,88	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil I Denpasar Barat	0	0	11.560.000,00	1.520.000	0	0	11.560.000	1.520.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil II Denpasar Barat	0	0	32.860.000,00	8.480.000	0	0	26.900.000	8.480.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,82	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil I Denpasar Selatan	0	0	2.280.000,00	1.760.000	0	0	2.280.000	1.760.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil II Denpasar Selatan	0	0	13.050.000,00	12.980.000	0	0	12.410.000	12.980.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,95	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil III Denpasar Selatan	0	0	53.460.000,00	900.000	0	0	53.460.000	900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil IV Denpasar Selatan	0	0	9.120.000,00	10.800.000	0	0	9.120.000	10.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil I Denpasar Utara	0	0	27.180.000,00	1.520.000	0	0	27.180.000	1.520.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil II Denpasar Utara	0	0	6.410.000,00	1.760.000	0	0	3.610.000	1.760.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,56	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil III Denpasar Utara	0	0	34.680.000,00	8.800.000	0	0	34.640.000	8.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.353.890.792,00	570.904.450,00	271.802.450,00	443.420.000	649.573.418	420.612.175	270.498.750	442.311.000	0,48	0,74	1,00	1,00	-31,07%	-12,02%
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin I Denpasar Timur	0	0	0	7.860.000	0	0	0	3.780.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,48	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin II Denpasar Timur	0	0	0	18.210.000	0	0	0	18.210.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin I Denpasar Barat	0	0	0	4.120.000	0	0	0	3.290.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,80	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin II Denpasar Barat	0	0	0	10.820.000	0	0	0	9.940.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin I Denpasar Selatan	0	0	0	19.740.000	0	0	0	19.740.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin II Denpasar Selatan	0	0	0	19.950.000	0	0	0	8.240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,41	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin III Denpasar Selatan	0	0	0	8.750.000	0	0	0	8.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,96	#DIV/0!	#DIV/0!
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin IV Denpasar Selatan	0	0	0	5.270.000	0	0	0	5.270.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin I Denpasar Utara	0	0	0	7.940.000	0	0	0	7.940.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin II Denpasar Utara	0	0	0	1.640.000	0	0	0	1.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin III Denpasar Utara	0	0	0	1.890.000	0	0	0	1.750.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,93	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	78.310.528,00	106.951.500,00	92.701.200,00	432.482.800	67.239.363	106.287.669	88.336.000	194.074.500	0,86	0,99	0,95	0,45	76,76%	42,38%
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.918.766.786,00	8.301.790.000,00	183.112.213,00	314.939.000	1.588.848.710	4.670.738.300	182.777.050	302.823.500	0,54	0,56	1,00	0,96	-52,39%	-42,45%
50	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Denbar	0	0	15.920.000,00	0	0	0	15.600.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Denbar	0	0	57.060.000,00	0	0	0	32.620.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
52	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Dentim	0	0	3.200.000,00	0	0	0	3.200.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Dentim	0	0	14.400.000,00	0	0	0	6.960.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Densel	0	0	7.920.000,00	0	0	0	7.920.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
55	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Densel	0	0	9.120.000,00	0	0	0	8.960.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
56	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk IV Densel	0	0	5.040.000,00	0	0	0	5.040.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
57	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk I Denut	0	0	6.740.000,00	0	0	0	6.740.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
58	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk II Denut	0	0	16.240.000,00	0	0	0	15.193.500	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
59	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Pusk III Denut	0	0	26.080.000,00	0	0	0	26.080.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	599.223.082,00	894.300.500,00	423.878.190,00	398.559.682	385.617.588	806.544.970	402.411.550	390.328.950	0,64	0,90	0,95	0,98	-12,71%	0,41%
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar I Denpasar Timur	0	0	43.680.000,00	52.960.000	0	0	42.360.000	52.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,97	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar II Denpasar Timur	0	0	30.800.000,00	35.600.000	0	0	27.960.000	33.920.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,91	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar I Denpasar Barat	0	0	24.800.000,00	17.000.000	0	0	24.600.000	17.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar II Denpasar Barat	0	0	24.600.000,00	24.400.000	0	0	18.400.000	24.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,75	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar I Denpasar Selatan	0	0	8.640.000,00	22.400.000	0	0	8.640.000	22.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar II Denpasar Selatan	0	0	20.200.000,00	45.800.000	0	0	20.200.000	45.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar III Denpasar Selatan	0	0	5.800.000,00	15.520.000	0	0	5.800.000	15.160.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!
68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar IV Denpasar Selatan	0	0	4.800.000,00	13.440.000	0	0	4.800.000	13.440.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar I Denpasar Utara	0	0	11.200.000,00	14.480.000	0	0	11.200.000	14.320.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar II Denpasar Utara	0	0	19.360.000,00	57.680.000	0	0	18.560.000	53.520.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,96	0,93	#DIV/0!	#DIV/0!
71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar III Denpasar Utara	0	0	21.600.000,00	21.600.000	0	0	21.600.000	21.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	489.125.220,00	725.525.220,00	2.235.472.220,00	1.220.841.050	363.749.350	279.234.935	913.694.300	971.128.000	0,74	0,38	0,41	0,80	35,65%	38,73%
73	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denbar	0	0	3.040.000,00	0	0	0	880.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
74	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denbar	0	0	83.060.000,00	0	0	0	75.100.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
75	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Dentim	0	0	14.400.000,00	0	0	0	13.480.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
76	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Dentim	0	0	2.800.000,00	0	0	0	2.800.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
77	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Densel	0	0	36.600.000,00	0	0	0	36.600.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
78	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Densel	0	0	2.800.000,00	0	0	0	2.640.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
79	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk I Denut	0	0	6.200.000,00	0	0	0	6.200.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
80	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk II Denut	0	0	8.480.000,00	0	0	0	8.400.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
81	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Pusk III Denut	0	0	7.640.000,00	0	0	0	7.640.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	49.030.280,00	334.040.050,00	163.233.650,00	388.175.000	31.341.060	276.835.116	155.712.000	351.047.300	0,64	0,83	0,95	0,90	99,31%	123,74%
83	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk I Denbar	0	0	9.540.000,00	0	0	0	9.540.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
84	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk II Denbar	0	0	47.200.000,00	0	0	0	47.200.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
85	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk I Dentim	0	0	54.590.000,00	0	0	0	37.540.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
86	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk II Dentim	0	0	24.090.000,00	0	0	0	22.730.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
87	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk I Densel	0	0	32.340.000,00	0	0	0	32.340.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
88	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk II Densel	0	0	28.220.000,00	0	0	0	28.220.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
89	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk III Densel	0	0	10.920.000,00	0	0	0	10.465.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
90	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk IV Densel	0	0	46.420.000,00	0	0	0	46.420.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
91	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk I Denut	0	0	95.990.000,00	0	0	0	87.890.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
92	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pusk III Denut	0	0	36.975.000,00	0	0	0	36.975.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	0	153.916.000,00	2.255.904.888	0	0	145.948.400	1.911.683.100	#DIV/0!	#DIV/0!	0,95	0,85	#DIV/0!	#DIV/0!
94	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	116.710.000,00	116.710.000,00	1.083.510.000,00	1.846.354.000	115.542.900	110.729.160	680.030.500	1.627.071.000	0,99	0,95	0,63	0,88	151,04%	141,48%
95	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	16.830.000,00	13.979.900	0	0	11.157.500	12.724.800	#DIV/0!	#DIV/0!	0,66	0,91	#DIV/0!	#DIV/0!
96	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk I Denbar	0	0	9.600.000,00	0	0	0	9.600.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
97	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk II Denbar	0	0	1.600.000,00	0	0	0	800.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
98	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk I Dentim	0	0	7.680.000,00	0	0	0	3.200.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
99	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk II Dentim	0	0	39.360.000,00	0	0	0	37.320.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
100	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk II Densel	0	0	5.400.000,00	0	0	0	5.400.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
101	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk III Densel	0	0	1.920.000,00	0	0	0	1.920.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
102	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk IV Densel	0	0	2.160.000,00	0	0	0	2.160.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
103	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk I Denut	0	0	1.440.000,00	0	0	0	1.440.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
104	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pusk III Denut	0	0	9.600.000,00	0	0	0	9.600.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
105	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis	716.006.540,00	745.910.051,00	758.461.117,00	2.197.637.562	565.291.502	573.222.412	679.991.022	2.049.876.269	0,79	0,77	0,90	0,93	45,33%	53,63%
106	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis I Denpasar Timur	0	0	2.640.000,00	2.640.000	0	0	2.640.000	2.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
107	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis II Denpasar Timur	0	0	3.200.000,00	3.520.000	0	0	2.560.000	2.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,80	0,75	#DIV/0!	#DIV/0!
108	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis I Denpasar Barat	0	0	1.600.000,00	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
109	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis II Denpasar Barat	0	0	12.480.000,00	10.680.000	0	0	12.240.000	9.720.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,98	0,91	#DIV/0!	#DIV/0!
110	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis I Denpasar Selatan	0	0	1.680.000,00	1.760.000	0	0	1.680.000	1.760.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
111	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis II Denpasar Selatan	0	0	2.640.000,00	2.640.000	0	0	2.640.000	2.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
112	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis III Denpasar Selatan	0	0	2.880.000,00	4.320.000	0	0	2.880.000	4.320.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
113	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis IV Denpasar Selatan	0	0	40.000,00	3.240.000	0	0	40.000	3.240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
114	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis I Denpasar Utara	0	0	10.560.000,00	10.560.000	0	0	10.560.000	10.560.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
115	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis II Denpasar Utara	0	0	3.000.000,00	2.000.000	0	0	800.000	2.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,27	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
116	Pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis III Denpasar Utara	0	0	1.800.000,00	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	753.303.376,00	1.003.774.585,00	1.208.159.849,00	1.529.429.572	726.049.654	967.393.645	1.034.190.418	1.458.947.300	0,96	0,96	0,86	0,95	26,63%	26,19%
118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV I Denpasar Timur	0	0	6.240.000,00	1.920.000	0	0	5.200.000	1.920.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,83	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV II Denpasar Timur	0	0	1.120.000,00	4.000.000	0	0	1.120.000	4.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV I Denpasar Barat	0	0	0	960.000	0	0	0	960.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV II Denpasar Barat	0	0	1.200.000,00	3.200.000	0	0	1.200.000	3.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
122	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV I Denpasar Selatan	0	0	0	1.280.000	0	0	0	1.280.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV II Denpasar Selatan	0	0	0	3.200.000	0	0	0	3.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV III Denpasar Selatan	0	0	2.000.000,00	640.000	0	0	1.960.000	640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,98	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV IV Denpasar Selatan	0	0	400.000,00	2.400.000	0	0	400.000	2.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV I Denpasar Utara	0	0	8.800.000,00	4.800.000	0	0	8.800.000	4.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV II Denpasar Utara	0	0	0	640.000	0	0	0	640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV III Denpasar Utara	0	0	3.920.000,00	800.000	0	0	3.920.000	800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.582.920.333,00	586.425.000,00	0	0	1.178.487.816	581.055.000	0	0	0,46	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
130	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	19.585.556.511,00	0	0	0	8.576.099.520	0	0	0	0,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
131	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	449.221.566,00	1.089.012.590,00	193.016.440,00	5.561.440.350	376.521.268	990.290.948	183.202.590	5.181.063.700	0,84	0,91	0,95	0,93	131,34%	139,63%
132	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat I Denpasar Timur	0	0	23.960.000,00	194.572.000	0	0	23.400.000	97.969.876	#DIV/0!	#DIV/0!	0,98	0,50	#DIV/0!	#DIV/0!
133	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat II Denpasar Timur	0	0	139.905.000,00	221.576.000	0	0	129.640.000	19.720.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,93	0,09	#DIV/0!	#DIV/0!
134	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat I Denpasar Barat	0	0	27.240.000,00	207.224.000	0	0	5.270.000	45.240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,19	0,22	#DIV/0!	#DIV/0!
135	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat II Denpasar Barat	0	0	9.860.000,00	231.064.000	0	0	9.460.000	73.559.400	#DIV/0!	#DIV/0!	0,96	0,32	#DIV/0!	#DIV/0!
136	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat I Denpasar Selatan	0	0	23.760.000,00	201.392.000	0	0	23.760.000	39.240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,19	#DIV/0!	#DIV/0!
137	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat II Denpasar Selatan	0	0	19.860.000,00	197.680.000	0	0	19.860.000	87.186.525	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,44	#DIV/0!	#DIV/0!
138	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat III Denpasar Selatan	0	0	32.815.000,00	177.680.000	0	0	28.810.000	59.852.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,88	0,34	#DIV/0!	#DIV/0!
139	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat IV Denpasar Selatan	0	0	1.410.000,00	210.656.000	0	0	1.410.000	15.940.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,08	#DIV/0!	#DIV/0!
140	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat I Denpasar Utara	0	0	55.299.970,00	211.364.000	0	0	46.460.000	34.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,84	0,16	#DIV/0!	#DIV/0!
141	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat II Denpasar Utara	0	0	18.720.000,00	189.684.000	0	0	15.766.500	78.945.415	#DIV/0!	#DIV/0!	0,84	0,42	#DIV/0!	#DIV/0!
142	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat III Denpasar Utara	0	0	10.820.000,00	209.700.000	0	0	10.820.000	55.140.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,26	#DIV/0!	#DIV/0!
143	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.534.000,00	271.962.500,00	10.792.500,00	12.170.000	6.655.000	196.670.000	10.787.500	12.170.000	0,31	0,72	1,00	1,00	-17,32%	22,29%
144	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk I Denbar	0	0	10.470.000,00	0	0	0	6.080.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
145	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk II Denbar	0	0	67.400.000,00	0	0	0	53.860.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
146	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk II Dentim	0	0	60.730.000,00	0	0	0	60.730.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
147	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk III Densel	0	0	15.725.000,00	0	0	0	15.725.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
148	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk IV Densel	0	0	1.565.000,00	0	0	0	1.365.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
149	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk I Denut	0	0	19.695.197,00	0	0	0	17.650.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
150	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Pusk III Denut	0	0	37.615.000,00	0	0	0	37.615.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
151	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	597.595.924,00	599.835.000,00	210.220.000,00	629.735.000	548.624.050	517.047.708	210.170.000	625.124.000	0,92	0,86	1,00	0,99	1,76%	4,45%
152	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan I Denpasar Timur	0	0	17.200.000,00	18.800.000	0	0	17.200.000	18.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
153	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan II Denpasar Timur	0	0	17.680.000,00	16.400.000	0	0	16.400.000	16.160.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,93	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!
154	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan I Denpasar Barat	0	0	15.040.000,00	10.000.000	0	0	14.240.000	10.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,95	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
155	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan II Denpasar Barat	0	0	16.480.000,00	20.000.000	0	0	16.240.000	20.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
156	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan I Denpasar Selatan	0	0	1.560.000,00	3.800.000	0	0	1.560.000	3.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
157	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungant II Denpasar Selatan	0	0	13.040.000,00	15.040.000	0	0	13.040.000	15.040.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
158	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan III Denpasar Selatan	0	0	3.360.000,00	9.360.000	0	0	3.360.000	9.360.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
159	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan IV Denpasar Selatan	0	0	10.080.000,00	9.440.000	0	0	10.080.000	9.440.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
160	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan I Denpasar Utara	0	0	6.800.000,00	8.000.000	0	0	6.800.000	8.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
161	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan II Denpasar Utara	0	0	21.280.000,00	18.320.000	0	0	19.920.000	18.320.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,94	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
162	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan III Denpasar Utara	0	0	19.440.000,00	17.440.000	0	0	19.440.000	17.440.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
163	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	529.709.302,00	1.067.028.800,00	302.984.606,00	334.404.750	326.224.145	787.202.234	276.896.000	319.341.500	0,62	0,74	0,91	0,95	-14,21%	-0,71%
164	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denbar	0	0	68.440.000,00	0	0	0	62.930.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
165	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denbar	0	0	125.882.500,00	0	0	0	76.473.550	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
166	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Dentim	0	0	235.284.080,00	0	0	0	177.464.080	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
167	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Dentim	0	0	6.450.000,00	0	0	0	6.450.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
168	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Densel	0	0	210.090.000,00	0	0	0	210.090.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
169	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Densel	0	0	137.970.000,00	0	0	0	137.970.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
170	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Densel	0	0	1.920.000,00	0	0	0	1.920.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
171	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk I Denut	0	0	23.520.000,00	0	0	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
172	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk II Denut	0	0	49.900.000,00	0	0	0	49.720.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
173	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Pusk III Denut	0	0	61.950.000,00	0	0	0	61.950.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
174	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	45.958.200,00	184.920.000,00	213.847.750,00	169.447.000	39.508.000	156.030.846	171.049.350	160.207.000	0,86	0,84	0,80	0,95	54,49%	59,47%
175	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	234.678.550,00	1.107.543.728,00	891.861.900,00	884.389.856	117.739.819	79.185.000	543.469.800	686.841.830	0,50	0,07	0,61	0,78	55,62%	80,02%
176	Pengelolaan Surveilans Kesehatan I Denpasar Timur	0	0	29.680.000,00	16.340.000	0	0	13.920.000	15.620.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,47	0,96	#DIV/0!	#DIV/0!
177	Pengelolaan Surveilans Kesehatan II Denpasar Timur	0	0	9.560.000,00	12.400.000	0	0	6.040.000	10.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,63	0,81	#DIV/0!	#DIV/0!
178	Pengelolaan Surveilans Kesehatan I Denpasar Barat	0	0	29.200.000,00	17.770.000	0	0	2.560.000	15.530.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,09	0,87	#DIV/0!	#DIV/0!
179	Pengelolaan Surveilans Kesehatan II Denpasar Barat	0	0	13.280.000,00	35.860.000	0	0	3.120.000	29.460.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,23	0,82	#DIV/0!	#DIV/0!
180	Pengelolaan Surveilans Kesehatan I Denpasar Selatan	0	0	0	11.640.000	0	0	0	11.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
181	Pengelolaan Surveilans Kesehatan II Denpasar Selatan	0	0	1.200.000,00	17.980.000	0	0	360.000	8.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,30	0,47	#DIV/0!	#DIV/0!
182	Pengelolaan Surveilans Kesehatan III Denpasar Selatan	0	0	3.200.000,00	20.610.000	0	0	2.400.000	20.610.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,75	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
183	Pengelolaan Surveilans Kesehatan IV Denpasar Selatan	0	0	800.000,00	9.700.000	0	0	640.000	8.260.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,80	0,85	#DIV/0!	#DIV/0!
184	Pengelolaan Surveilans Kesehatan I Denpasar Utara	0	0	4.440.000,00	18.940.000	0	0	1.080.000	17.980.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,24	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!
185	Pengelolaan Surveilans Kesehatan II Denpasar Utara	0	0	38.680.000,00	44.760.000	0	0	400.000	40.920.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,01	0,91	#DIV/0!	#DIV/0!
186	Pengelolaan Surveilans Kesehatan III Denpasar Utara	0	0	1.760.000,00	27.840.000	0	0	1.440.000	27.360.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,82	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!
187	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	457.080.750,00	613.202.000,00	640.683.000,00	483.520.000	153.676.000	473.855.925	570.739.000	385.310.000	0,34	0,77	0,89	0,80	1,89%	35,85%
188	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk II Denbar	0	0	6.000.000,00	0	0	0	2.560.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
189	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk I Dentim	0	0	480.000,00	0	0	0	120.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
190	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk II Dentim	0	0	2.800.000,00	0	0	0	2.800.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
191	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk II Densel	0	0	2.520.000,00	0	0	0	2.520.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
192	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk III Densel	0	0	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
193	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk IV Densel	0	0	1.120.000,00	0	0	0	1.120.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
194	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk I Denut	0	0	5.880.000,00	0	0	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
195	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Pusk III Denut	0	0	840.000,00	0	0	0	840.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
196	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.689.508.200,00	473.855.925,00	3.183.098.066,00	0	1.654.031.750	1.883.707.430	3.116.013.424	0	0,98	3,98	0,98	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
197	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10.747.969.126,00	16.891.291.943,00	19.893.434.977,00	15.363.705.274	9.231.362.131	13.186.612.201	12.454.763.141	12.751.811.807	0,86	0,78	0,63	0,83	12,65%	11,37%
198	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular I Denpasar Timur	0	0	85.840.000,00	110.600.000	0	0	85.320.000	103.440.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	0,94	#DIV/0!	#DIV/0!
199	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular II Denpasar Timur	0	0	75.000.000,00	112.880.000	0	0	72.200.000	97.280.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,96	0,86	#DIV/0!	#DIV/0!
200	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular I Denpasar Barat	0	0	254.720.000,00	133.200.000	0	0	207.160.000	100.040.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,81	0,75	#DIV/0!	#DIV/0!
201	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular II Denpasar Barat	0	0	75.200.950,00	109.680.000	0	0	65.960.950	104.320.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,88	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!
202	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular I Denpasar Selatan	0	0	18.240.000,00	34.760.000	0	0	13.120.000	34.160.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,72	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!
203	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular II Denpasar Selatan	0	0	75.565.000,00	103.520.000	0	0	73.165.000	77.920.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,97	0,75	#DIV/0!	#DIV/0!
204	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular III Denpasar Selatan	0	0	34.360.000,00	68.600.000	0	0	32.440.000	65.040.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,94	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!
205	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular IV Denpasar Selatan	0	0	12.560.000,00	73.880.000	0	0	12.320.000	68.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,98	0,93	#DIV/0!	#DIV/0!
206	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular I Denpasar Utara	0	0	94.460.000,00	117.000.000	0	0	93.520.000	116.320.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!
207	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular II Denpasar Utara	0	0	103.480.000,00	80.880.000	0	0	96.920.000	76.760.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,94	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!
208	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular III Denpasar Utara	0	0	104.200.000,00	108.720.000	0	0	104.200.000	108.720.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
209	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36.879.707.849,00	45.820.518.594,00	42.850.685.900,00	45.983.927.400	33.412.016.500	40.291.198.200	41.566.044.750	45.021.310.300	0,91	0,88	0,97	0,98	7,63%	10,45%
210	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
211	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Pusk Denbar II)	0	0	800.000,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
212	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	119.069.800,00	265.130.000,00	120.515.000,00	141.339.000	20.773.325	70.948.200	94.602.841	124.590.000	0,17	0,27	0,78	0,88	5,88%	81,69%
213	Operasional pelayanan rumah sakit	0	151.694.139.784,00	0	0	0	143.661.063.990,28	0	0	#DIV/0!	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
214	Operasional Pelayanan Puskesmas I Dentim	1.167.435.335,00	837.298.880,00	1.287.267.124,00	1.240.427.200	815.720.476	701.556.385	1.091.135.530	982.676.198	0,70	0,84	0,85	0,79	2,04%	6,40%
215	Operasional Pelayanan Puskesmas II Dentim	879.903.784,00	578.009.880,00	913.157.970,00	915.619.600	564.781.407	370.872.060	708.824.422	603.926.598	0,64	0,64	0,78	0,66	1,34%	2,26%
216	Operasional Pelayanan Puskesmas I Denbar	1.006.524.877,00	765.511.600,00	1.141.439.056,00	1.245.008.000	605.010.372	476.595.901	913.161.421	1.016.242.323	0,60	0,62	0,80	0,82	7,35%	18,87%
217	Operasional Pelayanan Puskesmas II Denbar	997.188.050,00	760.854.620,00	1.216.635.240,00	1.219.319.200	710.568.211	541.163.831	942.020.426	923.752.439	0,71	0,71	0,77	0,76	6,93%	9,14%
218	Operasional Pelayanan Puskesmas I Densel	779.509.117,00	515.009.080,00	762.748.296,00	918.634.400	561.471.306	323.676.802	613.920.223	779.831.062	0,72	0,63	0,80	0,85	5,63%	11,57%
219	Operasional Pelayanan Puskesmas II Densel	530.252.624,00	414.123.040,00	659.726.150,00	734.159.200	405.381.471	351.820.877	551.442.964	595.218.763	0,76	0,85	0,84	0,81	11,46%	13,66%
220	Operasional Pelayanan Puskesmas III Densel	466.712.727,00	397.139.480,00	503.440.723,00	672.029.600	321.530.650	293.544.861	376.449.947	539.037.745	0,69	0,74	0,75	0,80	12,92%	18,80%
221	Operasional Pelayanan Puskesmas IV Densel	712.648.049,00	485.190.660,00	678.673.377,00	771.216.000	431.589.913	306.784.532	525.806.880	518.662.513	0,61	0,63	0,77	0,67	2,67%	6,32%
222	Operasional Pelayanan Puskesmas I Denut	899.334.224,00	571.260.960,00	866.481.378,00	926.199.200	552.501.434	439.957.222	674.496.654	649.167.859	0,61	0,77	0,78	0,70	0,99%	5,52%
223	Operasional Pelayanan Puskesmas II Denut	650.061.620,00	581.159.640,00	817.575.820,00	941.009.200	465.226.240	371.282.051	614.350.531	691.228.070	0,72	0,64	0,75	0,73	13,12%	14,11%
224	Operasional Pelayanan Puskesmas III Denut	1.028.227.699,00	847.736.680,00	1.009.421.759,00	1.284.960.800	751.833.317	651.714.846	836.110.916	980.722.975	0,73	0,77	0,83	0,76	7,71%	9,26%
225	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.707.797.216,00	0	0	12.150.000	5.578.263.650	0	0	12.150.000	0,57	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	-89,22%	-87,04%
226	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya I Denpasar Timur	0	0	0	3.880.000	0	0	0	3.460.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,89	#DIV/0!	#DIV/0!
227	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya II Denpasar Timur	0	0	0	3.870.000	0	0	0	2.020.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,52	#DIV/0!	#DIV/0!
228	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya I Denpasar Barat	0	0	0	7.790.000	0	0	0	3.440.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,44	#DIV/0!	#DIV/0!
229	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya II Denpasar Barat	0	0	0	11.690.000	0	0	0	7.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,60	#DIV/0!	#DIV/0!
230	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya III Denpasar Selatan	0	0	0	7.760.000	0	0	0	7.760.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
231	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya I Denpasar Utara	0	0	0	11.670.000	0	0	0	7.780.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,67	#DIV/0!	#DIV/0!
232	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya II Denpasar Utara	0	0	0	7.790.000	0	0	0	6.990.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,90	#DIV/0!	#DIV/0!
233	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya III Denpasar Utara	0	0	0	7.790.000	0	0	0	7.790.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
234	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	212.040.000,00	470.067.000,00	485.939.146,00	242.439.700	0	12.100.000	385.360.360	229.479.700	-	0,03	0,79	0,95	4,57%	#DIV/0!
235	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	85.180.000,00	0	0	0	84.200.000	0	0	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
236	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	2.475.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
237	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) I Denpasar Timur	0	0	480.000,00	480.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
238	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) II Denpasar Timur	0	0	1.760.000,00	2.640.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
239	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) I Denpasar Barat	0	0	2.400.000,00	600.000	0	0	0	120.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,20	#DIV/0!	#DIV/0!
240	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) II Denpasar Barat	0	0	480.000,00	360.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
241	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) II Denpasar Selatan	0	0	240.000,00	1.440.000	0	0	160.000	1.040.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,67	0,72	#DIV/0!	#DIV/0!
242	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) III Denpasar Selatan	0	0	40.000,00	360.000	0	0	0	240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,67	#DIV/0!	#DIV/0!
243	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) IV Denpasar Selatan	0	0	80.000,00	40.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
244	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) I Denpasar Utara	0	0	2.640.000,00	1.760.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
245	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) II Denpasar Utara	0	0	0	280.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
246	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) III Denpasar Utara	0	0	240.000,00	80.000	0	0	0	80.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
247	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0	0	0	3.117.860.000	0	0	0	3.055.189.325	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!
248	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	0	1.040.331.491,00	800.378.000	0	0	1.002.951.575	782.418.050	#DIV/0!	#DIV/0!	0,96	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!
249	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis I Denpasar Timur	0	0	2.640.000,00	2.640.000	0	0	2.640.000	2.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
250	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis II Denpasar Timur	0	0	2.640.000,00	7.680.000	0	0	2.640.000	6.160.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,80	#DIV/0!	#DIV/0!
251	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis I Denpasar Barat	0	0	1.600.000,00	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
252	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis II Denpasar Barat	0	0	7.200.000,00	7.200.000	0	0	7.200.000	6.720.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,93	#DIV/0!	#DIV/0!
253	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis I Denpasar Selatan	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
254	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis II Denpasar Selatan	0	0	2.640.000,00	2.640.000	0	0	2.640.000	2.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
255	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis III Denpasar Selatan	0	0	2.880.000,00	4.320.000	0	0	2.880.000	4.320.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
256	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis IV Denpasar Selatan	0	0	80.000,00	720.000	0	0	80.000	720.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
257	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis I Denpasar Utara	0	0	3.960.000,00	3.960.000	0	0	3.960.000	3.960.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
258	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis II Denpasar Utara	0	0	1.440.000,00	1.440.000	0	0	1.440.000	1.440.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
259	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis III Denpasar Utara	0	0	2.640.000,00	1.440.000	0	0	2.640.000	1.440.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
260	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0	0	1.927.538.547,00	1.517.760.904	0	0	1.427.142.275	1.285.506.610	#DIV/0!	#DIV/0!	0,74	0,85	#DIV/0!	#DIV/0!
261	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) I Denpasar Timur	0	0	0	2.640.000	0	0	0	2.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
262	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) II Denpasar Timur	0	0	0	6.720.000	0	0	0	6.720.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
263	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) I Denpasar Barat	0	0	0	6.400.000	0	0	0	6.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
264	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) II Denpasar Barat	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
265	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) II Denpasar Selatan	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
266	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) III Denpasar Selatan	0	0	0	960.000	0	0	0	960.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
267	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) IV Denpasar Selatan	0	0	0	880.000	0	0	0	880.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
268	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) I Denpasar Utara	0	0	0	2.640.000	0	0	0	2.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
269	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) II Denpasar Utara	0	0	0	640.000	0	0	0	640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
270	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) III Denpasar Utara	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
271	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	0	1.050.000,00	28.585.000	0	0	1.046.500	23.526.278	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,82	#DIV/0!	#DIV/0!
272	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk I Denbar	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
273	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk I Dentim	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
274	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk II Dentim	0	0	520.000,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
275	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk II Densel	0	0	7.040.000,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
276	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk III Densel	0	0	2.160.000,00	0	0	0	2.160.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
277	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk IV Densel	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
278	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria Pusk I Denut	0	0	1.440.000,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
279	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas I Denpasar Timur	0	0	0	21.240.000	0	0	0	21.240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
280	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas II Denpasar Timur	0	0	0	51.160.000	0	0	0	51.160.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
281	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas I Denpasar Barat	0	0	0	70.060.000	0	0	0	70.060.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
282	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas II Denpasar Barat	0	0	0	135.240.000	0	0	0	135.240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
283	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas I Denpasar Selatan	0	0	0	94.120.000	0	0	0	94.120.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
284	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas II Denpasar Selatan	0	0	0	79.560.000	0	0	0	79.560.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
285	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas III Denpasar Selatan	0	0	0	80.920.000	0	0	0	76.690.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!
286	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas IV Denpasar Selatan	0	0	0	4.440.000	0	0	0	4.440.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
287	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas I Denpasar Utara	0	0	0	95.370.000	0	0	0	95.370.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
288	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas II Denpasar Utara	0	0	0	102.300.000	0	0	0	101.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!
289	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas III Denpasar Utara	0	0	0	90.780.000	0	0	0	90.780.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
290	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	0	0	41.015.000	0	0	0	41.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
291	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak I Denpasar Timur	0	0	0	67.440.000	0	0	0	67.440.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
292	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak II Denpasar Timur	0	0	0	42.560.000	0	0	0	36.320.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,85	#DIV/0!	#DIV/0!
293	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak I Denpasar Barat	0	0	0	82.440.000	0	0	0	52.120.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,63	#DIV/0!	#DIV/0!
294	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak II Denpasar Barat	0	0	0	16.160.000	0	0	0	16.080.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
295	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak I Denpasar Selatan	0	0	0	15.520.000	0	0	0	15.520.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
296	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak II Denpasar Selatan	0	0	0	23.860.000	0	0	0	23.860.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
297	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak III Denpasar Selatan	0	0	0	31.780.000	0	0	0	31.460.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!
298	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak IV Denpasar Selatan	0	0	0	24.000.000	0	0	0	21.840.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,91	#DIV/0!	#DIV/0!
299	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak I Denpasar Utara	0	0	0	32.440.000	0	0	0	31.960.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!
300	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak II Denpasar Utara	0	0	0	6.400.000	0	0	0	4.720.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,74	#DIV/0!	#DIV/0!
301	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak III Denpasar Utara	0	0	0	42.480.000	0	0	0	42.480.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	0	0	5.663.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
302	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas I Denpasar Timur	0	0	0	404.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
303	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas II Denpasar Timur	0	0	0	68.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
304	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas I Denpasar Barat	0	0	0	75.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
305	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas II Denpasar Barat	0	0	0	227.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
306	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas I Denpasar Selatan	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
307	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas II Denpasar Selatan	0	0	0	269.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
308	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas III Denpasar Selatan	0	0	0	834.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
309	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas IV Denpasar Selatan	0	0	0	1.401.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
310	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas I Denpasar Utara	0	0	0	166.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
311	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas II Denpasar Utara	0	0	0	950.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
312	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas III Denpasar Utara	0	0	0	269.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	529.310.000,00	-	212.824.783,00	314.306.450,00	247.221.500,00	1.852.592.121,00	196.164.968,00	299.445.775,00	0,47	#DIV/0!	0,92	0,95	-15,95%	6,60%
313	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	529.310.000,00	0	212.824.783,00	314.306.450	247.221.500	1.852.592.121,00	196.164.968	299.445.775	0,47	#DIV/0!	0,92	0,95	-15,95%	6,60%
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.498.611.917,00	4.959.303.031,00	4.334.541.156,00	920.024.250,00	3.647.027.787,00	1.852.592.121,00	819.576.968,00	769.130.690,00	0,66	0,37	0,19	0,84	-44,90%	-40,48%
11	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	0	7.700.000,00	7.699.800,00	7.900.000,00	0	7.700.000,00	7.699.800,00	7.485.000,00	#DIV/0!	1,00	1,00	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
314	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0	7.700.000,00	7.699.800,00	7.900.000	0	7.700.000	7.699.800	7.485.000	#DIV/0!	1,00	1,00	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	5.301.971.917,00	4.951.603.031,00	3.748.136.356,00	164.174.250,00	3.476.161.857,00	1.844.892.121,00	487.777.168,00	130.730.000,00	0,66	0,37	0,13	0,80	-68,60%	-66,50%
315	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.301.971.917,00	4.934.003.031,00	3.190.000.000,00	0	3.476.161.857,00	1.840.227.121,00	0	0	0,66	0,37	0,00	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
316	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar RSU WANGAYA	0	0	467.678.606,00	0	0	0	411.607.168,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
317	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	17.600.000,00	90.457.750,00	164.174.250	0	4.665.000,00	76.170.000,00	130.730.000	#DIV/0!	0,27	0,84	0,80	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.640.000,00	-	578.705.000,00	747.950.000,00	170.865.930,00	-	324.100.000,00	630.915.690,00	0,87	#DIV/0!	0,56	0,84	56,10%	54,56%
318	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.640.000,00	0	578.705.000,00	747.950.000	170.865.930	0	324.100.000	630.915.690	0,87	#DIV/0!	0,56	0,84	56,10%	54,56%
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	228.566.000,00	277.859.091,00	679.262.000,00	318.760.750,00	100.312.100,00	257.057.537,00	576.686.060,00	285.641.060,00	0,44	0,93	0,85	0,90	11,73%	41,74%
14	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan & Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.449.000,00	8.360.000,00	124.760.000,00	3.660.000,00	990.000,00	2.098.350,00	72.963.800,00	3.360.000,00	0,05	0,25	0,58	0,92	-43,64%	50,28%
319	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.449.000,00	8.360.000	124.760.000	3.660.000	990.000	2.098.350	72.963.800	3.360.000	0,05	0,25	0,58	0,92	-43,64%	50,28%
15	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, Makanan dan Minuman tertentu yang di produksi oleh industri Rumah Tangga	101.870.000,00	49.847.091,00	224.660.095,00	48.405.750,00	31.025.000,00	47.774.493,00	217.577.000,00	46.360.750,00	0,30	0,96	0,97	0,96	-21,97%	14,33%
320	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.745.000,00	47.110.841,00	221.120.095,00	44.865.750	26.900.000	45.038.243	214.050.000	42.820.750	0,28	0,96	0,97	0,95	-22,86%	16,76%
321	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.125.000,00	2.736.250,00	3.540.000,00	3.540.000	4.125.000	2.736.250	3.527.000	3.540.000	1,00	1,00	1,00	1,00	-4,97%	-4,97%
16	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	40.750.000,00	112.500.000,00	113.350.000,00	148.840.000,00	40.750.000,00	112.500.000,00	113.340.000,00	148.840.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	54,00%	54,00%
322	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	40.750.000,00	112.500.000,00	113.350.000,00	148.840.000	40.750.000	112.500.000	113.340.000	148.840.000	1,00	1,00	1,00	1,00	54,00%	54,00%
17	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	65.497.000,00	107.152.000,00	216.491.905,00	117.855.000,00	27.547.100,00	94.684.694,00	172.805.260,00	87.080.310,00	0,42	0,88	0,80	0,74	21,63%	46,76%



No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
323	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	65.497.000,00	107.152.000,00	216.491.905,00	117.855.000	27.547.100	94.684.694	172.805.260	87.080.310	0,42	0,88	0,80	0,74	21,63%	46,76%
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	346.262.930,00	927.742.159,00	1.337.541.598,00	808.089.750,00	200.286.133,00	823.393.250,00	1.290.084.400,00	798.324.900,00	0,58	0,89	0,96	0,99	32,64%	58,55%
18	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat & Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	272.687.500,00	803.881.159,00	734.419.638,00	342.499.800,00	147.609.550,00	712.126.050,00	720.637.600,00	336.205.900,00	0,54	0,89	0,98	0,98	7,89%	31,57%
324	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	272.687.500,00	803.881.159,00	734.419.638,00	342.499.800	147.609.550	712.126.050	720.637.600	336.205.900	0,54	0,89	0,98	0,98	7,89%	31,57%
19	Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.575.430,00	123.861.000,00	603.121.960,00	465.589.950,00	52.676.583,00	111.267.200,00	569.446.800,00	462.119.000,00	0,72	0,90	0,94	0,99	84,97%	106,24%
325	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	73.575.430,00	123.861.000,00	475.968.657,00	181.549.950	52.676.583	111.267.200	466.811.800	179.839.000	0,72	0,90	0,98	0,99	35,13%	50,58%
326	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) I Denpasar Timur	0	0	12.600.000,00	1.750.000,00	0	0	1.800.000,00	1.750.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,14	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
327	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)II Denpasar Timur	0	0	8.400.000,00	6.330.000,00	0	0	8.400.000,00	6.330.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
328	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) I Denpasar Barat	0	0	12.240.000,00	750.000,00	0	0	0	750.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
329	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) II Denpasar Barat	0	0	13.500.000,00	9.300.000,00	0	0	12.380.000,00	9.140.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,92	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!
330	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) I Denpasar Selatan	0	0	0	115.500.000,00	0	0	0	115.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
331	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) II Denpasar Selatan	0	0	23.995.000,00	28.000.000,00	0	0	23.835.000,00	26.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	0,94	#DIV/0!	#DIV/0!
332	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) III Denpasar Selatan	0	0	12.670.000,00	44.500.000,00	0	0	12.480.000,00	44.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
333	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) IV Denpasar Selatan	0	0	3.968.303,00	28.500.000,00	0	0	3.960.000,00	28.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
334	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) I Denpasar Utara	0	0	11.880.000,00	10.190.000,00	0	0	11.880.000,00	10.190.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
335	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) II Denpasar Utara	0	0	11.580.000,00	17.500.000,00	0	0	11.580.000,00	17.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
336	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) III Denpasar Utara	0	0	16.320.000,00	21.720.000,00	0	0	16.320.000,00	21.720.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	TOTAL	216.202.079.503	421.137.317.319	418.558.255.151	479.317.348.622	172.613.708.551	378.952.003.164	362.911.778.843	431.607.811.259	0,80	0,90	0,87	0,90	30,39%	35,73%



Berdasarkan Tabel 2.10 diatas menunjukkan rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode tahun 2021-2024 sebesar 30,39 %, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi tercatat sebesar 35,73%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran dan diikuti juga dengan peningkatan realisasi. Dari lima program yang ada di Dinas Kesehatan hanya program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mengalami pertumbuhan negatif, itu disebabkan karena adanya efisiensi anggaran yang disebabkan oleh Covid-19 dimana tidak boleh melaksanakan pertemuan secara offline. Empat program yang lain yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mengalami pertumbuhan secara signifikan.

CAPAIAN KUNJUNGAN PASIEN RSUD WANGAYA
RAWAT JALAN

Tabel 2.11
Data kunjungan pasien di Instalasi Rawat Jalan

No	Jenis pelayanan rawat jalan (poliklinik/klinik)	tahun 2020	tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	THT	2.571	3,181	3.059	4.731	1.770
2	Psikiatri	3.079	3,447	2.805	4.983	3.431
3	Mata	2.407	3,288	2.771	4.336	2.178
4	Geriatri	3.433	4,335	5.593	12.153	6.617
5	Merpati (VCT)	14.399	12.831	13.163	13.607	9.376
6	Endokrin Dewasa	-	-	665	2.953	4.330
7	Paru	3.191	2.320	3.326	4.808	5.201
8	Jantung	3.726	3,729	4.943	9.239	12.544
9	Eksekutif	480	533	750	2.245	2.151
10	Endokrin Anak	280	449	524	116	1.130
11	Urologi	2.536	2,863	3.202	4.251	5.202
12	Kebidanan dan Kandungan	1.299	1,147	1.358	1.731	1.557
13	Anastesi	544	514	1.037	1.467	1.813
14	Bedah	4.721	5.094	7.192	6.791	4.864
15	Bedah Ortopedi	-	-	-	4.481	6.897
16	Bedah Digestif	-	-	-	170	301
17	Kes Tradisional	-	-	11	37	0
18	Ginjal Hipertensi	8.201	8,369	9.265	2.003	3.799
19	Gigi Umum	2.044	4.106	5.318	5.216	374
20	Orthodonti	-	-	-	0	5
21	Bedah Mulut	-	-	-	1.633	6.600
22	Interna	6.160	6,666	6.534	8.785	11.607



23	Neurologi	1.446	1,396	1.706	3.088	4.568
24	Kulit dan Kelamin	718	1,033	820	1.301	1.156
25	Anak	2.397	2,200	3.114	4.110	2.805
26	Laktasi	218	353	390	25	217
27	Psikologi	-	-	521	427	359
28	Bronchoscopi	15	11	46	77	77
29	Endoscopy	361	375	438	290	400
30	Layanan ESWL	-	-	-	264	135
31	Konsultasi Gizi	10	23	51	2.256	164
32	Kosmetik Medik	-	-	-	127	53
33	Bedah Plastik	-	-	-	1	324
34	Bedah Onkologi	-	-	-	-	116
Jumlah Total		64.236	68.263	78.602	107.702	102.121

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar

Berdasarkan data diatas, kunjungan pasien rawat jalan selama tahun 2024 sebanyak 102.121orang . Kunjungan terbanyak di poliklinik Jantung dengan jumlah kunjungan sebanyak **12.544 orang**.

Tabel 2.12
Data 10 besar penyakit pasien instalasi rawat jalan RSUD Wangaya Tahun 2024

No	ICD	Nama ICD	Tahun 2024	
			Jumlah	%
1	E149	Unspecified diabetes mellitus: Without complications	7.106	21,01
2	I251	Atherosclerotic heart disease	5.198	15,37
3	I10.	Essential (primary) hypertension	5.147	15,22
4	K011	Impacted teeth	4.231	12,51
5	K053	Chronic periodontitis	2.910	8,61
6	I119	Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	2.618	7,74
7	I509	Heart failure, unspecified	2.040	6,03
8	N40.	Hyperplasia of prostate	1.678	4,96
9	K30.	Dyspepsia	1.454	4,30
10	I500	Congestive heart failure	1.433	4,24

Dari sepuluh besar penyakit, menunjukan penyakit yang tertinggi dengan diagnosa Atherosclerotic heart disease **5.198 orang**.



RAWAT INAP

Tabel 2.13
Ruangan dan Jumlah Tempat Tidur

RUANG	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	JUMLAH
ANGSA	16	4	6	26
BELIBIS	14	4	6	24
CENDRAWASIH			30	30
DARA	2	8	10	20
KASWARI	8	4	4	16
MERAK		6		6
PERINATOLOGI		15		15
PRAJA AMERTA	46			46
INTERMEDIATE		6		6
TOTAL	86	47	56	189

Tabel 2.14
Data Hunian Pasien di Instalasi Rawat Inap 2024

Bulan	Ruangan							
	Angsa	Belibis	Cendrawasih	Dara	Perinatologi	Kawari	Praja Amerta I, II, III	Merak
Januari	145	189	243	221	37	116	171	23
Februari	131	157	186	169	28	109	157	30
Maret	123	196	248	245	39	139	168	34
April	155	207	249	178	27	152	199	22
Mei	185	212	220	188	27	176	307	34
Juni	114	175	244	199	20	112	144	17
Juli	109	173	274	154	23	109	112	18
Agustus	110	180	270	154	11	83	126	18
September	102	146	217	125	17	82	97	25
Oktober	128	192	261	156	24	105	131	26
November	144	194	211	146	15	133	128	28
Desember	145	206	210	152	13	146	132	15
Rata – Rata Hunian 2024	1.591	2.227	2.833	2.087	281	1.462	1.872	290

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar



Tabel 2.15
Data kinerja rumah sakit tahun 2024

NO	JENIS INDIKATOR	JAN	PEBR	MART	APR	MEI	JUNI	JULI	AGU S T	SEPT	OKT	NOP	DES	RAT A-RATA 1 TAHUN	STAN DAR
1	BOR %	67.29	64.27	64.61	71.39	79.85	60.73	54.53	51.69	48.63	58.33	58.72	62.38	61.87	60-85
2	LOS (HARI)	3.71	3.71	3.45	3.57	3.68	3.43	3.46	3.31	3.45	3.55	3.42	3.73	3.54	6 - 9
3	BTO (KALI)	5.52	4.98	5.74	5.69	6.61	5.27	4.94	4.74	3.93	4.90	5.00	4.88	62.21	40-50
4	TOI (HARI)	1.84	2.08	1.91	1.51	0.95	2.23	2.85	3.16	3.92	2.63	2.47	2.39	2.33	1-3
5	GDR ‰	40.23	46.51	51.61	41.46	38.54	49.17	30.25	38.35	38.23	40.60	46.25	46.53	42.31	,<45
6	NDR ‰	23.47	26.05	27.42	24.39	18.92	29.85	17.81	20.51	31.80	23.61	25.90	23.74	24.46	,<25
7	MDR ‰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
8	IDR ‰	162.79	133.33	76.92	222.22	106.38	208.33	32.26	117.65	0.00	80.00	35.71	-	97.97	-

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar

Indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit, adalah :

1. BOR (*bed occupancy rate*) = Rata - rata penggunaan tempat tidur
2. LOS (*length of stay*) = Rata - rata lamanya pasien dirawat
3. BTO (*bed turn over*) = Tingkat perputaran tempat tidur
4. TOI (*turn over internal*) = Tempat tidur kosong
5. NDR (*net death rate*) = Angka kematian bersih
6. GDR (*gross death rate*) = Angka kematian kotor
7. MDR (*maternal death rate*) = Angka kematian ibu
8. IDR (*infant death rate*) = Angka kematian bayi

Indikator mutu RSUD Wangaya diatas standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, artinya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Wangaya adalah baik atau mutu pelayanan kesehatan RSUD Wangaya tergolong baik.



Tabel 2.16
Data pelayanan medis rumah sakit

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penderita Masuk Rumah Sakit	9.249	8.279	10.200	13.430	13.447
2.	Jumlah Hari Perawatan	38.600	38.290	41934	51.724	48.917
3.	Penderita Keluar Hidup	8.734	7.689	9623	12.765	12.840
4.	Penderita Keluar Mati > 48 Jam	313	354	305	389	326
5.	Penderita Keluar Mati < 48 Jam	283	235	221	277	271
6.	Penderita Mati di IGD	159	192	221	225	-

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar

Tabel 2.17
Data 10 besar penyakit instalasi rawat inap RSUD Wangaya Kota Denpasar tahun 2024

No	ICD	Nama ICD	Tahun 2024	
			Jumlah	%
1	A91.	Dengue haemorrhagic fever	1.062	17.80
2	E876	Hypokalaemia	631	10.58
3	P248	Other neonatal aspiration syndromes	627	10.51
4	K30.	Dyspepsia	621	10.41
5	I10.	Essential (primary) hypertension	618	10.36
6	J189	Pneumonia, unspecified	587	9.84
7	K011	Impacted teeth	482	8.08
8	E119	Non-insulin-dependent diabetes mellitus: Without complications	481	8.06
9	D649	Anaemia, unspecified	438	7.34
10	A09.	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	418	7.01

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar

Data diatas menunjukkan, pasien dirawat dengan penyakit *Dengue haemorrhagic fever* menduduki peringkat teratas sebanyak **1.062 orang (17.80%)**

IGD



Tabel 2.18

Data Pengunjung di Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis pelayanan	2020	2021	2023	2024	2024
1.	Instalasi Gawat Darurat	25.218	20.860	29.599	44.695	46.266

Sumber Data : Instalasi Gawat Darurat RSUD Wangaya Kota Denpasar

Tabel 2.19

Data 10 besar penyakit unit Instalasi Gawat Darurat 2024

NO	ICD	Nama ICD	Jumlah
1	R509	Fever, unspecified	8.172
2	K30.	Dyspepsia	6.112
3	R104	Other and unspecified abdominal pain	2.598
4	R060	Dyspnoea	2.090
5	A09.	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	1.725
6	R11.	Nausea and vomiting	1.695
7	J459	Asthma, unspecified	1.234
8	R51.	Headache	1.167
9	A91.	Dengue haemorrhagic fever	1.063
10	I10.	Essential (primary) hypertension	943

Berdasarkan data diatas, pasien dengan penyakit Fever, unspecified banyak 8.172 orang, menduduki peringkat teratas dan Essential (primary) hypertension paling rendah sebanyak 943 Orang.



ANGGARAN & REALISASI PENDANAAN

Tabel 2.20
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Wangaya Kota Denpasar Tahun 2021-2024

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggr an	reali sasi
Belanja Operasi														
Belanja Pegawai	113.486.518.130,00	96.767.007.164,00	88.440.466.812,00	112.048.653.491,47	102.217.572.292	93.415.500.979,93	81.062.640.391,14	108.021.578.949,96	90,07	96,54	91,66	96,41	0,76	3,19
-Belanja Barang dan Jasa	102.529.344.758,00	101.407.912.870,00	89.096.010.004,11	88.997.892.120,28	98.405.325.353	95.079.559.036,35	88.683.584.247,59	88.168.885.329,43	95,98	93,76	99,54	99,07	- 4,29	- 3,40
Belanja Modal	31.774.683.384,00	25.133.505.850,00	14.328.805.000,00	20.631.888.481,00	28.655.759.858	21.677.507.822,00	13.411.102.984,00	19.502.564.594,00	90,18	86,25	93,60	94,53	1,19	-7,20
TOTAL	247.790.546.272,00	223.308.425.884,00	191.865.281.816,11	221.678.434.092,75	229.278.657.503,00	210.172.567.838,28	183.157.327.622,73	215.693.028.873,39	92,53	94,12	95,46	97,30	-2,34	- 7,41



Anggaran tahun 2021 – 2023 terjadi penurunan yaitu sebesar 9,89% dan 14,08%, Tahun 2023 – 2024 anggaran meningkat sebesar 115,53%.

Hal ini berpengaruh terhadap realisasi anggaran, dimana tahun 2021 – 2023 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 8,3% dan 12,85%. Tahun 2023 – 2024 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 17,76%

Demikian disimpulkan bahwa naik turunnya realisasi anggaran tergantung pada naik turunnya pagu anggaran.



2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran Dinas Kesehatan sangat beragam dan mencakup seluruh masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, promosi kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada kelompok sasaran antara lain :

1. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
Melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan keluarga.
2. Layanan Perbaikan Gizi Masyarakat
Menjangkau masyarakat luas untuk perbaikan status gizi, baik balita, anak-anak, maupun dewasa.
3. Layanan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
Menargetkan masyarakat umum untuk pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit menular dan tidak menular.
4. Layanan Promosi Kesehatan
Melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (germas).
5. Layanan Kesehatan Lingkungan
Menjangkau masyarakat agar lingkungan tempat tinggal dan aktivitas mereka lebih sehat termasuk pengendalian dan pengawasan penyehatan lingkungan dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT serta penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan.
6. Layanan Kesehatan Perorangan
Memberikan layanan kesehatan mulai dari tingkat primer di Puskesmas hingga layanan rujukan yang lebih kompleks di rumah sakit termasuk penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan serta mencakup masyarakat yang membutuhkan perawatan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Secara umum Isu kesehatan yang akan dihadapi di masa depan akan semakin kompleks. Hal ini disebabkan adanya transisi epidemiologi penyakit di Bali. Kejadian beberapa penyakit infeksi masih cukup tinggi seperti misalnya, demam dengue, diare, infeksi saluran nafas akut, HIV/AIDS dan lain-lainnya.



Sementara itu penyakit - penyakit infeksi baru (*new emerging diseases*) akan mengalami peningkatan pula, seperti misalnya SARS, flu burung, dan covid 19 serta penyakit baru lainnya yang kemungkinan muncul. Penyakit-penyakit sebagai akibat perilaku juga akan terus meningkat seperti misalnya penyakit – penyakit yang muncul karena kecanduan alkohol, narkoba, merokok, kegemukan dan lain-lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya penyakit jantung koroner, stroke, dan kanker juga akan terus meningkat.

Adapun capaian dari upaya dan hasil pembangunan kesehatan di Kota Denpasar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- b) Dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan sudah seluruh indikator mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan pada PMK No. 6 Tahun 2024.
- c) Angka Kematian Ibu pada tahun 2024 sebesar 123,23 per 100.000 KH. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 49,64 per 100.000 KH. Peningkatan angka kematian ibu tahun 2024 sebagian besar disebabkan oleh non obstetric antara lain pendarahan, hipertensi, kelainan jantung dan pembuluh darah.
- d) Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar tahun 2024 sebesar 10,56 per 1000 KH. Angka ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu sebesar 6,62 per 1000 KH. Penyebab kematian tertinggi adalah kelainan kardiovaskular dan respiratori, infeksi, BBLR dan Prematuritas, pneumonia serta kelainan kongenital.
- e) *Incidence rate* DBD pada tahun 2024 di Kota Denpasar sebesar 194,4 per 100.000 penduduk, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 128,4 per 100.000 penduduk.
- f) Data status gizi yang diperoleh dari hasil pemantauan pertumbuhan balita pada tahun 2024 berdasarkan laporan gizi menunjukkan bahwa dari 22.356 balita yang diukur ditemukan sebanyak 1,0% (217 balita) dengan status gizi kurang (BB/TB: < -2 s.d -3 SD), dan status balita gizi buruk (BB/TB: < -3 SD) sebesar 0,05% (12 balita), dan semua balita gizi buruk sudah mendapat perawatan. Dari 22.354 balita yang diukur tinggi badannya, sebanyak 2,1% (459 balita) merupakan balita pendek'

Berdasarkan hasil capaian program bidang kesehatan periode renstra 2021-2026 maka permasalahan kesehatan di Kota Denpasar adalah :

- a. Belum optimalnya penanganan penyakit menular, tidak menular dan penanggulangan wabah antara lain masih tingginya angka kejadian penyakit menular seperti DBD, HIV, dan TB



- b. Belum terpenuhinya target Kesehatan ibu bayi balita dan lansia
- c. Belum optimalnya mutu pelayanan Kesehatan
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana Kesehatan
- e. Belum optimalnya kualitas tenaga Kesehatan
- f. Belum optimalnya kualitas Kesehatan lingkungan dan makanan

B.RSUD Wangaya Kota Denpasar

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, RSUD Wangaya Kota Denpasar dihadapkan pada berbagai permasalahan.

Berdasarkan analisis gambaran umum pelayanan RSUD Wangaya Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir terdapat berbagai indikator kinerja yang telah memenuhi target, disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani secara terencana sinergis dan berkelanjutan sehingga indikator kinerja yang belum memenuhi target dapat dicapai dengan baik.

Indentifikasi Permasalahan yang dihadapi RSUD Wangaya Kota Denpasar adalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum tercapai Indeks Kepuasan Masyarakat secara maksimal	Sarana dan prasarana alat kesehatan belum sesuai dengan standar rumah sakit Tipe B	7. Sarana dan prasarana alat kesehatan belum terpenuhi 8. Utilitas fasilitas belum dimanfaatkan secara maksimal 9. Anggaran BLUD belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional 10.Terbatasnya sarana gedung untuk peyanan

2	Belum optimalnya mutu pelayanan rumah sakit	SPM rumah sakit belum sepenuhnya mencapai target	7. Kompetensi SDM tidak sesuai standar 8. Sarana dan prasarana alat kesehatan tidak sesuai standar 3. Ketersediaan obat dan Barang Habis Pakai belum terpenuhi secara maksimal 4. Belum lengkapnya pengisian rekam medis
---	---	--	---

2.2.2 Isu Strategis Dinas Kesehatan

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satu pilar yang utama adalah peningkatan kualitas pembangunan kesehatan. Dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan system pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Dinas kesehatan Kota Denpasar memiliki tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diKota Denpasar. Untuk mencapai tujuan ini perlu dievaluasi program- program bidang kesehatan yang belum mencapai target.

Tabel 2.21
Isu Strategis Dinas Kesehatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS KESEHATAN	PERMASALAHAN DINAS KESEHATAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KESEHATAN	ISU LINGKUNGAN STRATEGIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KESEHATAN			ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Angka Harapan Hidup Denpasar (2023) : 75,59 tahun (diatas nasional dan provinsi)	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan kesehatan antara lain :	Belum optimalnya kualitas Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Penurunan angka kematian ibu dan bayi	Upaya Penanganan Penyakit Menular (AIDS TB, dan Malaria) dan Tidak Menular serta Penanggulangan Wabah



Cakupan kunjungan ibu hamil, pelayanan nifas sudah mencapai 100% (2023)	- Angka kematian bayi meningkat dari 3,6 (2022) menjadi 6,62 (2023)		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan		Pencegahan dan penurunan stunting	Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, dan Usia Lanjut
	- Angka kematian ibu masih tinggi : 49,64 (2023)		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia		Pemenuhan fasilitas kesehatan tingkat desa dan peningkatan kelas rumah sakit di kabupaten/kota yang lengkap dan berkualitas	Perbaikan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
	- Prevalensi balita gizi kurang : 0,49 (2023) meningkat sejak 2019		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua		Deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular melalui pemeriksaan kesehatan gratis	Peningkatan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Keamanan Pangan
	- Non Folio AFP Rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun meningkat dari 1,3 (2022) menjadi 7,7 (2023)				Pemenuhan SDM Kesehatan serta peningkatan kompetensinya di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kesehatan
	- Angka kejadian malaria : 0.02 (2023) menjadi yang tertinggi sejak 2014				Pemenuhan SDM Kesehatan serta peningkatan kompetensinya di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
					Peningkatan kemandirian masyarakat untuk deteksi dini serta memelihara kesehatan dan lingkungan sekitar melalui program pemberdayaan masyarakat desa	Belum Optimalnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Denpasar mengacu pada Visi Pemerintah Kota Denpasar yaitu **“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”**. Sedangkan Misi Pemerintah Kota Denpasar antara lain :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Kestinambungan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Berdasarkan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2025-2029 dimana Dinas Kesehatan mengemban misi 1 yaitu Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang berkeadilan, serta memperhatikan agenda pembangunan Nasional, Bali dan Denpasar maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Denpasar untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan analisis isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator dan target Dinas Kesehatan disajikan dalam tabel dibawah ini.



TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN											
- Meningkatnya kualitas kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		Angka Harapan Hidup (Tahun)	76,01	76,25	76,49	76,73	76,97	77,21	77,45	
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	123,3	120	119,5	119	118,5	118	117,5	
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Per 1.000 Kelahiran)	10,56	10	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	



Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan renstra Dinas Kesehatan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Kesehatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Pengembangan inovasi dalam pelayanan kesehatan	Optimalisasi pelayanan kesehatan melalui kolaborasi dengan prinsip inklusif	Mewujudkan pelayanan prima

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya

Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Kesehatan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan juga yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan

Tahun 2025-2029 strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dinas kesehatan kota Denpasar dan RSUD Wangaya adalah sesuai tabel di bawah ini :



Tabel 3.3
Strategi dan arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan

Sasaran RPJMD : Meningkatkan kualitas kesehatan			
Indikator : Angka Harapan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
			Meningkatnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari program dan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan subkegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang lebih spesifik, yang dapat terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan.

Dalam melaksanakan rencana strategis Dinas Kesehatan, diperlukan kerangka sistematis dan terpadu yang berisi indikasi rencana program prioritas dan rutin untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025 – 2029 merencanakan 4 program prioritas dan 1 program penunjang untuk mendukung pencapaian tujuan Renstra Dinas Kesehatan yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Seluruh program yang direncanakan sudah reponsif gender dan mendukung pencapaian SPM bidang Kesehatan. Program yang direncanakan juga sudah ada keberpihakan kepada kelompok lansia, kelompok bayi dan balita, kelompok Usia produktif, kelompok disabilitas salah satunya kelompok penderita orang dengan gangguan jiwa berat, kelompok wanita rentan. Uraian program/Kegiatan/Subkegiatan beserta outcome, output indikatornya dan pagu indikatif pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 diuraikan pada tabel dibawah ini :



TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN							
- Meningkatnya kualitas kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan				Angka Harapan Hidup (Tahun)		
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Per 100.000 Kelahiran Hidup)		
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Per 1.000 Kelahiran)		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Meningkatnya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Meningkatnya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Meningkatnya pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				601.888.121.866,00		645.044.101.969,00		550.142.580.832,00		561.203.247.939,00		566.227.569.618,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				373.461.261.266,00		374.388.092.880,00		377.786.571.743,00		388.508.989.038,00		391.626.581.811,00		
Meningkatnya layanan kesekretariatan	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan (%)	100	100	373.461.261.266,00	100	374.388.092.880,00	100	377.786.571.743,00	100	388.508.989.038,00	100	391.626.581.811,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				212.268.316.147,00		213.195.147.761,00		216.593.626.624,00		227.316.043.919,00		230.433.636.692,00		
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.592	1.440	212.268.316.147,00	2.262	213.195.147.761,00	2.262	216.593.626.624,00	2.262	227.316.043.919,00	2.262	230.433.636.692,00		
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				212.268.316.147,00		213.195.147.761,00		216.593.626.624,00		227.316.043.919,00		230.433.636.692,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.592	1.440	212.268.316.147,00	2.262	213.195.147.761,00	2.262	216.593.626.624,00	2.262	227.316.043.919,00	2.262	230.433.636.692,00		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.498.534.600,00		2.498.534.600,00		2.498.534.600,00		2.498.534.600,00		2.498.534.600,00		
Meningkatnya Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	2.498.534.600,00	7	2.498.534.600,00	7	2.498.534.600,00	7	2.498.534.600,00	7	2.498.534.600,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.200	0				0				0			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	8				8				8			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	182		182		182		182		182			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	2		2		2		2		2			
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.057.508.100,00		1.057.508.100,00		1.057.508.100,00		1.057.508.100,00		1.057.508.100,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	1.057.508.100,00	7	1.057.508.100,00	7	1.057.508.100,00	7	1.057.508.100,00	7	1.057.508.100,00		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				230.693.000,00		230.693.000,00		230.693.000,00		230.693.000,00		230.693.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	8	230.693.000,00	8	230.693.000,00	8	230.693.000,00	8	230.693.000,00	8	230.693.000,00		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.142.573.500,00		1.142.573.500,00		1.142.573.500,00		1.142.573.500,00		1.142.573.500,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	182	1.142.573.500,00	182	1.142.573.500,00	182	1.142.573.500,00	182	1.142.573.500,00	182	1.142.573.500,00		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				67.760.000,00		67.760.000,00		67.760.000,00		67.760.000,00		67.760.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	2	67.760.000,00	2	67.760.000,00	2	67.760.000,00	2	67.760.000,00	2	67.760.000,00		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.200	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.751.252.772,00		8.751.252.772,00		8.751.252.772,00		8.751.252.772,00		8.751.252.772,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6	8.751.252.772,00	6	8.751.252.772,00	6	8.751.252.772,00	6	8.751.252.772,00	6	8.751.252.772,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	254				254				254			
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.943.144.000,00		1.943.144.000,00		1.943.144.000,00		1.943.144.000,00		1.943.144.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	254	1.943.144.000,00	254	1.943.144.000,00	254	1.943.144.000,00	254	1.943.144.000,00	254	1.943.144.000,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.808.108.772,00		6.808.108.772,00		6.808.108.772,00		6.808.108.772,00		6.808.108.772,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6	6.808.108.772,00	6	6.808.108.772,00	6	6.808.108.772,00	6	6.808.108.772,00	6	6.808.108.772,00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.994.385.000,00		1.994.385.000,00		1.994.385.000,00		1.994.385.000,00		1.994.385.000,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	1.994.385.000,00	2	1.994.385.000,00	2	1.994.385.000,00	2	1.994.385.000,00	2	1.994.385.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	145	157				157				157			
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.774.385.000,00		1.774.385.000,00		1.774.385.000,00		1.774.385.000,00		1.774.385.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	145	157	1.774.385.000,00	157	1.774.385.000,00	157	1.774.385.000,00	157	1.774.385.000,00	157	1.774.385.000,00				
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	220.000.000,00	2	220.000.000,00	2	220.000.000,00	2	220.000.000,00	2	220.000.000,00				
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				147.948.772.747,00		147.948.772.747,00		147.948.772.747,00		147.948.772.747,00		147.948.772.747,00				
Meningkatnya operasional BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	12	147.948.772.747,00	12	147.948.772.747,00	12	147.948.772.747,00	12	147.948.772.747,00	12	147.948.772.747,00				
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				147.948.772.747,00		147.948.772.747,00		147.948.772.747,00		147.948.772.747,00		147.948.772.747,00				
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	12	147.948.772.747,00	12	147.948.772.747,00	12	147.948.772.747,00	12	147.948.772.747,00	12	147.948.772.747,00				
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				224.596.781.850,00		266.525.930.339,00		168.075.930.339,00		168.264.180.151,00		170.020.909.057,00				
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	96,66	100	224.596.781.850,00	100	266.525.930.339,00	100	168.075.930.339,00	100	168.264.180.151,00	100	170.020.909.057,00	1.02.0.00.0.00.01.00 - DINAS KESEHATAN			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				121.603.487.400,00		132.283.070.889,00		63.833.070.889,00		64.021.320.701,00		65.778.049.607,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	1	121.603.487.400,00	1	132.283.070.889,00	0	63.833.070.889,00	0	64.021.320.701,00	1	65.778.049.607,00		
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0	0		1		1		0		0			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	14	21		21		21		21		21			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	38	179		192		180		206		199			
	1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				0,00		450.000.000,00		20.000.000.000,00		0,00		0,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0	0	0,00	1	450.000.000,00	1	20.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				8.885.840.000,00		8.885.840.000,00		8.885.840.000,00		8.885.840.000,00		8.885.840.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	14	21	8.885.840.000,00	21	8.885.840.000,00	21	8.885.840.000,00	21	8.885.840.000,00	21	8.885.840.000,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.840.551.000,00		15.105.133.489,00		21.105.133.489,00		36.793.383.301,00		17.050.112.207,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	38	179	1.840.551.000,00	192	15.105.133.489,00	180	21.105.133.489,00	206	36.793.383.301,00	199	17.050.112.207,00		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				451.050.000,00		451.050.000,00		451.050.000,00		951.050.000,00		951.050.000,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	3	3	451.050.000,00	3	451.050.000,00	3	451.050.000,00	3	951.050.000,00	3	951.050.000,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				103.034.999.000,00		100.000.000.000,00		0,00		0,00		20.000.000.000,00		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	1	103.034.999.000,00	1	100.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	20.000.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				7.339.250.600,00		7.339.250.600,00		13.339.250.600,00		17.339.250.600,00		18.839.250.600,00						
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2	7.339.250.600,00	2	7.339.250.600,00	2	13.339.250.600,00	2	17.339.250.600,00	2	18.839.250.600,00						
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				51.796.800,00		51.796.800,00		51.796.800,00		51.796.800,00		51.796.800,00						
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1	1	51.796.800,00	1	51.796.800,00	1	51.796.800,00	1	51.796.800,00	1	51.796.800,00						
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				102.793.542.700,00		134.043.107.700,00		104.043.107.700,00		104.043.107.700,00		104.043.107.700,00						
Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	11	11	102.793.542.700,00	11	134.043.107.700,00	11	104.043.107.700,00	11	104.043.107.700,00	11	104.043.107.700,00						
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	171.121	122.672				125.994				138.595				152.455		167.701	
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	54.418	65.844				66.502				67.167				67.838		68.516	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16.513	11.504		11.734		11.969		12.208		12.452			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	11	11		11		11							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	6	12		12		12							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	270		270		270							
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	229		229		229							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	0	10		10		10							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0	1		1		1							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	11	11		11		11							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	2	2		2		2							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	6	6		6		6							



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	389		389		389		389		389			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	3		3		3		3		3			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	388		388		388		388		388			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	11	11		17		18		18		18			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16.332	11.957		12.196		12.440		12.689		12.943			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	17.051	12.822		13.078		13.339		13.605		13.877			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	6.283	6.318		6.418		6.518		6.618		6.668			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	22.279		22.279		22.279		22.279					
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2.002	1.240		1.067		944		850		777			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	23.630	13.422		23.630		25.630		27.630		29.750			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9.978	6.028		5.188		4.588		4.131		3.778			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.198	1.260		1.270		1.270		1.270		1.280			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.883	10.883		11.101		11.323		11.549		11.780			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30.694	30.694		31.308		31.934		32.573		33.224			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	62.884	69.172		76.087		83.697		92.066		101.277			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	51.126	267.140		293.854		323.240		355.564		391.120			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	45	45		50		50		55		55			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	80	6.508		6.508		6.508		6.508		6.508			
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	0	5		5		5		5		5			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				399.140.000,00		399.140.000,00		399.140.000,00		399.140.000,00		399.140.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	17.051	12.822	399.140.000,00	13.078	399.140.000,00	13.339	399.140.000,00	13.605	399.140.000,00	13.877	399.140.000,00		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				267.900.000,00		267.900.000,00		267.900.000,00		267.900.000,00		267.900.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16.332	11.957	267.900.000,00	12.196	267.900.000,00	12.440	267.900.000,00	12.689	267.900.000,00	12.943	267.900.000,00		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				33.100.000,00		33.100.000,00		33.100.000,00		33.100.000,00		33.100.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16.513	11.504	33.100.000,00	11.734	33.100.000,00	11.969	33.100.000,00	12.208	33.100.000,00	12.452	33.100.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				29.650.000,00		29.650.000,00		29.650.000,00		29.650.000,00		29.650.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	54.418	65.844	29.650.000,00	66.502	29.650.000,00	67.167	29.650.000,00	67.838	29.650.000,00	68.516	29.650.000,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				1.087.131.900,00		1.087.131.900,00		1.087.131.900,00		1.087.131.900,00		1.087.131.900,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	171.121	122.672	1.087.131.900,00	125.994	1.087.131.900,00	138.595	1.087.131.900,00	152.455	1.087.131.900,00	167.701	1.087.131.900,00		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				584.950.400,00		584.950.400,00		584.950.400,00		584.950.400,00		584.950.400,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	51.126	267.140	584.950.400,00	293.854	584.950.400,00	323.240	584.950.400,00	355.564	584.950.400,00	391.120	584.950.400,00		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				765.736.800,00		765.736.800,00		765.736.800,00		765.736.800,00		765.736.800,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	62.884	69.172	765.736.800,00	76.087	765.736.800,00	83.697	765.736.800,00	92.066	765.736.800,00	101.277	765.736.800,00		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				819.894.000,00		819.894.000,00		819.894.000,00		819.894.000,00		819.894.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30.694	30.694	819.894.000,00	31.308	819.894.000,00	31.934	819.894.000,00	32.573	819.894.000,00	33.224	819.894.000,00		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				1.148.600.000,00		1.148.600.000,00		1.148.600.000,00		1.148.600.000,00		1.148.600.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.883	10.883	1.148.600.000,00	11.101	1.148.600.000,00	11.323	1.148.600.000,00	11.549	1.148.600.000,00	11.780	1.148.600.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				185.695.000,00		185.695.000,00		185.695.000,00		185.695.000,00		185.695.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.198	1.260	185.695.000,00	1.270	185.695.000,00	1.270	185.695.000,00	1.270	185.695.000,00	1.280	185.695.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				381.299.500,00		381.299.500,00		381.299.500,00		381.299.500,00		381.299.500,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9.978	6.028	381.299.500,00	5.188	381.299.500,00	4.588	381.299.500,00	4.131	381.299.500,00	3.778	381.299.500,00		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				1.102.422.600,00		1.102.422.600,00		1.102.422.600,00		1.102.422.600,00		1.102.422.600,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	23.630	13.422	1.102.422.600,00	23.630	1.102.422.600,00	25.630	1.102.422.600,00	27.630	1.102.422.600,00	29.750	1.102.422.600,00		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	0	10	13.500.000,00	10	13.500.000,00	10	13.500.000,00	10	13.500.000,00	10	13.500.000,00		
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3.210.474.000,00		3.210.474.000,00		3.210.474.000,00		3.210.474.000,00		3.210.474.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	11	11	3.210.474.000,00	11	3.210.474.000,00	11	3.210.474.000,00	11	3.210.474.000,00	11	3.210.474.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				50.329.000,00		50.329.000,00		50.329.000,00		50.329.000,00		50.329.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	2	2	50.329.000,00	2	50.329.000,00	2	50.329.000,00	2	50.329.000,00	2	50.329.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				436.277.000,00		436.277.000,00		436.277.000,00		436.277.000,00		436.277.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	6	6	436.277.000,00	6	436.277.000,00	6	436.277.000,00	6	436.277.000,00	6	436.277.000,00		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				254.481.500,00		254.481.500,00		254.481.500,00		254.481.500,00		254.481.500,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	40	40	254.481.500,00	40	254.481.500,00	40	254.481.500,00	40	254.481.500,00	40	254.481.500,00		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				140.250.000,00		140.250.000,00		140.250.000,00		140.250.000,00		140.250.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	4	4	140.250.000,00	4	140.250.000,00	4	140.250.000,00	4	140.250.000,00	4	140.250.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				510.911.000,00		510.911.000,00		510.911.000,00		510.911.000,00		510.911.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	3	510.911.000,00	3	510.911.000,00	3	510.911.000,00	3	510.911.000,00	3	510.911.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				110.560.000,00		110.560.000,00		110.560.000,00		110.560.000,00		110.560.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	22.279	110.560.000,00	22.279	110.560.000,00	22.279	110.560.000,00	22.279	110.560.000,00	22.279	110.560.000,00		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				99.140.000,00		99.140.000,00		99.140.000,00		99.140.000,00		99.140.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	45	45	99.140.000,00	50	99.140.000,00	50	99.140.000,00	55	99.140.000,00	55	99.140.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8.560.204.750,00		8.560.204.750,00		8.560.204.750,00		8.560.204.750,00		8.560.204.750,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	11	11	8.560.204.750,00	11	8.560.204.750,00	11	8.560.204.750,00	11	8.560.204.750,00	11	8.560.204.750,00		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				69.640.648.000,00		69.640.648.000,00		69.640.648.000,00		69.640.648.000,00		69.640.648.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	6	12	69.640.648.000,00	12	69.640.648.000,00	12	69.640.648.000,00	12	69.640.648.000,00	12	69.640.648.000,00		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				159.995.000,00		159.995.000,00		159.995.000,00		159.995.000,00		159.995.000,00		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	80	6.508	159.995.000,00	6.508	159.995.000,00	6.508	159.995.000,00	6.508	159.995.000,00	6.508	159.995.000,00		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				76.568.000,00		76.568.000,00		76.568.000,00		76.568.000,00		76.568.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	76.568.000,00	1	76.568.000,00	1	76.568.000,00	1	76.568.000,00	1	76.568.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				2.791.830.750,00		4.041.395.750,00		4.041.395.750,00		4.041.395.750,00		4.041.395.750,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	388	2.791.830.750,00	388	4.041.395.750,00	388	4.041.395.750,00	388	4.041.395.750,00	388	4.041.395.750,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				253.980.000,00		253.980.000,00		253.980.000,00		253.980.000,00		253.980.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	12	253.980.000,00	12	253.980.000,00	12	253.980.000,00	12	253.980.000,00	12	253.980.000,00		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				192.100.000,00		192.100.000,00		192.100.000,00		192.100.000,00		192.100.000,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	11	11	192.100.000,00	17	192.100.000,00	18	192.100.000,00	18	192.100.000,00	18	192.100.000,00		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				21.030.000,00		21.030.000,00		21.030.000,00		21.030.000,00		21.030.000,00		
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	11	11	21.030.000,00	11	21.030.000,00	11	21.030.000,00	11	21.030.000,00	11	21.030.000,00		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				4.466.002.500,00		34.466.002.500,00		4.466.002.500,00		4.466.002.500,00		4.466.002.500,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	3	5	4.466.002.500,00	5	34.466.002.500,00	5	4.466.002.500,00	5	4.466.002.500,00	5	4.466.002.500,00		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				1.118.731.000,00		1.118.731.000,00		1.118.731.000,00		1.118.731.000,00		1.118.731.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2.002	1.240	1.118.731.000,00	1.067	1.118.731.000,00	944	1.118.731.000,00	850	1.118.731.000,00	777	1.118.731.000,00		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				1.397.084.000,00		1.397.084.000,00		1.397.084.000,00		1.397.084.000,00		1.397.084.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	6.283	6.318	1.397.084.000,00	6.418	1.397.084.000,00	6.518	1.397.084.000,00	6.618	1.397.084.000,00	6.668	1.397.084.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				82.700.000,00		82.700.000,00		82.700.000,00		82.700.000,00		82.700.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1	82.700.000,00	1	82.700.000,00	1	82.700.000,00	1	82.700.000,00	1	82.700.000,00		
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				1.102.700.000,00		1.102.700.000,00		1.102.700.000,00		1.102.700.000,00		1.102.700.000,00		
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	0	5	1.102.700.000,00	5	1.102.700.000,00	5	1.102.700.000,00	5	1.102.700.000,00	5	1.102.700.000,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				715.678.000,00		715.678.000,00		715.678.000,00		715.678.000,00		715.678.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	389	715.678.000,00	389	715.678.000,00	389	715.678.000,00	389	715.678.000,00	389	715.678.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				322.246.000,00		322.246.000,00		322.246.000,00		322.246.000,00		322.246.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	6	6	322.246.000,00	6	322.246.000,00	6	322.246.000,00	6	322.246.000,00	6	322.246.000,00		
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan				69.362.000,00		69.362.000,00		69.362.000,00		69.362.000,00		69.362.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	229	69.362.000,00	229	69.362.000,00	229	69.362.000,00	229	69.362.000,00	229	69.362.000,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				173.240.000,00		173.240.000,00		173.240.000,00		173.240.000,00		173.240.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	270	173.240.000,00	270	173.240.000,00	270	173.240.000,00	270	173.240.000,00	270	173.240.000,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				9.681.000,00		9.681.000,00		9.681.000,00		9.681.000,00		9.681.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	9.681.000,00	1	9.681.000,00	1	9.681.000,00	1	9.681.000,00	1	9.681.000,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				9.681.000,00		9.681.000,00		9.681.000,00		9.681.000,00		9.681.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	9.681.000,00	1	9.681.000,00	1	9.681.000,00	1	9.681.000,00	1	9.681.000,00		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				190.070.750,00		190.070.750,00		190.070.750,00		190.070.750,00		190.070.750,00		
Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	11	11	190.070.750,00	11	190.070.750,00	11	190.070.750,00	11	190.070.750,00	11	190.070.750,00		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				190.070.750,00		190.070.750,00		190.070.750,00		190.070.750,00		190.070.750,00		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	11	11	190.070.750,00	11	190.070.750,00	11	190.070.750,00	11	190.070.750,00	11	190.070.750,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.025.167.250,00		1.125.167.250,00		1.175.167.250,00		1.225.167.250,00		1.275.167.250,00		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100%	100%	1.025.167.250,00	100%	1.125.167.250,00	100%	1.175.167.250,00	100%	1.225.167.250,00	100%	1.275.167.250,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				5.280.000,00		5.280.000,00		5.280.000,00		5.280.000,00		5.280.000,00		
Meningkatnya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	100	50	5.280.000,00	50	5.280.000,00	50	5.280.000,00	50	5.280.000,00	50	5.280.000,00		
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				5.280.000,00		5.280.000,00		5.280.000,00		5.280.000,00		5.280.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	100	50	5.280.000,00	50	5.280.000,00	50	5.280.000,00	50	5.280.000,00	50	5.280.000,00		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				16.026.000,00		16.026.000,00		16.026.000,00		16.026.000,00		16.026.000,00		
Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	6	6	16.026.000,00	6	16.026.000,00	6	16.026.000,00	6	16.026.000,00	6	16.026.000,00		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				16.026.000,00		16.026.000,00		16.026.000,00		16.026.000,00		16.026.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	6	6	16.026.000,00	6	16.026.000,00	6	16.026.000,00	6	16.026.000,00	6	16.026.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.003.861.250,00		1.103.861.250,00		1.153.861.250,00		1.203.861.250,00		1.253.861.250,00		
Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	155	84	1.003.861.250,00	115	1.103.861.250,00	115	1.153.861.250,00	115	1.203.861.250,00	115	1.253.861.250,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.003.861.250,00		1.103.861.250,00		1.153.861.250,00		1.203.861.250,00		1.253.861.250,00		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	155	84	1.003.861.250,00	115	1.103.861.250,00	115	1.153.861.250,00	115	1.203.861.250,00	115	1.253.861.250,00		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				701.799.900,00		801.799.900,00		851.799.900,00		901.799.900,00		951.799.900,00		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	93,64	100	701.799.900,00	100	801.799.900,00	100	851.799.900,00	100	901.799.900,00	100	951.799.900,00	1.02.0.00.0.00.01.00 - DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				156.698.400,00		156.698.400,00		156.698.400,00		156.698.400,00		156.698.400,00		
Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	11	30	156.698.400,00	30	156.698.400,00	30	156.698.400,00	30	156.698.400,00	30	156.698.400,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				156.698.400,00		156.698.400,00		156.698.400,00		156.698.400,00		156.698.400,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	11	30	156.698.400,00	30	156.698.400,00	30	156.698.400,00	30	156.698.400,00	30	156.698.400,00		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				222.058.500,00		222.058.500,00		222.058.500,00		222.058.500,00		222.058.500,00		
Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	70	1	222.058.500,00	1	222.058.500,00	1	222.058.500,00	1	222.058.500,00	1	222.058.500,00		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				222.058.500,00		222.058.500,00		222.058.500,00		222.058.500,00		222.058.500,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	70	1	222.058.500,00	1	222.058.500,00	1	222.058.500,00	1	222.058.500,00	1	222.058.500,00		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				9.400.000,00		9.400.000,00		9.400.000,00		9.400.000,00		9.400.000,00		
Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	3	1	9.400.000,00	1	9.400.000,00	1	9.400.000,00	1	9.400.000,00	1	9.400.000,00		
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				9.400.000,00		9.400.000,00		9.400.000,00		9.400.000,00		9.400.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	3	1	9.400.000,00	1	9.400.000,00	1	9.400.000,00	1	9.400.000,00	1	9.400.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				171.118.000,00		171.118.000,00		171.118.000,00		171.118.000,00		171.118.000,00		
Meningkatnya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1	1	171.118.000,00	1	171.118.000,00	1	171.118.000,00	1	171.118.000,00	1	171.118.000,00		
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				171.118.000,00		171.118.000,00		171.118.000,00		171.118.000,00		171.118.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1	1	171.118.000,00	1	171.118.000,00	1	171.118.000,00	1	171.118.000,00	1	171.118.000,00		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				142.525.000,00		242.525.000,00		292.525.000,00		342.525.000,00		392.525.000,00		
Meningkatnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	46	60	142.525.000,00	60	242.525.000,00	60	292.525.000,00	60	342.525.000,00	60	392.525.000,00		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				142.525.000,00		242.525.000,00		292.525.000,00		342.525.000,00		392.525.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	46	60	142.525.000,00	60	242.525.000,00	60	292.525.000,00	60	342.525.000,00	60	392.525.000,00		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				2.103.111.600,00		2.203.111.600,00		2.253.111.600,00		2.303.111.600,00		2.353.111.600,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	83,41	100	2.103.111.600,00	100	2.203.111.600,00	100	2.253.111.600,00	100	2.303.111.600,00	100	2.353.111.600,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				556.698.600,00		556.698.600,00		556.698.600,00		556.698.600,00		556.698.600,00		
Meningkatnya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	24	24	556.698.600,00	24	556.698.600,00	24	556.698.600,00	24	556.698.600,00	24	556.698.600,00		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				556.698.600,00		556.698.600,00		556.698.600,00		556.698.600,00		556.698.600,00		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	24	24	556.698.600,00	24	556.698.600,00	24	556.698.600,00	24	556.698.600,00	24	556.698.600,00		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.546.413.000,00		1.646.413.000,00		1.696.413.000,00		1.746.413.000,00		1.796.413.000,00		
Meningkatnya pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	11	11	1.546.413.000,00	11	1.646.413.000,00	11	1.696.413.000,00	11	1.746.413.000,00	11	1.796.413.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1.546.413.000,00		1.646.413.000,00		1.696.413.000,00		1.746.413.000,00		1.796.413.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	11	11	1.546.413.000,00	11	1.646.413.000,00	11	1.696.413.000,00	11	1.746.413.000,00	11	1.796.413.000,00		



4.1.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian Sub Kegiatan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan tindakan-tindakan spesifik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk mencapai tujuan suatu program prioritas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan, ketersediaan sumber daya dan konsisi riil. Sub kegiatan ini terperinci, memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta dilaksanakan secara terpadu lintas sektor untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah secara efektif. Daftar Subkegiatan prioritas pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
			1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
			1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
			1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
			1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
			1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
			1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
			1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	
			1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di	
			1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3.	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
			1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
			1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
4.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Denpasar merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama adalah untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan pencapaian yang telah diraih Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN									
2.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	123,3	120	119,5	119	118,5	118	117,5	
3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran	10,56	10	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	

4.2.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Angka kejadian Malaria	negatif	Per 1000 Penduduk	0,027	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
3.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	negatif	Per 1.000 Kelahiran	11,97	11,97	11,94	11,91	11,88	11,85	11,82	
4.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	negatif	Per 1.000 Kelahiran	8,36	8	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	
5.	Cakupan kepesertaan JKN	positif	%	99,74	100	100	100	100	100	100	
6.	Cakupan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Cakupan Penemuan Kasus Pneumonia Balita	positif	%	123,4	40	40	40	40	40	40	
8.	Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Cakupan puskesmas	positif	%	275	275	300	300	300	300	300	
10.	Cakupan puskesmas pembantu	positif	%	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	
11.	Indeks Capaian SPM Bidang Kesehatan	positif	*	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Kasus PD3I Mendapatkan penanganan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Ketersediaan Obat Dan Vaksin	positif	%	100	95	95	95	95	95	95	
14.	Lulus Akreditasi	positif	*	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	
15.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	positif	Nilai	88,66	89,16	89,20	89,30	89,40	89,50	89,60	
16.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	positif	per 100.000 penduduk	2	2	2	2	2	2	2	
17.	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART	positif	%	81,7	90	90	90	90	90	90	
18.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
19.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
20.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
21.	Penurunan Angka Kematian Dengue	positif	%	0	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	
22.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
23.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
24.	Persentase BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
25.	Persentase BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	positif	%	0	65	70	75	80	85	85	
26.	Persentase BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap	positif	%	95	95	95	95	95	95	95	
27.	Persentase BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	positif	%	0	50	55	60	65	70	70	
28.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat tatalaksana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
29.	Persentase balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	positif	%	93,65	65	70	75	80	85	90	
30.	Persentase bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	positif	%	79,2	79	81	83	84	85	85	
31.	Persentase capaian survei kepuasan masyarakat	positif	%	88,67	100	100	100	100	100	100	
32.	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
33.	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan PHBS	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
34.	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
35.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
36.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
37.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	positif	%	90	90	90	90	90	90	90	
38.	Persentase Fasyankes Memenuhi Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
39.	Persentase fasyankes yang memenuhi standar INM	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
40.	Persentase Institusi Pendidikan yang Melaksanakan PHBS	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
41.	Persentase kegawatdaruratan yang tertangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
42.	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
43.	Persentase krisis kebencanaan yang tertangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
44.	Persentase kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat	positif	%	99,24	90	90	90	90	90	90	
45.	Persentase lanjut usia yang mandiri	positif	%	99	99	99	99	99	99	99	
46.	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	negatif	%	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	
47.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
48.	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
49.	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
50.	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
51.	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
52.	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
53.	Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan	positif	%	94	94	94	94	95	95	95	
54.	Persentase Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	positif	%	91,42	84	85	86	88	90	90	
55.	Persentase pemberian obat cacing pada anak BALITA	positif	%	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57	
56.	Persentase pemberian obat pencegahan masal (POPM) cacingan pada anak usia 6-23 bulan (BADUTA)	positif	%	0	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57	
57.	Persentase Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan yang diare	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
58.	Persentase Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan (baduta) yang diare	positif	%	0	100	100	100	100	100	100	
59.	Persentase Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS)	positif	%	98,12	90	92	94	96	100	100	
60.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana serta pembekalan farmasi rumah sakit	positif	%	0	80	85	90	90	95	95	
61.	Persentase pemenuhan SDM dan operasional rumah sakit	positif	%	0	90	91	91	95	95	95	
62.	Persentase Pemeriksaan Kehamilan (ANC) 6 kali Selama Masa Kehamilan	positif	%	104,9	80	82	85	88	90	90	
63.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
64.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
65.	Persentase penggunaan obat rasional (POR)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
66.	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	positif	Persentase	75	75	80	85	90	95	100	
67.	Persentase Praktik Inisiasi Menyusu Dini	positif	%	74,29	75	76	77	78	79	80	
68.	Persentase Puskesmas dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Baik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
69.	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	positif	%	72,7	72,7	73	74	75	80	85	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
70.	Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
71.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Sesuai Standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
72.	Persentase remaja putri yang diskriming anemia	positif	%	38,28	75	77	80	83	85	87	
73.	Persentase remaja putri yang konsumsi TTD	positif	%	83,15	90	92	94	96	98	98	
74.	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	positif	%	74,1	74,1	83,8	83,8	93,5	93,5	100	
75.	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	positif	%	83,41	83,46	83,51	83,56	83,61	83,66	83,71	
76.	Persentase Stimulasi dan Pemantauan Perkembangan pada BALITA	positif	%	101,3	95	96	97	98	99	100	
77.	Persentase tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
78.	Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
79.	Persentase Tempat Kerja yang Melaksanakan PHBS	positif	%	85	85	85	85	86	86	86	
80.	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	positif	%	93,64	94	94	94	95	95	95	
81.	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)	positif	%	81,5	90	90	90	90	90	90	
82.	Persentase terpenuhinya alat kesehatan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	positif	%	64	64	64	65	65	66	66	
83.	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	negatif	%	0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
84.	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	negatif	%	0	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	
85.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	negatif	(%)	10,4	10,4	10,4	8,9	8,9	8,9	7,4	
86.	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	negatif	Persentase	4,8	4,80	4,30	3,80	3,30	2,80	2,30	
87.	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	positif	%	-	55	60	65	70	75	80	
88.	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk (Per 100.000 Penduduk)	positif	Rasio	1,46	1,46	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	
89.	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	positif	Per 1000 Penduduk	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	
90.	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	positif	Per 1000 Penduduk	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
91.	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
92.	Persentase Tempat Umum yang Melaksanakan PHBS	positif	%	85	85	85	85	86	86	86	



Tabel 4.7
Target Pendapatan RSUD Wangaya Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	118.000.000.000	120.000.000.000	122.000.000.000	124.000.000.000	126.000.000.000

Target pendapatan RSUD Wangaya tahun 2026 – 2030 di prediksi terjadi trend kenaikan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000.000,- per tahun. Peningkatan dimaksud diasumsikan berasal dari peningkatan kunjungan pasien dan pendapatan lain-lain yang sah.



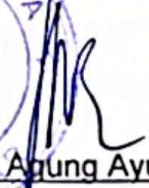
BAB V

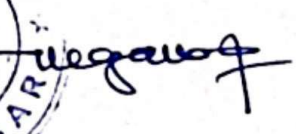
PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat program pembangunan kesehatan strategis dalam waktu 2025-2029. Renstra ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perencanaan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya selama lima tahun kedepan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Denpasar, yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam upaya menghasilkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan kesehatan yang strategis di Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Denpasar yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diatas akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Denpasar, 19 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 196709151998032003

WALIKOTA DENPASAR

GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3.3/621/HK/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terwujudnya efektivitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar sesuai arah kebijakan serta visi dan misi Kepala Daerah perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Strategis, perlu diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Startegis Perangkat Dearah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Walikota Kepada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2025-2029 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis. sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas yaitu :
- a. mengumpulkan data dan informasi,
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan,
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2025

a.n. Walikota Denpasar

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar,



dr. Anak Agung Ayu Candrawati, M.Kes
Pembina Tk.I

NIP. 19670915 199803 2003

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 7. Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar
 8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 3 MARET 2025

NOMOR : 100.3.3.3/621/HK/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029**

- Penasehat :** 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina :** 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kota Denpasar
- Ketua :** Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
- Sekretaris :** Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Denpasar
- Kelompok Kerja :** 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas
Kesehatan Kota Denpasar.
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas
Kesehatan Kota Denpasar.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada
Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain Pada Dinas
Kesehatan Kota Denpasar.
6. Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Dinas Kesehatan
Kota Denpasar.
7. Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Pada
Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
8. Ketua Tim Kerja Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
9. Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga Pada Dinas Kesehatan Kota
Denpasar.
10. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
11. Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi Pada Dinas
Kesehatan Kota Denpasar.
12. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
13. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer Pada
Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
14. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada
Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
15. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada
Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

16. Ketua Tim Kerja Kefarmasian Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
17. Ketua Tim Kerja Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
18. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
19. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Data dan Pelaporan Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
20. Ketua Tim Kerja Kesehatan Usia Produktif Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
21. Ketua Tim Kerja Kesehatan Jiwa Dan Napza Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
22. Pelaksana Pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

a.n. Walikota Denpasar

2 Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar,



4 dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Pembina Pk.I

NIP. 19670915 199803 2003



පිළිගිණු ෭ කොම ෭ කොම
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

DINAS KESEHATAN

රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (දෙපාර්තමේන්තුව) සෞඛ්‍ය සේවා (දෙපාර්තමේන්තුව) සෞඛ්‍ය සේවා

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

Formulir E.68

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra
Dinas Kesehatan Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi		√	Karena di Inmendagri nomor 2 tahun 2025 tidak ada pada sistematika Renstra PD	
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota		√	Karena di Inmendagri nomor 2 tahun 2025 tidak ada pada sistematika Renstra PD	
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota		√	Karena sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dimana Perangkat Daerah tidak Mempunyai visi dan Misi tetapi hanya ada Visi dan Misi Walikota Terpilih	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah		√	Karena sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dimana Perangkat Daerah tidak Mempunyai visi dan Misi tetapi hanya ada Visi dan Misi Walikota Terpilih	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 27 Agustus 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA DENPASAR



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Pembina Tk. I

NIP. 19670915 199803 2 003



පිළිගිණුම
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

කොට්ඨාස
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

කොට්ඨාස මාරුති පාර අංක 8, ඩෙන්පසර, කුඩු පොස් 80115, දුරකථන (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Mengacu pada INMEN No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah tidak menyusun visi dan misi, namun telah mengacu dan berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Pentahapan pelaksanaan program Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Denpasar, 3 September 2025

Kepala Bappeda Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199703 1 004